



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2024

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025





KATA PENGANTAR



Dengan menghaturkan *puja pangastuti angayubagia* dihadapan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, dan atas *Asung Kerta Wara Nugraha-Nya* Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

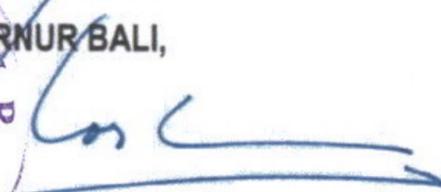
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 pada dasarnya dibuat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Pasal 70, menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 selanjutnya digunakan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas, paradigma penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami pergeseran dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta memperhatikan aspirasi yang bermuara kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik walaupun masih dijumpai beberapa hambatan, namun berkat kerja keras dan kerja sama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Sebagai akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Bali, yaitu: "*NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI*" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Visi ini merupakan implementasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru Tahun 2025–2125 yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023, serta dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Terimakasih.

Bali, 17 Maret 2025
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan	7
d. Jumlah Kabupaten/Kota	12
e. Rincian Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah, Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	13
f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Berada Di Setiap Perangkat Daerah	16
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	18
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja	22
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	37
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	37
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	43
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	46
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	49
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	163
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	166
2.1 Capaian Kinerja Makro	166
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	169

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	169
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	183
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	183
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	184
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	185
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	187
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	189
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	191
f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	193
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	242
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali	243
3.1.1 Target Kinerja	243
3.1.2 Realisasi	244
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota	253
3.3 Permasalahan dan Kendala	253
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	253
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	254
4.1 Urusan Pendidikan	256
4.2 Urusan Kesehatan	260
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	266
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	273
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	278
4.6 Urusan Sosial	280
4.7 Program dan Kegiatan	290

4.7.1	Urusan Pendidikan	290
4.7.2	Urusan Kesehatan	291
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum	291
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat	292
4.7.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	293
4.7.6	Urusan Sosial	294
BAB V PENUTUP		297

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Bali lahir setelah terjadi penyatuan kembali wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bali dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Era baru masyarakat Bali diawali dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sementara Daerah Bali, lembaga Legislasi ini dilantik pada 25 September 1950 di Bali Hotel Denpasar. Sebelum itu, Pemerintahan Bali dilaksanakan oleh sebuah badan yang bernama Badan Pelaksana Pemerintahan (BPP) di Bali, dengan Ketua BPP adalah AA. Gede Oka (Ketua Dewan Raja Raja) dengan anggota I Gusti Putu Merta (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Wayan Badra (urusan umum). Baru beberapa hari BPP menjalankan pemerintahan di Bali, Pemerintah NIT mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tertanggal 15 Juni 1950 untuk mengadakan perubahan ketatanegaraan di Indonesia Timur, sesuai dengan perubahan keadaan saat itu. Sebagai implementasi dari Undang-Undang itu, dibentuklah Panitia Penyelenggaraab Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950, Panitia ini yang membentuk DPR sementara Daerah Bali. Jumlah Anggota DPRD Bali saat itu berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari wakil-wakli dari PNI, Masyumi, KNPI, GBI, Persatuan Wanita Indonesia, Golongan Tani, dan orang-orang yang terikat oleh Partai/Organisasi. I Gusti Putu Merta dipilih sebagai Ketua dengan Wakil Ketua Ida Bagus Oka, dan Sekretaris I Gusti Putu Gde Kutri.

Sehari setelah pelantikan DPRD Bali, diadakan pemilihan Kepala Daerah Bali. AA. Bagus Sutedja dan Tjokorda Anom Putra ditetapkan sebagai calon terpilih. Selain itu, diadakan pula pemilihan anggota-anggota Dewan Pemerintah Daerah Bali, yaitu I Gusti Made Mudra (urusan politik), I Gusti Gde Subamia (urusan sosial), I Wayan Dangin (urusan ekonomi), dan I Gusti Bagus Sugriwa (urusan umum). Bersamaan dengan itu, diadakan pula perubahan struktur pemerintahan di masing-masing swapraja di Bali. Pada Bulan Mei 1951, semua daerah di Bali telah terbentuk DPRD Daerah Bagian (swapraja) serta dilanjutkan dengan pembentukan Dewan Pemerintahan Daerah.

Pasca Pemilu Tahun 1951, munculah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pemberlakuan Undang-Undang ini diikuti

dengan pembentukan Provinsi Bali pada 14 Agustus 1958. Setelah Provinsi Bali dibentuk, pelaksanaan Pemerintahan di Bali mengalami perubahan, Pemerintah Pusat menunjuk/mengangkat seorang pejabat Kepala Daerah. I Gusti Bagus Oka ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali yang pertama pasca dibentuknya Provinsi Bali, dan dilantik pada 1 Desember 1958. Setelah diangkatnya pejabat Kepala Daerah Tingkat I Bali, terbentuklah DPRD Bali yang baru. DPRD Bali yang baru terbentuk dan memilih calon Kepala Daerah yang baru. Presiden Soekarno menetapkan AA. Bagus Sutedja sebagai Kepala Daerah Bali dengan Keputusan Presiden Tahun 1959, jadi AA. Bagus Sutedja merupakan Kepala Daerah definitif pertama Provinsi Bali setelah dibentuk Tahun 1958.

Semula Ibukota Provinsi Bali ditetapkan di Singaraja mengikuti Ibukota Provinsi Sunda Kecil, tapi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2/36-B6 tanggal 23 Juni 1960, Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar, pemindahan ini atas resolusi DPRD Tingkat I Bali, dan Denpasar menjadi Ibukota Provinsi Bali hingga saat ini.

Dalam menghadapi berbagai perkembangan yang ada, masyarakat Bali meyakini bahwa sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan adalah keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan antarsesama manusia, dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya sesuai dengan filosofi yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali. Filosofi dan kearifan lokal tersebut harus terus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan oleh masyarakat Bali.

Kedudukan Provinsi Bali sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana Undang-Undang tersebut tidak lagi mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Bali, terutama dalam memelihara kebudayaan yang bersumber dari adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus terus dipelihara baik oleh masyarakat maupun Negara.

Sehingga untuk menghadapi dan menjawab permasalahan kebudayaan yang dihadapi Provinsi Bali mencakup adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang terus mengalami kemunduran dari segi jumlah dan kualitas kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta sistem nilai dan pranata budaya, serta penyelenggaraan pembangunan Bali yang belum sepenuhnya menjamin keajekan nilai budaya, adat istiadat, aura (taksu) Bali, dan kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Bali, maka pada tanggal 4 Mei 2023 diundangkan **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali** yang memuat penyempurnaan dasar

hukum, penyesuaian cakupan wilayah, pengakuan karakteristik Provinsi Bali serta kontribusi masyarakat dan negara dalam memberikan penguatan pemajuan kebudayaan dan desa adat di Bali.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Ibu kota Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 5.636,66 km², terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, layaknya wilayah lain di Indonesia.

Luas Wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat/desa pakraman. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Desa Adat
1	Buleleng	1.364,73	9	148	170
2	Jembrana	841,80	5	51	64
3	Tabanan	1.013,88	10	133	348
4	Badung	418,62	6	62	122
5	Denpasar	127,78	4	43	35
6	Gianyar	368,00	7	70	272
7	Bangli	490,71	4	72	168
8	Klungkung	315,00	4	59	119
9	Karangasem	839,54	8	78	190
BALI		5.780,06	57	716	1.493

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2023

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan *Desa Adat* atau *Desa Pakraman*. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat/Desa Pakraman di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat/Desa Pakraman yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat/Desa Pakraman diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/Desa Pakraman disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat/Desa Pakraman merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sat Kahyangan* sebanyak 8 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Sumber daya alam Bali berupa hutan, tanah, dan air sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Di wilayah Provinsi Bali terdapat 4 (empat) danau, 246 (dua ratus empat puluh enam) sungai, 24 (dua puluh empat) gunung yang 2 gunung di antaranya merupakan gunung berapi, yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Pegunungan di Bali terbentang di tengah-tengah Pulau Bali yang memanjang dari Barat ke Timur. Hal ini sekaligus menjadikan daratan Pulau Bali menjadi hamparan saujana yang memesona dengan sawah-sawah dan lembahnya yang berundak-undak.

Berdasarkan peruntukannya lahan di Bali terdiri atas lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) seluas 407.534 hektare, lahan bukan pertanian seluas 156.132 hektare, serta kawasan hutan dengan luas 130.686 (23,20%) hektare, yang mencakup hutan lindung, hutan produksi, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya.

3. Geologi

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regosol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi ini tersebar di Bali bagian barat sampai ke utara, seperti Lokapaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90% dari luas Pulau Bali.

Jenis tanah Regosol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekekan di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93% dari luas Pulau Bali.

Adapun jenis tanah Andosol yang juga peka terhadap erosi terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung Batukaru. Jenis tanah Mediteran yang kurang peka terhadap erosi terdapat di jazirah Bukit Nusa Penida dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah yang juga tidak peka terhadap erosi lainnya adalah tanah Alluvial, terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan Angantelu di wilayah Kabupaten Karangasem. Ketiga jenis tanah ini, yakni Andosol, Mediteran, dan Alluvial meliputi sekitar 15,49% dari total luas Pulau Bali.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat danau alam, yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, serta Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar dengan luas permukaan 10,22 km².

Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1.000 – 1.200 mdpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau seluruhnya sebesar 1.008,10 juta m³, di mana 80,90% bersumber dari Danau Batur, 11,53% dari Danau Buyan, 4,88% dari Danau Beratan, dan 2,68% dari Danau Tamblingan.

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir, dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali

terdapat lima waduk/embung, yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua, dan Embung Seraya dengan total volume air waduk dan embung seluruhnya sebesar 16,08 juta m³. Di samping itu telah selesai pula dibangun Waduk Titab di Kabupaten Buleleng yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, air baku air minum, sarana pariwisata dan perikanan dengan volume tampungan sebesar 10,08 juta m³.

Provinsi Bali merupakan Wilayah Sungai Strategis Nasional, yakni Sungai Bali-Penida terdiri atas 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) daerah aliran sungai (DAS). Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di tengah-tengah pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut Dinas PU Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai dengan panjang 2.776 km, namun yang potensial hanya 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m³/detik atau 6.195,3 juta m³/tahun.

Pada tahun 2017, Total Potensi Air sebesar 7,58 milyar m³ atau 239,69 m³/dt yang bersumber dari: Air permukaan/*run off* 6,55 milyar m³/th, mata air 0,73 milyar m³/th dan Air tanah 285,15 juta m³/th. Total ketersediaan air 3,36 milyar m³/th atau 106,64 m³/dt sedangkan total kebutuhan air 3,7 miliar m³/th atau 119,58 m³/dt.

Pada tahun 2018, total potensi air di Provinsi Bali mengalami penurunan dari tahun 2017 menjadi 6,84 milyar m³ atau 216,87 m³/dt. Sumber dari potensi air ini terdiri dari air permukaan sebesar 6,55 milyar m³ atau 208,83 m³/dt, dan air tanah sebesar 0,29 milyar m³ atau 9,04 m³/dt. Ketersediaan air bersih sebesar 101,23 m³/dt sedangkan kebutuhan air bersih adalah 119,96 m³/dt.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

BPS Provinsi Bali telah merilis proyeksi penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025 dengan menggunakan data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4.446,6 ribu jiwa, tahun 2022 sebesar 4.518,7 ribu jiwa, tahun 2023 sebesar 4.570,7 ribu jiwa, tahun 2024 sebesar 4.622,60 ribu jiwa, dan tahun 2025 sebesar 4.674,20 ribu jiwa.

Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Jembrana	282.00	283.60	285.10	286.60	288.00
2	Kab. Tabanan	451.60	453.90	456.20	458.30	460.40
3	Kab. Badung	711.40	728.00	744.80	761.80	779.10
4	Kab. Gianyar	523.60	528.10	532.50	536.90	541.10
5	Kab. Klungkung	180.70	181.40	182.10	182.80	183.40
6	Kab. Bangli	230.00	231.10	232.10	233.10	234.00
7	Kab. Karangasem	420.80	422.60	424.30	425.90	427.40
8	Kab. Buleleng	669.10	672.50	675.80	678.90	681.90
9	Kota Denpasar	997.50	1,017.60	1,037.90	1,058.30	1,078.90
10	Provinsi Bali	4,466.60	4,518.70	4,570.70	4,622.60	4,674.20

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

1. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2023, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2023 diperkirakan adalah sebesar 101,07. Rasio jenis kelamin penduduk di Provinsi Bali diproyeksikan terus menurun dari tahun 2021. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin Provinsi Bali diperkirakan sekitar 101,13, menurun di tahun 2022 menjadi 101,10, dan menurun lagi di tahun 2023 yaitu 101,07.

Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,64 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,18.

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Wilayah	Sex Ratio		
		2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	100.19	100.18	100.18
2	Kab. Tabanan	100.52	100.47	100.47
3	Kab. Badung	100.33	100.29	100.26
4	Kab. Gianyar	100.58	100.54	100.53
5	Kab. Klungkung	100.29	100.37	100.28
6	Kab. Bangli	101.46	101.43	101.33
7	Kab. Karangasem	102.67	102.66	102.64

No	Wilayah	Sex Ratio		
		2021	2022	2023
8	Kab. Buleleng	101.10	101.07	101.05
9	Kota Denpasar	102.00	101.97	101.92
	Provinsi Bali	101.13	101.10	101.07

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2023

2. Kepadatan Penduduk

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2021-2025, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 adalah 792 Jiwa/Km², meningkat menjadi 802 Jiwa/Km² pada tahun 2022, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 811 Jiwa/Km². Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.806 Jiwa/Km² pada tahun 2021, 7.964 Jiwa/Km² pada tahun 2022, dan 8.123 Jiwa/Km² pada tahun 2023.

Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 335 Jiwa/Km² pada tahun 2021, 337 Jiwa/Km² pada tahun 2022, dan 339 Jiwa/Km² pada tahun 2023,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
			2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	841,8	335	337	339
2	Kab. Tabanan	839,33	538	541	544
3	Kab. Badung	418,52	1.700	1.739	1.780
4	Kab. Gianyar	368	1.423	1.435	1.447
5	Kab. Klungkung	315	574	576	578
6	Kab. Bangli	520,81	442	444	446
7	Kab. Karangasem	839,54	501	503	505
8	Kab. Buleleng	1.365,88	490	492	495
9	Kota Denpasar	127,78	7.806	7.964	8.123
10	Provinsi Bali	5.636,66	792	802	811

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2023

3. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka

lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
- b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
- c) Sektor tersier berupa jasa.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Bali Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang)		
		2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462,871	545,533	534,705
2	Pertambangan dan Penggalian	9,627	9,013	7,859
3	Industri Pengolahan	368,947	381,746	394,125
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,709	5,473	3,703
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,870	8,324	6,486
6	Konstruksi	162,469	159,554	155,461
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480,622	495,533	511,721
8	Transportasi dan Pergudangan	77,347	59,540	57,669
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327,609	236,386	233,811
10	Informasi dan Komunikasi	12,805	14,360	16,494
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71,061	62,230	62,708
12	Real Estat	4,092	3,094	2,738
13	Jasa Perusahaan	58,490	42,832	33,764
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125,316	114,051	136,969
15	Jasa Pendidikan	100,014	103,537	109,449
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54,886	51,303	56,262
17	Jasa lainnya	135,271	130,910	117,930
	Jumlah	2,469,006	2,423,419	2,441,854

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas 2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2021 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 21,90%; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,96%; dan Industri Pengolahan sebesar 16,14%.

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Penduduk usia kerja Provinsi Bali pada Agustus 2022 sebanyak 3,56 juta orang, meningkat sebanyak 54.052 ribu orang dibanding Agustus 2021, dan meningkat sebanyak 53.593 ribu orang jika dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,74 juta orang (76,96%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 2,74 juta orang penduduk yang bekerja dan 131.469 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 158.016 orang (6,12%).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2022 tercatat sebesar 76,86%,

mengalami peningkatan sebesar 3,32% persen poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. BPS menyebutkan bahwa TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,80%. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Penurunan TPT ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat Provinsi Bali pada tahun 2022 masih berada dalam imbas kontraksi ekonomi akibat COVID-19 meskipun TPT Bali pada tahun 2022 belum sampai menyentuh TPT pra pandemi di tahun 2019 (1,52%).

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3,288,908	3,338,767	3,455,127	3,509,090	3,563,142
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%)	76.56	73.77	74.32	73.54	76.86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%)	1.37	1.52	5.63	5.37	4.80

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu:

- a. Kabupaten Jembrana;
- b. Kabupaten Tabanan;
- c. Kabupaten Badung;
- d. Kabupaten Gianyar;
- e. Kabupaten Klungkung;
- f. Kabupaten Bangli;
- g. Kabupaten Karangasem;
- h. Kabupaten Buleleng; dan
- i. Kota Denpasar.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Ibu kota Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar.

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum	
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	
2.	Sekretariat DPRD		
3.	Inspektorat Daerah		
Dinas Daerah Provinsi , terdiri dari:			
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga		
5.	Dinas Kesehatan		
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
8.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		
9.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
10.	Dinas Perhubungan		
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
13.	Dinas Kebudayaan		
14.	Dinas Pariwisata		
15.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
16.	Satuan Polisi Pamong Praja		
17.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
18.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
19.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan		
21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Badan Daerah Provinsi , terdiri dari:			
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
23.	Badan Riset dan Inovasi Daerah		
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
25.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
26.	Badan Pendapatan Daerah		
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
29.	Badan Penghubung		
Sekretariat Daerah Provinsi , terdiri dari:			
30.	Staf Ahli Gubernur Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah		Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
31.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
32.	Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian		
33.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
34.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
35.	Asisten Administrasi Umum		
36.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
37.	Biro Hukum		

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
38.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	
39.	Biro Organisasi	
40.	Biro Umum dan Protokol	

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Dasar hukum
UPTD pada Dinas Kesehatan, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
1.	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa.	
2.	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat.	
3.	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional.	
4.	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan.	
UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
5.	UPTD Pelayanan Sosial.	
6.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.	
UPTD pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
7.	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital.	
8.	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali.	
UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
9.	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.	
10.	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	
11.	UPTD Balai Pengawasan, Setifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	
12.	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	
UPTD pada Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
13.	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
UPTD pada Dinas Perhubungan, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
14.	UPTD Perlengkapan Jalan.	
15.	UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan.	
16.	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita.	
17.	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan.	
UPTD pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
18.	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.	
19.	UPTD Rumah Kreatif.	

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Dasar hukum
UPTD pada Dinas Kebudayaan, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
20.	UPTD Taman Budaya.	
21.	UPTD Museum Bali.	
22.	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali.	
UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
23.	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.	
24.	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.	
UPTD pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
25.	UPTD KPH Bali Utara.	
26.	UPTD KPH Bali Timur.	
27.	UPTD KPH Bali Selatan.	
28.	UPTD KPH Bali Barat.	
29.	UPTD TAHURA Ngurah Rai.	
30.	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.	
31.	UPTD Pengelolaan Sampah.	
UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
32.	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian.	
33.	UPTD Pengelolaan Air Minum.	
34.	UPTD Pengelolaan Air Limbah.	
UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
35.	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan.	
36.	UPTD Produksi Perikanan Budidaya.	
37.	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali.	
38.	UPTD Pelabuhan Perikanan.	
UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
39.	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan.	
40.	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Ketrampilan Kejuruan.	
UPTD pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
41.	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai.	
42.	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	
UPTD pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, yaitu:		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
43.	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	
UPTD pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022
44.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di	

No	Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	Dasar hukum	
	Kota Denpasar.	Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	
45.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung.		
46.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan.		
47.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana.		
48.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng.		
49.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar.		
50.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung.		
51.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli.		
52.	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem.		
UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah , yaitu:			Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
53.	UPTD Pengendalian Bencana Daerah		

f. Rincian Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Berada Di Setiap Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Pendidikan), Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Kepemudaan dan Olahraga)	16	7936	556	8508
2	DINAS KESEHATAN	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Kesehatan)	31	218	73	322
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang / Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman)	30	37	101	168
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)	17	60	20	97
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat)	10	23	43	76
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Sosial) / Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	15	12	59	86
7	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Tenaga Kerja) / Urusan Pilihan (Energi dan Sumber Daya Mineral)	22	69	38	129
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Pangan) / Urusan Pilihan	29	97	114	240

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
		(Pertanian)				
9	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Lingkungan Hidup) / Urusan Pilihan (Kehutanan)	33	69	80	182
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana)	7	16	28	51
11	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Perhubungan)	32	7	61	100
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian)	15	78	28	121
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Koperasi, usaha kecil dan menengah)	12	16	30	58
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Penanaman Modal)	3	24	34	61
15	DINAS KEBUDAYAAN	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Kebudayaan)	19	30	68	117
16	BIRO ORGANISASI	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Perpustakaan)	6	30	24	60
17	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar (Kearsipan)	12	44	45	101
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)	22	40	59	121
19	DINAS PARIWISATA	Urusan Pilihan (Pariwisata)	7	19	27	53
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Urusan Pilihan (Perdagangan dan Perindustrian)	11	18	38	67
21	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	16	6	75	97
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	8	27	28	63
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	45	6	271	322
24	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	4	46	19	69
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan)	17	64	49	130
26	INSPEKTORAT DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengawasan)	8	60	24	92
27	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	6	12	26	44
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pemerintahan Umum)	7	9	24	40
29	BIRO HUKUM	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)	4	9	16	29
30	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	3	12	17	32
31	BADAN PENGHUBUNG	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	5	1	10	16
32	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pemajuan Masyarakat Adat)	6	11	26	43

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
33	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	4	10	39	53
34	RUMAH SAKIT JIWA	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Kesehatan)	11	383	72	466
35	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Kesehatan)	10	179	21	210
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar (Kesehatan)	11	686	22	719
TOTAL			514	10.364	2.265	13.143

g. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
PENDAPATAN DAERAH	6.876.016.193.600,00	7.823.060.530.840,87	113,77	6.774.061.484.297,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.590.033.889.600,00	5.533.891.626.603,87	120,56	4.627.741.217.667,29
Pajak Daerah	3.685.688.320.803,00	4.519.993.351.813,00	122,64	4.052.904.860.269,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.569.988.993.300,00	1.844.633.318.017,00	117,49	1.742.228.994.500,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.230.235.114.400,00	1.694.519.308.500,00	137,74	1.416.376.206.600,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	527.726.075.700,00	639.365.501.400,00	121,15	564.730.129.155,00
Pajak Air Permukaan	4.103.273.200,00	4.478.656.251,00	109,15	4.094.857.640,00
Pajak Rokok	353.634.864.203,00	336.996.567.645,00	95,30	325.474.672.374,00
Retribusi Daerah	318.677.924.680,00	338.135.774.660,72	106,11	15.312.465.038,00
Retribusi Jasa Umum	294.099.071.750,00	296.427.502.246,72	100,79	200.045.000,00
Retribusi Jasa Usaha	20.578.852.930,00	34.766.325.514,00	168,94	9.709.163.463,00
Retribusi Perizinan Tertentu	4.000.000.000,00	6.941.946.900,00	173,55	5.403.256.575,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	197.369.947.623,00	197.369.947.623,03	100,00	158.120.019.322,32
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	0,00	0,00	0,00	202.455.499,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	196.751.692.444,00	196.751.692.444,03	100,00	157.471.097.464,32
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	618.255.179,00	618.255.179,00	100,00	446.466.359,00
Lain-lain PAD yang Sah	388.297.696.494,00	478.392.552.507,12	123,20	401.403.873.037,97
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.000.000,00	1.062.872.000,00	272,53	1.586.088.063,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	19.544.753.225,00
Hasil Kerja Sama Daerah	2.853.270.000,00	3.817.445.100,00	133,79	2.743.862.100,00
Jasa Giro	10.166.252.865,00	9.471.369.007,85	93,16	8.275.751.573,57
Pendapatan Bunga	3.517.679.227,00	9.467.679.227,40	269,15	4.563.650.828,34
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	9.000.000,00	18.000.000,00	200,00	18.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	165.010.677,00	2.017.168.478,46	1.222,45	1.208.006.636,81
Pendapatan Denda Pajak Daerah	59.491.050.000,00	71.213.685.794,00	119,70	53.661.511.340,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.740.725,00	21.612.188,00	137,30	3.935.100,00
Pendapatan dari Pengembalian	600.000.000,00	668.022.414,79	111,34	1.881.520.418,25

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
Pendapatan BLUD	61.089.693.000,00	62.753.652.296,62	102,72	307.901.426.955,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.046.000,00	0,00	15.366.798,00
Pungutan bagi Wisatawan Asing	250.000.000.000,00	317.880.000.000,00	127,15	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.590.033.889.600,00	5.533.891.626.603,87	120,56	4.627.741.217.667,29
PENDAPATAN TRANSFER	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
Dana Perimbangan	2.257.080.706.000,00	2.260.260.706.237,00	100,14	2.073.227.313.130,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.257.080.706.000,00	2.260.260.706.237,00	100,14	2.073.227.313.130,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	67.892.976.000,00
Insentif Fiskal	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	23.157.354.000,00	23.157.354.000,00	100,00	67.892.976.000,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14	2.141.120.289.130,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
Pendapatan Hibah	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	5.744.244.000,00	5.744.244.000,00	100,00	5.194.800.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	6.600.000,00	0,00	5.177.500,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11	5.199.977.500,00
JUMLAH PENDAPATAN	6.876.016.193.600,00	7.823.060.530.840,87	113,77	6.774.061.484.297,29
BELANJA DAERAH	7.795.681.730.804,00	7.301.449.328.881,71	93,66	6.607.098.684.698,10
BELANJA OPERASI	4.755.763.778.329,00	4.469.564.900.663,57	93,98	3.948.314.115.028,57
Belanja Pegawai	2.218.186.445.815,00	2.096.363.141.993,00	94,51	1.810.511.643.506,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	944.767.093.038,00	915.777.074.257,00	96,93	773.692.772.445,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	735.322.627.930,00	656.430.433.938,00	89,27	599.294.041.491,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	357.195.787.208,00	356.511.710.609,00	99,81	287.200.117.606,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	60.196.714.663,00	58.811.705.124,00	97,70	57.245.402.550,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	470.651.442,00	180.740.600,00	38,40	188.395.271,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	7.245.050.834,00	5.090.000.000,00	70,25	6.115.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	112.988.520.700,00	103.561.477.465,00	91,66	86.775.914.143,00
Belanja Barang dan Jasa	1.348.828.860.118,00	1.199.931.802.442,57	88,96	1.228.357.329.714,16
Belanja Barang	180.386.194.951,00	142.520.233.274,00	79,01	164.485.495.551,00
Belanja Jasa	558.921.122.988,00	498.772.519.746,30	89,24	593.123.116.378,60
Belanja Pemeliharaan	50.718.097.422,00	39.397.202.750,78	77,68	24.379.228.608,00
Belanja Perjalanan Dinas	158.497.081.000,00	98.263.132.122,00	62,00	84.189.449.621,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.527.957.352,00	21.196.258.258,00	69,43	27.227.732.547,18
Belanja Barang dan Jasa BOS	138.959.953.742,00	188.119.656.792,61	135,38	185.455.598.978,25
Belanja Barang dan Jasa BLUD	230.818.452.663,00	211.662.799.498,88	91,70	149.496.708.030,13
Belanja Subsidi	2.525.000.000,00	2.525.000.000,00	100,00	10.018.140.000,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	9.993.140.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
Belanja Subsidi kepada Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
Belanja Hibah	1.185.973.472.396,00	1.170.494.956.228,00	98,69	899.427.001.808,41
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	157.398.155.732,00	157.398.155.732,00	100,00	79.595.067.200,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	914.415.561.464,00	900.094.852.092,00	98,43	710.987.746.512,41
Belanja Hibah Dana BOS	91.580.750.000,00	90.422.943.204,00	98,74	92.376.333.096,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	22.579.005.200,00	22.579.005.200,00	100,00	16.467.855.000,00
Belanja Bantuan Sosial	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	4.755.763.778.329,00	4.469.564.900.663,57	93,98	3.948.314.115.028,57
BELANJA MODAL	798.894.222.750,00	667.541.219.001,14	83,56	920.073.340.444,99
Belanja Modal Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55	154.513.167.813,00
Belanja Modal Tanah	4.410.000.000,00	3.464.184.000,00	78,55	154.513.167.813,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.033.598.328,00	129.790.439.613,50	70,14	140.375.288.069,62
Belanja Modal Alat Besar	1.066.015.000,00	1.000.015.688,00	93,81	792.375.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	9.271.010.100,00	9.104.940.000,00	98,21	6.614.740.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.082.800,00	20.655.000,00	68,66	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	50.000.000,00	48.995.750,00	97,99	3.146.200.120,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.613.479.350,00	20.805.699.849,00	81,23	14.514.885.750,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.720.711.800,00	3.381.338.750,00	90,88	2.168.509.315,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.617.187.400,00	12.097.276.465,00	95,88	27.841.562.750,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	6.780.420.758,00	6.481.862.238,00	95,60	7.701.714.460,00
Belanja Modal Komputer	16.491.842.052,00	8.734.885.826,00	52,96	11.386.414.236,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	50.624.400,00	45.400.000,00	89,68	3.663.000,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	1.226.424.000,00	57.300.000,00	4,67	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.682.526.000,00	775.460.000,00	46,09	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	124.000.000,00	95.500.000,00	77,02	820.213.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	212.892.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.411.555.324,00	42.543.504.711,00	52,91	42.292.176.305,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	25.897.719.344,00	24.597.605.336,50	94,98	22.814.942.132,90
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	443.866.230.954,00	407.340.906.229,95	91,77	361.028.180.271,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	432.619.975.434,00	398.338.458.079,73	92,08	338.201.684.738,00
Belanja Modal Monumen	6.888.018.920,00	5.651.346.599,00	82,05	3.870.101.325,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	245.205.000,00	14.818.500,00	6,04	198.910.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	4.113.031.600,00	3.336.283.051,22	81,11	18.757.484.208,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.632.657.467,00	94.451.449.090,69	86,15	232.361.545.288,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76.512.996.317,00	67.093.118.028,00	87,69	206.903.899.747,00
Belanja Modal Bangunan Air	12.113.600.000,00	11.454.013.321,00	94,55	15.815.348.127,00
Belanja Modal Instalasi	1.872.256.150,00	1.627.853.890,69	86,95	1.547.831.790,00
Belanja Modal Jaringan	15.059.805.000,00	10.212.120.985,00	67,81	7.988.440.200,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	4.074.000.000,00	4.064.342.866,00	99,76	106.025.424,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.101.736.001,00	31.655.340.067,00	57,45	30.899.659.003,37
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	100.000.000,00	98.531.370,00	98,53	0,00
Belanja Modal Barang Bercorak	0,00	0,00	0,00	114.455.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	56.827.989,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	52.444.736.001,00	29.024.808.697,00	55,34	28.780.994.900,37
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	2.557.000.000,00	2.532.000.000,00	99,02	1.947.381.114,00
Belanja Modal Aset Lainnya	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69	895.500.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	850.000.000,00	838.900.000,00	98,69	895.500.000,00
JUMLAH BELANJA MODAL	798.894.222.750,00	667.541.219.001,14	83,56	920.073.340.444,99
BELANJA TIDAK TERDUGA	52.205.727.068,00	7.508.082.876,00	14,38	9.184.700.000,54
Belanja Tidak Terduga	52.205.727.068,00	7.508.082.876,00	14,38	9.184.700.000,54
Belanja Tidak Terduga	52.205.727.068,00	7.508.082.876,00	14,38	9.184.700.000,54
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	52.205.727.068,00	7.508.082.876,00	14,38	9.184.700.000,54
BELANJA TRANSFER	2.188.818.002.657,00	2.156.835.126.341,00	98,54	1.729.526.529.224,00
Belanja Bagi Hasil	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85	1.444.364.532.966,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.821.886.080.384,00	1.800.971.992.343,00	98,85	1.444.364.532.966,00
Belanja Bantuan Keuangan	366.931.922.273,00	355.863.133.998,00	96,98	285.161.996.258,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	279.909.122.273,00	269.381.700.098,00	96,24	220.146.503.858,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	87.022.800.000,00	86.481.433.900,00	99,38	65.015.492.400,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	2.188.818.002.657,00	2.156.835.126.341,00	98,54	1.729.526.529.224,00
JUMLAH BELANJA	7.795.681.730.804,00	7.301.449.328.881,71	93,66	6.607.098.684.698,10
SURPLUS/DEFISIT	(919.665.537.204,00)	521.611.201.959,16	(56,72)	166.962.799.599,19
PEMBIAYAAN DAERAH	919.665.537.204,00	92.185.725.293,56	10,02	4.517.390.982,37
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.175.582.550.556,00	342.650.523.381,56	29,15	408.963.390.625,37
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.480.190.582,00	171.480.190.581,56	100,00	330.133.723.425,37
Pelampauan Penerimaan PAD	171.480.190.582,00	(413.705.102.485,34)	(241,26)	453.037.799.939,28
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	(11.191.766.664,00)	0,00	(29.803.974.274,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(49.994.822.500,00)	0,00	(49.973.263.227,89)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	(670.757.862.495,00)	0,00	(756.498.307.593,95)
Penghematan Belanja	0,00	1.325.787.678.439,90	0,00	747.002.955.823,94
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(8.657.933.714,00)	0,00	5.000.000.000,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	0,00	0,00	(38.631.487.242,01)
Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	171.170.332.800,00	100,00	78.829.667.200,00
Pencairan Dana Cadangan	171.170.332.800,00	171.170.332.800,00	100,00	78.829.667.200,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	832.932.027.174,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	832.932.027.174,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.175.582.550.556,00	342.650.523.381,56	29,15	408.963.390.625,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	255.917.013.352,00	250.464.798.088,00	97,87	404.445.999.643,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	150.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	150.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	248.917.013.352,00	243.464.798.088,00	97,81	154.445.999.643,00
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	248.917.013.352,00	243.464.798.088,00	97,81	154.445.999.643,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	255.917.013.352,00	250.464.798.088,00	97,87	404.445.999.643,00
PEMBIAYAAN NETTO	919.665.537.204,00	92.185.725.293,56	10,02	4.517.390.982,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	613.796.927.252,72	0,00	171.480.190.581,56

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.160.051.612.456	1.104.524.571.711,00	6.164.852.268	4.836.570.651,80
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.904.878.832	315.579.048.914,27	425.833.997.937	334.867.678.483,93
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	74.981.000	55.043.220,00	0	0,00
		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	2.223.399.600	2.008.649.372	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	960.456.600	823.833.662,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.262.943.000	1.184.815.710,00	0	0,00
		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	838.475.260	666.128.456	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	660.856.360	495.378.540,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	101.569.200	96.197.844,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	76.049.700	74.552.072,00	0	0,00
2.	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.447.021.420	249.500.250.298,00	18.837.000	17.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	32.364.574.436	24.071.118.358,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	328.103.400	189.328.540,00	0	0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	149.730.000	144.376.230,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	313.506.000	292.957.240,00	0	0,00
		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	6.660.233.040	4.438.244.178	246.327.000	225.140.400

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.626.633.040	4.404.644.178,00	246.327.000	225.140.400,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	33.600.000	33.600.000,00	0	0,00
		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	7.927.535.226	4.423.993.153	1.178.535.444	1.052.603.640
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.927.535.226	4.423.993.153,50	1.178.535.444	1.052.603.640,00
		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.528.938.740	2.006.165.935	20.974.900	20.341.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.320.154.340	1.837.681.145,00	11.974.900	11.350.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	208.784.400	168.484.790,00	9.000.000	8.991.000,00
		RSUD Bali Mandara	202.223.184.112	189.794.456.656	38.982.070.000	35.930.209.011
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	202.223.184.112	189.794.456.656,51	9.250.000.000	8.824.592.584,03
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0,00	29.732.070.000	27.105.616.427,00
		Rumah Sakit Jiwa	37.124.032.118	29.872.791.844	4.421.053.500	4.221.383.401
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.124.032.118	29.872.791.844,44	2.996.053.500	2.859.043.401,69
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0,00	1.425.000.000	1.362.340.000,00
		Rumah Sakit Mata Bali Mandara	83.127.310.000	76.877.619.946	16.297.690.000	15.767.751.063
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.127.310.000	76.877.619.946,43	11.872.690.000	11.378.751.063,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0,00	4.425.000.000	4.389.000.000,00
		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	8.507.156.820	6.054.990.842	813.014.300	727.923.111
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.981.345.620	2.604.662.670,00	689.021.800	638.401.115,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.525.811.200	3.450.328.172,00	123.992.500	89.521.996,00
3.	PEKERJAAN UMUM	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	1.718.996.065	1.463.165.600	31.298.200	12.400.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	833.678.825	694.658.478,00	31.298.200	12.400.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	885.317.240	768.507.122,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		UPTD Pengelolaan Air Minum	31.486.145.021	30.497.367.490	9.307.600.000	8.839.562.224
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	31.486.145.021	30.497.367.490,00	9.307.600.000	8.839.562.224,00
		UPTD Pengelolaan Air Limbah	14.450.448.684	11.238.866.468	482.000.000	455.693.600
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	14.450.448.684	11.238.866.468,00	482.000.000	455.693.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.853.104.868	29.954.829.989,00	178.138.300	176.750.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	4.897.301.120	4.728.670.011,00	12.003.600.000	11.454.013.321,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.440.402.076	1.240.459.696,00	15.000.000.000	10.164.880.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	90.906.200	535.269.650,00	1.200.000.000	1.013.233.849,00
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	248.681.272	0,00	0	0,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	174.602.206.300	167.150.654.982,00	15.300.550.320	12.921.623.654,11
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	27.440.255.802	25.503.367.582,00	76.903.322.617	67.478.373.028,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.053.024.880	1.051.659.887,00	0	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.125.084.240	962.648.366,00	245.816.100	239.660.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.763.596.324	6.446.770.213	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	780.435.660	755.218.562,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.370.039.964	2.139.536.110,00	0	0,00
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.933.776.034	21.963.251.260,00	398.199.000	338.531.223,93
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.726.880.964	25.525.127.416,00	0	0,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.458.374.172	21.759.910.853	2.535.224.000	1.938.329.894
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.869.048.272	18.938.891.662,67	1.801.988.000	1.320.221.894,40
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	3.589.325.900	2.821.019.191,00	733.236.000	618.108.000,00
		UPTD Pengendalian Bencana Daerah	4.574.401.914	3.731.495.868	1.423.655.600	1.346.530.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.509.316.874	2.116.548.677,00	553.655.600	538.756.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.065.085.040	1.614.947.191,00	870.000.000	807.774.750,00
6.	SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG	20.609.338.894	18.980.595.774,00	3.529.488.300	916.934.264,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	59.010.600	56.695.350,00	0	0,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.177.100	198.200,00	0	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.321.256.900	3.177.117.318,00	0	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	18.569.500	16.720.000,00	0	0,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	264.416.700	247.914.400,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	267.258.400	257.412.950,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Sosial	3.812.552.160	2.965.866.480	3.069.450.000	2.930.326.167
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.256.253.660	1.667.245.130,00	3.069.450.000	2.930.326.167,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.556.298.500	1.298.621.350,00	0	0,00
7.	TENAGA KERJA	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1.013.131.165	882.957.114	18.837.000	15.600.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	676.781.165	557.325.864,00	18.837.000	15.600.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	336.350.000	325.631.250,00	0	0,00
		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	761.657.776	616.392.554	1.176.764.000	1.078.580.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.477.776	459.515.554,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	203.180.000	156.877.000,00	1.176.764.000	1.078.580.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.046.605.878	30.239.287.256,00	70.772.800	65.660.000,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	44.997.600	44.836.900,00	0	0,00
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	44.997.600	44.836.900,00	0	0,00
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	44.997.600	44.836.900,00	0	0,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	169.431.000	160.462.160,00	0	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	33.141.400	32.896.040,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	19.954.000,00	0	0,00
9.	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	107.965.479,00	0	0,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.825.700	23.046.400,00	0	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN	119.980.100	114.282.300,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PEREMPUAN				
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	9.203.500	9.116.350,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.996.400	9.820.000,00	0	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	752.595.000	740.437.020,00	0	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	9.630.000	11.614.000,00	0	0,00
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	996.457.560	736.734.872	18.000.000	17.750.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	570.607.660	450.341.872,00	18.000.000	17.750.000,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	352.330.000	221.984.000,00	0	0,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	73.519.900	64.409.000,00	0	0,00
10.	PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	125.454.414,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	498.784.500	490.428.850,00	0	0,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	6.573.647.880	5.499.899.080,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	97.783.980	150.916.682,00	0	0,00
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.142.557.250	849.040.477	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	607.072.190	440.248.007,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	535.485.060	408.792.470,00	0	0,00
11.	PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	10.500.000.000	148.844.141,00	0	0,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	26.777.500	9.577.915,00	0	0,00
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	268.540.500	220.073.530,00	0	0,00
12.	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	89.208.424,00	0	0,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	320.771.180	312.848.622,00	0	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	321.950.300	140.702.425,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	99.556.000	90.820.700,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN	14.114.700	10.630.000,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	19.267.800	11.425.739,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	275.346.020	255.272.557,00	0	0,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	34.710.800	32.253.139,00	0	0,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.404.300	4.950.000,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0	693.282.916,00	0	0,00
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	306.301.673	197.866.694	79.295.850	62.363.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	246.339.366	149.006.494,00	79.295.850	62.363.700,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	59.962.307	48.860.200,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.534.668.488	7.239.098.789,00	80.300.000	74.618.500,00
13.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	483.824.320	322.014.522,00	0	0,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	427.237.620	320.575.368,00	0	0,00
14.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.447.993.464	12.176.990.085,00	804.274.600	693.237.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	320.543.320	295.341.420,00	0	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.271.343.020	897.459.577,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.883.351.020	5.228.832.541,00	0	0,00
15.	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	332.121.540	316.199.902,00	0	0,00
16.	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.057.017.577	22.049.093.973,00	559.587.000	442.402.930,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.007.031.020	1.298.692.070,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	271.047.840	269.600.800,00	600.000.000	590.000.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	272.437.140	254.334.073,00	200.000.000	199.600.000,00
		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	2.250.305.922	1.720.858.814	200.088.300	134.550.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	302.874.792	144.568.724,00	76.088.300	39.050.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.947.431.130	1.576.290.090,00	124.000.000	95.500.000,00
		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	11.515.081.342	5.461.716.789	12.760.000	8.368.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	496.109.475	325.795.577,00	12.760.000	8.368.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	11.018.971.867	5.135.921.212,00	0	0,00
		UPTD Perlengkapan Jalan	1.832.854.226	1.591.511.491	54.122.500	39.740.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	169.862.040	78.207.662,00	54.122.500	39.740.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.662.992.186	1.513.303.829,00	0	0,00
		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	605.730.490	428.212.068	82.425.800	75.425.200
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	466.163.490	320.230.910,00	82.425.800	75.425.200,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	139.567.000	107.981.158,00	0	0,00
17.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.452.310.914	18.415.900.566,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.708.432.760	9.956.261.018,00	117.048.400	85.545.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	14.292.625.200	14.562.899.042,00	118.505.987.170	114.198.251.775,00
		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	6.936.378.140	5.523.681.856	0	0
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.936.378.140	5.523.681.856,00	0	0,00
		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	2.109.403.424	1.447.446.194	708.271.500	613.680.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.109.403.424	1.447.446.194,00	708.271.500	613.680.000,00
18.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.997.993.511	13.384.508.677,06	760.700.350	654.103.541,69
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	238.410.700	148.079.420,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	150.908.620	127.986.135,00	0	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	35.623.756,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	198.408.880	175.150.930,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
		PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	989.684.630	925.679.759,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	482.932.360	394.362.810,00	0	0,00
		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	8.432.190.260	7.945.763.833	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	423.149.980	292.662.997,00	0	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	8.009.040.280	7.653.100.836,00	0	0,00
19.	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.861.949.523	13.834.786.847,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	480.968.560	401.973.560,00	0	0,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	260.993.800	160.484.999,00	0	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	614.087.820	602.667.820,00	0	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.143.149.560	912.624.560,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	106.084.280	106.084.280,00	0	0,00
20.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.123.381.600	814.882.962,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	64.913.282.800	60.621.238.278,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000,00	0	0,00
21.	STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	416.841.540	375.021.478,00	0	0,00
22.	PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	421.931.780	382.431.736,00	44.500.000	31.460.000,00
23.	KEBUDAYAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.876.478.038	24.869.317.852,00	63.552.200	4.980.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	61.625.213.000	58.434.393.091,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.367.912.760	1.340.268.060,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	47.497.400	45.630.000,00	0	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	521.101.560	437.677.655,00	0	0,00
		UPTD Taman Budaya	5.758.542.620	4.771.708.022	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.758.542.620	2.863.720.962,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.000.000.000	1.907.987.060,00	0	0,00
		UPTD Museum Bali	4.091.164.904	3.460.472.944	2.233.652.900	153.589.998
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.091.164.904	1.682.815.835,00	2.233.652.900	153.589.998,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000	1.727.410.455,00	0	0,00
		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	5.507.853.308	4.620.031.232	50.000.000	27.480.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.507.853.308	2.892.620.777,00	50.000.000	27.480.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.000.000.000	1.727.410.455,00	0	0,00
24.	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.900.063.217	10.882.408.086,00	0	0,00
		PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	615.827.849.376	612.678.771.278,00	0	0,00
25.	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	41.338.346,00	0	0,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	11.810.956,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	425.774.880	346.345.714,00	100.000.000	98.531.370,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	101.698.480	88.168.024,00	0	0,00
26.	KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	661.907.040	610.378.540,00	0	0,00
27.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.472.976.361	21.873.209.069,00	807.932.900	656.389.010,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	518.634.000	455.706.250,00	0	32.700.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	553.910.920	543.396.170,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	54.000.000	70.216.434,00	0	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	713.278.940	544.816.716,00	0	0,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	525.050.280	456.892.252,00	0	0,00
		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	2.710.222.096	2.389.634.341	130.184.800	111.210.450
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	502.252.086	381.228.544,00	30.795.800	18.870.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.207.970.010	2.008.405.797,00	99.389.000	92.340.450,00
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1.236.230.381	959.112.136	49.316.100	30.195.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	790.870.560	603.641.468,00	49.316.100	30.195.000,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	445.359.821	355.470.668,00	0	0,00
		UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.302.890.400	853.776.201	722.615.400	620.420.450
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.186.700.400	760.790.601,00	107.115.400	101.800.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	116.190.000	92.985.600,00	615.500.000	518.620.450,00
		UPTD Pelabuhan Perikanan	323.434.940	174.713.604	88.131.400	76.520.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	267.535.740	142.830.464,00	88.131.400	76.520.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	55.899.200	31.883.140,00	0	0,00
28.	PARIWISATA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.893.355.384	12.914.069.711,00	565.852.200	435.715.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	644.599.700	599.730.610,00	0	0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	526.171.100	512.223.779,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	195.296.320	193.982.445,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	408.881.160	386.131.683,00	0	0,00
29.	PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.683.320.360	44.209.399.406,00	28.437.300	25.850.050,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.000.959.780	9.393.220.525,00	0	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.297.328.600	1.290.605.910,00	0	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.470.168.560	1.501.704.463,00	0	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	129.246.420	129.006.420,00	0	0,00
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	543.682.510	445.233.932	0	0
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	543.682.510	445.233.932,00	0	0,00
		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.735.633.200	2.259.405.616	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.295.276.860	1.062.248.992,00	0	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	1.440.356.340	1.197.156.624,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		BENCANA PERTANIAN				
		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.287.941.561	2.616.524.104	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	922.193.356	750.832.182,00	0	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.365.748.205	1.865.691.922,00	0	0,00
		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.061.810.800	857.193.198	10.000.000	9.795.750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	318.527.920	235.490.119,00	0	0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	743.282.880	621.703.079,00	10.000.000	9.795.750,00
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.737.716.300	2.319.551.959	2.527.233.000	1.324.474.165
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	578.923.140	471.798.591,00	2.527.233.000	1.324.474.165,00
30.	KEHUTANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.827.380.645	37.372.893.061,30	1.383.383.300	1.234.824.888,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	184.334.720	160.841.780,00	0	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	52.362.000	36.307.900,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	70.961.240	66.479.340,00	0	0,00
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	960.267.700	816.068.569	380.000.000	377.461.548
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	960.267.700	816.068.569,00	380.000.000	377.461.548,00
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	728.508.960	398.525.040	605.418.500	202.880.312
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	728.508.960	398.525.040,00	605.418.500	202.880.312,00
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	467.630.260	313.029.606	176.827.910	173.528.390
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	467.630.260	313.029.606,00	176.827.910	173.528.390,00
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	471.740.470	417.067.971	492.957.350	488.052.368
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	471.740.470	417.067.971,90	492.957.350	488.052.368,48
		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	768.795.040	321.806.386	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	768.795.040	321.806.386,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		DAERAH PROVINSI				
31.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	8.000.000	7.834.330,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	8.000.000	7.759.000,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	174.499.500	150.436.863,00	0	0,00
32.	PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.612.552.226	16.155.323.688,00	160.853.400	135.810.000,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	322.387.120	317.422.120,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	111.426.100	75.207.707,00	0	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	49.213.800	46.757.000,00	0	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	349.991.600	315.796.717,00	0	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	645.585.220	621.582.764,00	0	0,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	272.598.080	272.566.980,00	0	0,00
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	593.796.720	502.652.773	7.000.000	5.439.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	317.949.100	260.036.889,00	7.000.000	5.439.000,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275.847.620	242.615.884,00	0	0,00
33.	PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0	11.810.956,00	0	0,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.788.094.600	1.804.232.373,00	0	0,00
		UPTD Rumah Kreatif	1.011.437.780	848.649.424	10.673.100	9.900.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	184.223.880	150.008.324,00	10.673.100	9.900.000,00
		PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	827.213.900	698.641.100,00	0	0,00
34.	TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	22.400.910,00	0	0,00
35.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Biro Umum dan Protokol	83.814.332.946	67.896.782.325	4.293.883.436	3.512.232.462
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	83.814.332.946	67.896.782.325,03	4.293.883.436	3.512.232.462,77
35.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM)	Biro Hukum	6.770.928.810	5.419.640.274	836.116.300	579.732.483
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.538.801.940	1.002.571.629,00	836.116.300	579.732.483,00
		PROGRAM FASILITASI DAN	5.232.126.870	4.417.068.645,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		KOORDINASI HUKUM				
36.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH)	Sekretariat Daerah	61.412.348.647	64.872.698.373	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	61.412.348.647	63.309.349.351,00	0	0,00
37.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (OTONOMI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	51.439.304.140	46.992.319.031	382.638.000	300.414.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.786.008.130	1.027.453.637,00	382.638.000	300.414.600,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.684.516.980	1.290.278.249,00	0	0,00
		PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	47.968.779.030	44.674.587.145,00	0	0,00
38.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENATAAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN)	Biro Organisasi	2.183.141.650	1.679.197.250	828.581.500	515.217.607
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.298.963.450	906.240.641,00	749.944.000	515.217.607,00
		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	884.178.200	772.956.609,00	78.637.500	0,00
39.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN DAN PEREKONOMIAN)	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	4.214.688.360	2.965.662.790	7.962.857.200	7.581.247.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.504.491.360	1.709.921.196,00	803.187.200	560.447.800,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.212.485.000	890.116.580,00	0	0,00
		PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	415.587.000	303.455.790,00	7.159.670.000	7.020.800.000,00
		PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	82.125.000	62.169.224,00	0	0,00
40.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DPRD)	Sekretariat DPRD	205.197.934.473	155.635.522.948	2.105.022.200	1.589.979.766
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	92.901.326.888	85.119.162.493,00	2.105.022.200	1.589.979.766,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	112.296.607.585	70.516.360.455,00	0	0,00
41.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.589.092.676	14.941.046.558,00	2.633.716.498	1.696.251.911,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.186.563.940	2.390.648.885,00	0	0,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.269.710.975	1.784.640.672,00	0	0,00
41.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.020.266.801	20.457.536.721,00	1.144.069.900	770.281.898,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.150.384.553	4.872.459.945,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.855.599.760	999.769.586,00	0	0,00
		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.095.901.080	1.671.575.674	554.442.000	544.286.964
		PROGRAM PENUNJANG	679.904.380	378.207.306,00	554.442.000	544.286.964,90

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.415.996.700	1.293.368.368,00	0	0,00
42.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGELOLAAN PENDAPATAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.914.882.115	132.772.709.999,38	2.869.416.600	2.330.636.925,90
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	839.008.600	3.800.035.111,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.518.630.723	4.486.540.081	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.722.388.603	1.447.657.767,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.796.242.120	3.038.882.314,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.537.823.092	2.179.602.103	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.661.172.432	1.425.770.525,54	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	876.650.660	753.831.578,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.451.809.915	2.003.657.205	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.413.245.695	1.115.137.479,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.038.564.220	888.519.726,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	5.344.249.994	4.043.798.737	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.238.096.834	1.886.025.893,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.106.153.160	2.157.772.844,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.961.155.766	4.859.597.686	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.513.331.726	1.977.627.754,20	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.447.824.040	2.881.969.932,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.465.541.117	2.723.283.221	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.618.351.237	1.313.143.417,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.847.189.880	1.410.139.804,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.358.173.100	1.874.097.893	0	0
	PROGRAM PENUNJANG	1.187.421.040	886.482.695,00	0	0,00	

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.170.752.060	987.615.198,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.468.970.011	2.043.406.464	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.498.123.431	1.236.831.400,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	970.846.580	806.575.064,00	0	0,00
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	2.164.632.912	1.799.075.718	0	0
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.141.173.692	932.384.492,00	0	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.023.459.220	866.691.226,00	0	0,00
43.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.340.808.705	42.475.494.531,00	52.850.000	42.397.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.591.087.680	3.357.769.888,00	0	0,00
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.602.462.380	1.381.657.298	75.537.000	70.153.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	405.864.180	311.680.834,00	25.537.000	20.853.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.196.598.200	1.069.976.464,00	50.000.000	49.300.000,00
		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	25.552.305.000	19.324.942.355	1.340.000.000	924.094.341
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.552.305.000	19.324.942.355,00	1.340.000.000	924.094.341,00
44.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.195.592.955	1.095.323.636,00	0	0,00
45.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.300.340.613	11.268.917.102,00	513.915.000	501.844.520,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.528.165.300	3.239.374.869,00	0	0,00
46.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (BADAN PENGHUBUNG)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.575.411.731	5.129.150.100,00	725.309.800	665.431.301,00
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.118.009.760	2.735.952.854,00	0	0,00
47.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGAWASAN)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.984.822.250	24.715.057.061,00	1.873.992.300	1.769.596.523,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.331.259.160	4.180.395.832,00	0	0,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.832.575.880	3.415.482.139,00	0	0,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Kelompok Belanja			
			Operasi		Modal	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
48.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (POLPUM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.695.140.407	9.604.803.188,00	358.050.200	297.755.923,78
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.320.805.120	3.690.242.210,00	0	0,00
		Pembentukan Paskibraka	3.578.883.500	3.122.694.757,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	180.789.855.052	180.091.736.060,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	218.457.000	97.717.686,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	553.056.560	539.636.618,00	0	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.351.818.520	2.061.106.005,00	0	0,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis pemerintah Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- 1) Alam Bali;
- 2) Krama (manusia) Bali; dan
- 3) Kebudayaan Bali.

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air kelebutan, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk tukad, telabah, jelinjangan) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa Krama Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/manyama braya; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas, baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum

berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola. Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara sakala dan niskala yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran Sad Kerthi, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (jana kerthi). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan taksu Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal, tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.
- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurangmendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

1. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.
2. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan.
5. Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi Bali.

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat

merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pemerintah pusat pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih hasil Pemilu pada 2024.

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026		
No	Tujuan	Sasaran
1.	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
3.	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
4.	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026		
No	Tujuan	Sasaran
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Selaras dengan tema pembangunan RKP tahun 2024, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/ pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sakala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sakala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya

keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/Kota se-Bali secara parsial dengan tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani, dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam nindihin Gumi Bali, guna menjaga dan memelihara Genuine Bali; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi

daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkan visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilu 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Program Prioritas Provinsi Bali tahun 2024-2026 difokuskan pada 69 program berikut:

1. Program Penyuluhan Pertanian;
2. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program perencanaan dan pembangunan industry;
5. Program Pemasaran pariwisata;
6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
7. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;

10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
11. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Program Penempatan Tenaga Kerja;
13. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
15. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
16. Program Rehabilitasi Sosial;
17. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
18. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
19. Program Perekonomian dan Pembangunan;
20. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
21. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
22. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
23. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
24. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
25. Program Pengelolaan Pendidikan;
26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
27. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;
28. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
29. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
30. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
31. Program Hubungan Industrial;
32. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
33. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali;
34. Program Kesejahteraan Rakyat;
35. Program Pengembangan Kebudayaan;
36. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
37. Program Pembinaan Sejarah;
38. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
39. Program Pengelolaan Permuseuman;
40. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
41. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
42. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
43. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
44. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;

45. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
46. Program Penyelenggaraan Jalan;
47. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
48. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
49. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
50. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
51. Program Pengelolaan Pelayaran;
52. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
53. Program pengelolaan Aplikasi Informatika;
54. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
55. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
56. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
57. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
58. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
59. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD;
60. Program Penanggulangan Bencana;
61. Program Penanganan Bencana;
62. Program Kepegawaian Daerah;
63. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
64. Program Penataan Organisasi;
65. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
66. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum;
67. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
68. Program Pelayanan Penanaman Modal;
69. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2024. Program-program diatas akan di break down ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
3.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi
		DINAS KESEHATAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1	NON URUSAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		RSUD BALI MANDARA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
		RUMAH SAKIT JIWA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit
		RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1	NON URUSAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1	NON URUSAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1	NON URUSAN
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
		UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
		UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		Pantai
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
1.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
	1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
2.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
	1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
	1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
	1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
	1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi
	1.05.03.1.04.0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
	1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
		UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terantar di dalam Panti
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
		UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
1.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
1.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
1.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
	2.13.03.1.01	Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		DINAS PERHUBUNGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
		UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
		UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		UPTD TURYPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	NON URUSAN
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		DINAS KEBUDAYAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya
		UPTD TAMAN BUDAYA
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
		UPTD MUSEUM BALI
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat
	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	3	NON URUSAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.03.0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	3.25.02.1.03.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
	3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
	3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
	3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
	3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
	3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
	3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
	3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
	3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing
		UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3	NON URUSAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
		DINAS PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3	NON URUSAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
1.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati
4.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
5.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
	3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
7.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
		UPTD RUMAH KREATIF
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian
2.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
		BIRO HUKUM
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		SEKRETARIAT DAERAH
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
		BIRO ORGANISASI
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4	NON URUSAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4	NON URUSAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4	NON URUSAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	NON URUSAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4	NON URUSAN
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
2.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
3.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		SEKRETARIAT DPRD
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
	4.02	SEKRETARIAT DPRD
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
	4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.01	PERENCANAAN
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah
		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02	KEUANGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02	KEUANGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
	5.02	KEUANGAN
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5	NON URUSAN
	5.02	-
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5	NON URUSAN
	5.02	-

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan
	5.02.01.1.14.0002	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
5		NON URUSAN
5.02		-
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5		NON URUSAN
5.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5		NON URUSAN
5.02		-
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5		NON URUSAN
5.02		-
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02		KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5	NON URUSAN
	5.02	-
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	-
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
	5.02	KEUANGAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	NON URUSAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5	NON URUSAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	NON URUSAN
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.02	KEUANGAN
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.03	KEPEGAWAIAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.03.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.03	KEPEGAWAIAN
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.03	KEPEGAWAIAN
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD
	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
		BADAN PENGHUBUNG
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
	5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
		INSPEKTORAT
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integritas
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	8.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERNECANAAN TAHUNAN (PERGUB NO. 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERGUB NO. 26 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2024)		
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
		Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara	100%	

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
		pemenuhan standar.		
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang membutuhkan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	KESEHATAN			
2.1	peayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	peayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			
3.1	penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	peayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
				Daerah provinsi.
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Provinsi Bali Tahun 2024 menggunakan indikator kinerja makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali sebagai berikut:

Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2023)	Capaian Kinerja Tahun N (2024)	Perubahan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	78,01	78,63	0,79 persen	IPM perhitungan baru (based on LF SP2020)
Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,25	4,00	0,25 persen poin	Kondisi Maret (Susenas)
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,69	1,79	0,90 persen poin	Kondisi Agustus (Sakernas)
Pertumbuhan PDRB ADHK (2010=100)	Persen	5,71	5,48	-0,23 persen poin	
PDRB Per kapita (ADHB)	(ribu Rupiah)	62.293,23	67.318,75	8,07 persen	Tidak tersedia data pendapatan per kapita, yang tersedia adalah PDRB per kapita.
Gini Rasio	-	0,362	0,361	0,001 poin	Kondisi Maret (Susenas)

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali, Peningkatan IPM Bali tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan terbesar. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,10 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2023. Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (LF SP2020). Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas tahun 2024 sebesar 13,62 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 9,54 tahun, meningkat 0,09 tahun dibandingkan

dengan tahun 2023. Sumber data HLS dan RLS menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) periode Maret. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 538 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Sumber data pengeluaran riil per kapita menggunakan hasil Susenas Maret. Pada tahun 2024, capaian status pembangunan manusia di Kabupaten Gianyar berubah dari “tinggi” menjadi “sangat tinggi”. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Kemiskinan, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,00 persen, turun 0,25 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,53 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebanyak 184,43 ribu orang, turun 9,35 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 20,93 ribu orang terhadap September 2022. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,55 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 3,77 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,20 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 5,50 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 turun sebanyak 4,51 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2023 (dari 123,82 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 119,31 ribu orang pada Maret 2024). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 4,84 ribu orang (dari 69,96 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 65,12 ribu orang pada Maret 2024). Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp568.510,- per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.618,- per kapita per bulan (68,88 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp176.892,- per kapita per bulan (31,12 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki 4,68 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.660.627,- per rumah tangga miskin per bulan.. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Angka Pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis laporan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 dengan angka mencapai 1,79 persen. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan TPT pada Agustus 2023 yang tercatat 2,69 persen. Penurunan TPT ini merupakan indikasi positif bagi perekonomian Bali, terutama setelah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2024, dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar 2 orang di antaranya menganggur. Dilihat dari daerah tempat tinggal, TPT di perkotaan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 1,90 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang berada di angka 1,57 persen. Sementara jika dibandingkan secara nasional, Provinsi Bali berada jauh di

bawah TPT Nasional dan menempati urutan kedua terendah. Selin itu, di antara kabupaten/kota di Bali, Kabupaten Bangli mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah sebesar 0,74 persen. Sementara Kota Denpasar menjadi yang tertinggi dengan TPT sebesar 2,11 persen. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,71 persen. Meskipun melambat dibanding 2023, namun pertumbuhannya masih di atas 5 persen. Perlambatan tersebut berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Bali yang terjadi pada sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh melambat sebesar 2,13 persen, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 2,62 persen. Perlambatan pertumbuhan tersebut sebenarnya sudah di luar perkiraan, mengingat pada tahun 2024 jumlah wisatawan mancanegara meningkat. Sektor usaha perdagangan besar dan eceran serta sektor reparasi kendaraan bermotor melambat dari 0,53 persen menjadi 0,39 persen. Sektor usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah sektor jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan kinerja ekonomi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang tumbuh minus 1,08 persen. Kinerja perekonomian Bali sepanjang 2024 masih dalam kisaran target meski laju pertumbuhan melambat. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 berada pada kisaran 5%-5,8%. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

Gini Ratio. Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,361. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 dan September 2022 yang tercatat sebesar 0,362. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,364. Capaian ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,367 dan turun 0,007 poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 0,371. Gini Ratio di perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,287. Capaian ini turun 0,003 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,290 dan naik sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 0,282. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk di Provinsi Bali pada Maret 2024 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,20 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk di Provinsi Bali pada Maret 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, di perkotaan tercatat sebesar 17,98 persen dan di perdesaan tercatat sebesar 21,34 persen. Keduanya menunjukkan bahwa ketimpangan di kedua wilayah termasuk ketimpangan rendah. (*Sumber BPS Provinsi Bali*)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah anak usia 16-18 tahun yang telah menyelesaikan dan/atau anak yang sedang belajar pada pendidikan menengah (SMA, SMK, MA atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat baik negeri maupun swasta), sedangkan untuk pendidikan pesantren formal terdiri = 162178. Jumlah keseluruhan penduduk (anak) berusia 16-18 tahun di daerah Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan data kependudukan = 205049	79,09231	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
2	Pendidikan	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus = 2075. Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas pada provinsi yang bersangkutan = 4732	43,85038	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
3	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh provinsi = 5362. Jumlah Penduduk provinsi = 4361106	1,229505	Dinas Kesehatan	
4	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan provinsi yang terakreditasi = 76. Jumlah RS provinsi = 82	92,68293	Dinas Kesehatan	
5	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun = 1640599. Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana = 1640599	100	Dinas Kesehatan	
6	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar = 110730. Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB = 130920	84,57837	Dinas Kesehatan	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 393.18. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) = 4637.8	8,477727	Dinas PUPR Perkim	
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (ha) = 130.3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (ha) = 215.82	60,37439	Dinas PUPR Perkim	
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 140427.3. luas daerah irigasi kewenangan provinsi = 172972	81,18499	Dinas PUPR Perkim	
10	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. = 397. Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota. = 458	86,68122	Dinas PUPR Perkim	
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	Volume air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama = 31239.99. Daya tampung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional = 51000	61,25488	Dinas PUPR Perkim	
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan Provinsi dalam kondisi baik dan sedang = 653.62. Panjang jalan keseluruhan di wilayah provinsi = 805.35	81,15974	Dinas PUPR Perkim	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki kompetensi jasa konstruksi yang masih berlaku sebagai tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan dan diakui oleh Lem = 9803. Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi berdasarkan seluruh jumlah proyek konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBD dan Non APBD sesuai kewenangan Provinsi (kecuali APBN) = 14867	65,93798	Dinas PUPR Perkim	
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Realisasi jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani berupa rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi, bantuan akses rumah sewa layak huni, berdasarkan surat keputusan Gubernur yang masih berlaku = 167. Jumlah keseluruhan rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan surat keputusan Gubernur yang masih berlaku = 167	100	Dinas PUPR Perkim	
15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0	Dinas PUPR Perkim	
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	Jumlah akumulasi luas kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (10-15 ha) yang telah ditangani meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali = 30.68. Jumlah keseluruhan luas kawasan permukiman kumuh 10-15 ha yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi = 206.93	14,82627	Dinas PUPR Perkim	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Jumlah keseluruhan perumahan yang sedang dan sudah dibangun oleh pengembang/developer yang terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dibuktikan dengan berita acara serah terima PSU = 731. Jumlah keseluruhan perumahan baik yang sudah dan belum terfasilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) = 909	80,41804	Dinas PUPR Perkim	
18	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan = 4. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 4	100	Satpol PP	
19	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Defenisi: Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 24. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 29	82,75862	Satpol PP	
20	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun = 1. Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun = 3	33,33333	BPBD	
21	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan pra bencana = 9. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi = 9	100	BPBD	
22	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penanganan tanggap darurat bencana = 9. Jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengalami bencana = 9	100	BPBD	
23	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 130. Populasi penyandang disabilitas telantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 212	61,32075	Dinas Sosial P3A	Tidak semua jenis layanan mendapatkan alokasi anggaran APBD
24	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Anak Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 3032. Jumlah Anak Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 3032	100	Dinas Sosial P3A	Tidak semua jenis layanan mendapatkan alokasi anggaran APBD

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
25	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 155. Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 155	100	Dinas Sosial P3A	Perbaikan hasil revidu, pada file bukti dukung.
26	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 416. Populasi Gelandangan dan Pengemis Terlantar di daerah provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti = 416	100	Dinas Sosial P3A	Perbaikan hasil revidu, pada file bukti dukung.
27	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya = 789. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah provinsi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah provinsi = 789	100	Dinas Sosial P3A	-
28	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Jumlah kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja = 9. Jumlah kabupaten/kota = 9	100	Disnaker ESDM	
29	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 227913. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 2665421	8,550732	Disnaker ESDM	Data sudah dikoreksi kembali, dan sudah diakumulasikan dengan tahun sebelumnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
30	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 168186034.23. Jumlah tenaga kerja = 2665421	6309,924	Disnaker ESDM	Dokumen Pendukung sudah dikoreksi kembali
31	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 413. Jumlah Perusahaan = 413	100	Disnaker ESDM	
32	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 11414. Jumlah pencaker yang terdaftar = 13567	84,13061	Disnaker ESDM	Data sudah dikoreksi kembali

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
33	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	\sum Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang ketenagakerjaan pada tahun n = 48831. \sum Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun n = 48831	100	Disnaker ESDM	Data sudah diperbaiki, perusahaan yang terdaftar di WLKP online keseluruhan telah menerapkan peraturan perundang ketenagakerjaan
34	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 117426050424. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 5554658001079	2,11401	Dinas Sosial P3A	Perbaiki hasil revidu, pada file bukti dukung
35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat provinsi yang didampingi = 257. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 1612878	1,593425	Dinas Sosial P3A	-
36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 260. Jumlah penduduk perempuan = 3026222	8,591571	Dinas Sosial P3A	-
37	Pangan	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi = 166252. Jumlah target cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan = 166252	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	untuk rumus perhitungan tidak sesuai dengan perbadan 15 tahun 2023, rumus tersebut masih mengacu kepada Permentan RI Nomor 11/Permentan/K N.130/2018
38	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1	0	Dinas PUPR Perkim	
39	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu = 0. Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum = 1	0	Dinas PUPR Perkim	
40	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) lintas kab/ kota = 0.	0	Dinas PUPR Perkim	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
			Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 1			
41	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi		75,02	Dinas KLH	-
42	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi = 7. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 15	46,66667	Dinas KLH	-
43	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun = 2. 2 kali = 2	100	Dinas PMD Dukcapil	
44	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Perangkat Daerah Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 6. Jumlah Perangkat Daerah Provinsi = 23	26,08696	Dinas PMD Dukcapil	
45	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 0	0	Dinas PMD Dukcapil	
46	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 2. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 2	100	Dinas PMD Dukcapil	
47	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,03	Dinas PMD Dukcapil	Data Dukung tidak sesuai format karena data diperoleh dari perhitungan IKU oleh Kedeputusan Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik (tidak dalam bentuk data mentah melainkan hasil Pemuktahiran PK-24)

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
48	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 448960. Jumlah Pasangan Usia Subur = 649292	69,14609	Dinas PMD Dukcapil	
49	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 51237. Jumlah Pasangan Usia Subur = 649292	7,891211	Dinas PMD Dukcapil	
50	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi		0,797	Dinas Perhubungan	
51	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi		0,52	Dinas Perhubungan	
52	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 28. Jumlah PD = 29	96,55172	Dinas Kominfos	Satu perangkat daerah (Badan Penghubung Provinsi Bali) berlokasi di Jakarta
53	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 58. Jumlah Layanan Publik = 58	100	Dinas Kominfos	
54	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi = 2848038. Jumlah penduduk = 2848038	100	Dinas Kominfos	
55	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset = 902. Jumlah seluruh koperasi = 3800	23,73684	Dinas Koperasi UKM	Banyak Koperasi belum melaporkan hasil RAT mereka
56	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha = 115. Jumlah usaha kecil keseluruhan = 1062	10,82863	Dinas Koperasi UKM	Sulitnya membina dan memfasilitasi Usaha Kecil
57	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di provinsi = 17602000000000. Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi = 18916000000000	93,0535	Dinas PMPTSP	Presentase peningkatan investasi tahun 2024 di provinsi bali
58	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi = 294468. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 1021226	28,83475	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
59	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di provinsi = 836594. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di provinsi = 1021226	81,92055	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
60	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		239	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
61	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 29. jumlah PD = 29	100	Dinas Kominfos	
62	Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 29. jumlah PD = 29	100	Dinas Kominfos	
63	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 596. Jumlah area penilaian = 645	92,4031	Dinas Kominfos	
64	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 233. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan = 233	100	Dinas Kebudayaan	2021 sampai dengan tahun 2024
65	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		71,97	Biro Organisasi	
66	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		66,05	Biro Organisasi	
67	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		97,19	Biro Umum dan Protokol	-
68	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		83,33	Biro Umum dan Protokol	-
69	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) provinsi = 147412.5. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 136341.2	108,1203	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
70	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		90	Dinas Kelautan dan Perikanan	terdapat 3 komponen kepatuhan pelaku usaha yang tidak dapat diperiksa yaitu pelaku usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan karena terbatasnya SDM sehingga masih fokus pada Pengawasan Pelaku Usaha Pemanfaatan Ruang Laut
71	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1) = 991692. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 4790568	20,70093	Dinas Pariwisata	
72	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) = 503640. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 8673009	5,806981	Dinas Pariwisata	
73	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 19481160. Jumlah kamar yang tersedia = 36632495	53,18	Dinas Pariwisata	
74	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 46916915650000. Total PDRB Berlaku = 2.2009661368E+14	21,31651	Dinas Pariwisata	
75	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 877203. luas panen = 145900	601,2358	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	produktivitas = 877.203 / 145.900 = 6,01 ton
76	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	jumlah Jumlah kejadian penyakit/kasustahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 222. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 413	53,75303	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-
77	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yg diberikan akses legal = 135. jumlah total usulan KTH yang terintegrasi = 147	91,83673	Dinas KLH	-
78	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Jumlah hutan yang rusak = 186.81. Jumlah hutan keseluruhan = 131171.47	0,142417	Dinas KLH	-

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
79	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Luas lahan kritis di provinsi yang direhabilitasi (ha) = 2809. Luas Lahan Kritis di provinsi (ha) = 40634	6,91293	Dinas KLH	-
80	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda = 37. jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi = 37	100	Disnaker ESDM	
81	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Jumlah desa yang teraliri listrik = 716. Jumlah desa = 716	100	Disnaker ESDM	
82	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Nilai ekspor non migas tahun berjalan – nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 53473945. Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya = 581022971	9,203413	Dinas Perindag	
83	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan = 7. Jumlah pengaduan konsumen yang diterimadalam tahun berjalan = 7	100	Dinas Perindag	
84	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Jumlah sampel yang sesuai ketentuan = 84. Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun = 84	100	Dinas Perindag	Pengembangan Layanan pengujian belum dapat dilaksanakan akibat dari keterbatasan peralatan dan kompetensi SDM yang belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan permintaan ruang lingkup dan parameter pengujian yang membutuhkan anggaran cukup besar
85	Perdagangan	Tertib Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB = 0. Jumlah pelaku usaha MB TBB = 1	0	Dinas Perindag	Untuk tahun 2024 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) Toko Bebas Bea (TBB) belum ada pengajuan Permohonan Izin (NIHIL)

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
86	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 45156.781. RDKK = 104483.167	43,21919	Dinas Perindag	Adanya perubahan kebijakan terkait alokasi, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
87	Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 73. Jumlah barang beredar yang diawasi = 123	59,34959	Dinas Perindag	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan barang yang memenuhi ketentuan standar SNI wajib
88	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		9,9	Dinas Perindag	"Keputusan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting No 32 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan data harga barang kebutuhan pokok
89	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	(Jumlah Industri besar tahun n - Jumlah industri besar tahun n-1) = 26. Jumlah industri besar tahun n-1 = 71	36,61972	Dinas Perindag	
90	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		71,49	Dinas Perindag	
91	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 55. Jumlah izin yang dikeluarkan = 265	20,75472	Dinas Perindag	
92	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Dinas Perindag	Disperindag/DP MPTSP tidak ada mengeluarkan ijin Perluasan Usaha Industri

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
93	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Dinas Perindag	disperindag provinsi bali memiliki pengembangan kawasan peruntukan industri
94	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		90	Dinas Perindag	data dukung yang disampaikan sudah sesuai dengan rumus. kami hanya tidak memiliki data terkait informasi bahan bakar/ energy sisanya sudah ada di data dukung terimakasih
95	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi		0	Dinas Tenaga Kerja dan ESDM	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Rumus (4)	Capaian (5)	Sumber Data (6)	Keterangan (7)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 774091247366. Jumlah APBD = 7293051849998.1	10,61409	BPKAD	
2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 5535429679670.8. Jumlah Pendapatan pada APBD = 7824598583907.8	70,74394	BPKAD	
3	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 3288789725924.7. jumlah belanja APBD = 7293051849998.1	45,09484	BPKAD	
4	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		100	Inspektorat	
5	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	Inspektorat	Belum seragamnya pemenuhan data para pengampu SPIP dan teknis pemenuhan dokumen yang diperlukan tidak efektif.

6	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Inspektorat	Penilaian Mandiri memperoleh skor 4,7. Namun berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP, kelengkapan dokumen yang kurang sesuai membuat nilai Peningkatan Kapabilitas menjadi 3
7	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 41	0	Biro BPJ Perekonomian	
8	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 788973622617.42. jumlah seluruh pengadaan = 805345941632.42	97,96705	Biro BPJ Perekonomian	
9	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 2184684411964. total belanja operasi dan modal = 5123695631252	42,63884	Biro BPJ Perekonomian	
10	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = - 535124004666. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 1823090604976	-29,35257	Biro BPJ Perekonomian	
11	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 3128. Seluruh jumlah seluruh pegawai = 3947	79,25006	BKPSDM	
12	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 1168. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 3947	29,5921	BKPSDM	

13	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 794. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1168	67,97945	BKPSDM	
14	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 7293051849998.1. Total Belanja APBD = 6917008137900	5,436508	BPKAD	
15	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 5535429679670.8. Total PAD dalam APBD = 4074449341179	35,85712	BPKAD	
16	Manajemen Keuangan	Assets management		4	BPKAD	(Tidak Ada Kendala)
17	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 623732459203.32. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 7522393048914	8,291676	BPKAD	
18	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1225558872. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1385259640	88,47142	BPKAD	
19	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 10. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12	83,33333	BPKAD	

2.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dewasa ini, penyelenggaraan pemerintahan dituntut lebih mengedepankan hasil (result oriented) dan manfaat (benefit) yang akan dicapai. Pemerintah tidak hanya fokus pada seberapa besar anggaran yang diserap tetapi harus sudah berorientasi pada seberapa besar kinerja yang dihasilkan serta manfaat yang diperoleh masyarakat. Untuk mewujudkan itu diperlukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara baik. Laporan kinerja sebagai laporan penyelenggaraan SAKIP dan media penyampaian kinerja organisasi kepada masyarakat harus dapat menyajikan informasi kinerja yang mengedepankan prinsip-prinsip laporan kinerja yang baik.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan perlu disusun suatu Laporan

Kinerja seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara untuk bertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, Perpres ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Untuk lebih lengkapnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Bali Tahun 2024 dapat dilihat pada https://balikom.info/LKjIP_PemprovBali2024.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Sesuai dengan RPD 2024-2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2024, berikut Perjanjian Kinerja Provinsi Bali Tahun 2024.

Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka Kemiskinan	4,07	Persentase
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,75	Persentase
3.	Meningkatnya Laporan Kejadian Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran	2,57	Persentase
		4. Indeks Gini	0,366	Poin
4.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahanpokok	5. Laju Inflasi	3±1	Persentase
5.	Meningkatnya Pedapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,45	Persentase
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,50	Poin
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (HH)	72,60	Tahun
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah	9,8	Tahun
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	63,189	Poin
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,97	Poin
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,81	Poin
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,37	Persentase
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang	92,45	Persentase
13.	Meningkatnya penggunaan energi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	8,45	Persentase

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Satuan
1	2	3	4	5
14.	Terkelolanya Sampah RumahTangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase pengelolaan sampah	100	Persentase
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa Adat Mandiri	14,06	Persentase
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	Poin
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	65	Poin
18.	Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	Poin
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	73,75	Poin
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	76,18	Poin
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	Rasio
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	79,85	Poin
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,50	Poin
		26. Indeks Resiko Bencana	115,14	Poin
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	76,00	Poin
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	Poin
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,80	Poin
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	Poin
		31. Opini BPK	WTP	Kategori
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,5	Poin
		33. Indeks Inovasi Daerah	65,75	Poin
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	Persentase

Sumber : Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali tercermin dari capaian 25 Sasaran Strategis RPD dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Tahun

2024 rata-rata sebesar 104,73 persen. Sebanyak 27 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, dan sebanyak 7 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka Kemiskinan	4,07	3,80	106,63
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,75	5,48	95,30
3.	Meningkatnya Laporan Kerja dan Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran	2,57	1,79	130,35
		4. Indeks Gini	0,366	0,348	104,91
4.	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	5. Laju Inflasi	3±1	2,34	122,00
5.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,45	68,76	113,74
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,50	78,63	102,78
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (UHH)	72,60	75,10	103,44
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah	9,8	9,54	97,35
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	63,189	71,33	112,88
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,97	71,36	104,99
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,81	75,02	104,47
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12,37	10,60	85,69
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang	92,45	93,62	101,26
13.	Meningkatnya penggunaan energi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan	8,45	2,45	28,99
14.	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase pengelolaan sampah	100	100	100
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa Adat Mandiri	14,06	15,07	107,18
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	15,00	100,00
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	65	71,36	109,78
18.	Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	72,36	107,09

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	73,75	86,63	117,46
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	76,18	77,53	101,77
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	0,86	100
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	79,85	84,73	106,11
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,50	59,90	137,92
		26. Indeks Resiko Bencana	115,14	111,28	103,35
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	76,00	85,13	112,01
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	93,46	126,29
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,80	0,94	117,5
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	78,99	97,51
		31. Opini BPK	WTP	WTP	100
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88,5	85,56	96,67
		33. Indeks Inovasi Daerah	65,75	69,92	106,34
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan TransBali/Trans Sarbagita	82,5	81,91	99,28

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka kemiskinan (%)	4,25	4,07	3,8	106,63
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66	5,75	5,48	95,30
3.	Meningkatnya Laporan Kerjasama Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran (%)	2,69	2,57	1,79	130,35
		4. Indeks Gini	0,36	0,366	0,348	104,91
4.	Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok	5. Inflasi (%)	1,68	3±1	2,34	122,00
5.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	1,68	60,45	68,76	113,74

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,01	76,50	78,63	102,78
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,88	72,60	75,10	103,44
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,45	9,8	9,54	97,35
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	80,00	63,189	71,33	112,88
10.	Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	71,36	67,97	71,36	104,99
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	71,38	71,81	75,02	104,47
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7,44	12,37	10,60	85,69
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang (%)	95,00	92,45	93,62	101,26
13.	Meningkatnya penggunaan energi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan (%)	7,04	8,45	2,45	28,99
14.	Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase Pengelolaan Sampah (%)	100	100	100	100
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa Adat Mandiri (%)	n/a	14,06	15,07	107,18
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	n/a	15,00	15,00	100,00
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	66,04	65	71,36	109,78
18.	Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	62,73	67,57	72,36	107,09
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	n/a	73,75	86,63	117,46
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	n/a	76,18	77,53	101,77
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	n/a	0,86	0,86	100
22.	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	81,01	79,85	84,73	106,11

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	Realisasi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	n/a	96,50	59,90	137,92
		26. Indeks Resiko Bencana	120,21	115,14	111,28	103,35
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	83,21	76,00	85,13	112,01
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	91,41	74,00	93,46	126,29
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,94	0,80	0,94	117,5
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	79,20	81	78,99	97,51
		31. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. Indeks Kepuasan Masyarakat	84,7	88,5	85,56	96,67
		33. Indeks Inovasi Daerah	67,44	65,75	69,92	106,34
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	79	82,5	81,91	99,28

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2024

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			Target Akhir Tahun RPD 2024-2026	Capaian 2024 Terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali	1. Angka kemiskinan (%)	4,07	3,8	106,63	3,97	106,80
2.	Meningkatnya Perekonomian Krama Bali	2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,75	5,48	95,30	5,85	93,68
3.	Meningkatnya Laporan Kerjadan Pemerataan Krama Bali	3. Angka Pengangguran (%)	2,57	1,79	130,35	1,41	73,05
		4. Indeks Gini	0,366	0,348	104,91	0,362	106,80
4.	Terwujudnya stabilitas harga- harga kebutuhan bahan pokok	5. Inflasi (%)	3±1	2,34	122,00	3±1	122,00
5.	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali	6. Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	60,45	68,76	113,74	55,33	124,27
6.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,50	78,63	102,78	76,65	102,58

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			Target Akhir Tahun RPD 2024-2026	Capaian 2024 Terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	8. Usia Harapan Hidup (tahun)	72,60	75,10	103,44	72,80	103,15
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan	9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,8	9,54	97,35	10,6	90
9.	Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga KerjaKrama Bali	10. Indeks Daya Saing Krama Bali	63,189	71,33	112,88	66,45	107,34
10.	Terwujudnya PemajuanKebudayaan Bali	11. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67,97	71,36	104,99	68,98	90
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	12. IKLH (Indeks KualitasLingkungan Hidup)	71,81	75,02	104,47	72,04	104,13
		13. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca(%)	12,37	10,60	85,69	14,58	72,70
12.	Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah	14. Persentase penyelenggaraan penataan ruang (%)	92,45	93,62	101,26	96,24	97,27
13.	Meningkatnya penggunaanenergi bersih	15. Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan (%)	8,45	2,45	28,99	9,85	24,87
14.	Terkelolanya Sampah RumahTangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	16. Persentase Pengelolaan Sampah(%)	100	100	100	100	100
15.	Meningkatnya Kemandirian Desa Adat	17. Persentase Desa AdatMandiri (%)	14,06	15,07	107,18	16,74	90,02
16.	Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali	18. Indeks Pemajuan Tradisi	15,00	15,00	100,00	20,00	75,00
17.	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali	19. Indeks Pemajuan Kebudayaan	65	71,36	109,78	67	106,50
18.	Terwujudnya lingkungan hidupyang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim	20. Indeks Provinsi Hijau	67,57	72,36	107,09	80,72	89,64
19.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	21. Indeks Infrastruktur	73,75	86,63	117,46	78,46	110,41
20.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	22. Indeks Layanan Infrastruktur	76,18	77,53	101,77	80,10	96,79
21.	Meningkatnya konektivitas transportasi publik	23. Rasio Konektivitas Transportasi	0,86	0,86	100	0,9	95,55
22.	Meningkatnya kualitas layananTeknologi Informasi dan	24. Indeks Layanan Teknologi Informasi danKomunikasi	79,85	84,73	106,11	84,28	100,53

No.	Sasaran Strategis RPD	IKU	2024			Target Akhir Tahun RPD 2024-2026	Capaian 2024 Terhadap Target 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Komunikasi						
23.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	25. Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	96,50	59,90	137,92	84,00	128,69
		26. Indeks Resiko Bencana	115,14	111,28	103,35	108,34	97,28
24.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	27. Indeks demokrasi	76,00	85,13	112,01	78,00	104,60
25.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	28. Indeks Reformasi Birokrasi	74,00	93,46	126,29	76,00	122,97
26.	Meningkatnya Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	29. Indeks Merit Sistem	0,80	0,94	117,5	0,85	110,58
27.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	30. Nilai AKIP	81	78,99	97,51	82	96,32
		31. Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	100
28.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah	32. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,5	85,56	96,67	89,5	95,59
		33. Indeks Inovasi Daerah	65,75	69,92	106,34	67,75	103,20
		34. Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	82,5	81,91	99,28	83,5	98,09

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Akuntabilitas anggaran adalah fondasi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah yang baik. Melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, pengawasan yang ketat, dan pelaporan yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan

anggaran APBD maupun dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis daerah Provinsi Bali 2024-2026.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah	6.876.016.193.600,00	7.824.598.583.907,83	113,80
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4.590.033.889.600,00	5.535.429.679.670,83	120,60
4.2	Pendapatan Transfer	2.280.238.060.000,00	2.283.418.060.237,00	100,14
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.744.244.000,00	5.750.844.000,00	100,11
	Jumlah Pendapatan	6.876.016.193.600,00	7.824.598.583.907,83	113,80
5	Belanja Daerah	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
5.1	Belanja Operasi	4.755.763.778.329,00	4.461.088.682.470,66	93,80
5.2	Belanja Modal	798.894.222.750,00	667.689.607.145,41	83,58
5.3	Belanja Tidak Terduga	52.205.727.068,00	7.441.134.041,00	14,25
5.4	Belanja Transfer	2.188.818.002.657,00	2.156.832.426.341,00	98,54
	Jumlah Belanja	7.795.681.730.804,00	7.293.051.849.998,07	93,55
	Surplus/Defisit	(919.665.537.204,00)	531.546.733.909,76	(57,80)
6	Pembiayaan Daerah	919.665.537.204,00	92.185.725.293,56	10,02
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.175.582.550.556,00	342.650.523.381,56	29,15
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	255.917.013.352,00	250.464.798.088,00	97,87
	Pembiayaan Netto	919.665.537.204,00	92.185.725.293,56	10,02
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	623.732.459.203,32	0,00

Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali berhasil menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan tercatatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 623.732.459.203,32 dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan adanya pengendalian yang ketat terhadap belanja yang tidak mendesak serta penundaan proyek-proyek yang bisa ditunda tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Sebagian besar penghematan anggaran berasal dari sektor belanja barang dan jasa, dimana pemerintah daerah berhasil mengurangi biaya administratif dan operasional yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas yang tidak mendesak dan anggaran makan minum (rapat tatap muka diganti via zoom meeting).

Meskipun terjadi efisiensi belanja, hal ini tidak mengorbankan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Terbukti dari rata-rata capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 104,73 persen. Sebanyak 27 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, dan diantara 7 indikator tidak mencapai 100% hanya 1 indikator saja yang capaiannya di bawah 30% yaitu Persentase Penggunaan Energi Baru Terbarukan. Untuk jangka panjang ke depan, Pemerintah Provinsi Bali perlu terus memastikan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien tetap sejalan dengan pencapaian visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Terkait keuangan, Pemerintah Provinsi Bali berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 7.293.051.849.998,07 dengan efisiensi sebesar 6,45% atau senilai Rp 623.732.459.203,32.

Dari data capaian kinerja yang tersaji pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Bali ini, terlihat bahwa realisasi program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2024 telah berada pada jalur yang benar (*on the track*) menuju pada target-target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali tercermin dari capaian 25 Sasaran Strategis RPD dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan dampak dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2024 rata-rata sebesar 104,73 persen. Sebanyak 27 indikator mencapai kinerja 100% atau lebih, dan sebanyak 7 indikator tidak mencapai 100%.

1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2024 sebesar 3,8% atau turun 0,45 poin dari tahun 2023 yang sebesar 4,25%. Angka ini masih jauh berada pada rata-rata nasional 2024 yaitu sebesar 8,57%. Papua Pegunungan masih merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia yaitu 29,66%.

Pada periode Maret 2023-September 2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada September 2024 tercatat sebanyak 176,21 ribu orang (3,80 persen). Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2024, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 8,22 ribu orang (0,20 persen poin). Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 jumlah penduduk miskin turun sebanyak 17,57 ribu orang (0,45 persen poin).

Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2024 tercatat sebanyak 112,93 ribu orang (3,32 persen), turun sebanyak 6,38 ribu orang (0,23 persen poin) dibandingkan kondisi Maret 2024 yang tercatat sebanyak 119,31 ribu orang (3,55 persen). Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan pada September 2024 tercatat sebanyak 63,29 ribu orang (5,11 persen), turun sebanyak 1,83 ribu orang (0,09 persen poin) dibandingkan kondisi Maret 2024 yang tercatat sebanyak 65,12 ribu orang (5,20 persen).

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di Bali, antara lain:

- 1) Perekonomian Provinsi Bali tumbuh 5,43 persen secara y-on-y pada Triwulan III 2024 didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kenaikan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
- 2) Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) pada PDRB Pengeluaran tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,46 persen secara y-on-y pada Triwulan III 2024.
- 3) Secara y-o-y pada bulan September 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,67 persen, capaian ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan September 2023 yang tercatat sebesar 2,40 persen dan lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Maret 2024 yang tercatat sebesar 3,67 persen.

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali hasil Sakernas Agustus 2024 tercatat sebesar 1,79 persen, turun 0,90 persen poin dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 2,69 persen dan turun 0,08 persen poin jika dibandingkan dengan Februari 2024 yang tercatat sebesar 1,87 persen.
- 5) Hasil Sakernas Agustus 2024 mencatat jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 2,67 juta orang. Jika dibandingkan dengan Agustus 2023 terjadi penambahan penduduk bekerja sebanyak 47,60 ribu orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Februari 2024, terjadi penambahan penduduk bekerja sebanyak 2,62 ribu orang.
- 6) Dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk bekerja hasil Sakernas Agustus 2024 di perkotaan tercatat sebesar 1,82 juta orang, jauh lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang tercatat sebesar 845,20 ribu orang. Dibandingkan dengan kondisi Februari 2024, penduduk yang bekerja di daerah perkotaan bertambah sebanyak 7,09 ribu orang, sedangkan di perdesaan tercatat turun sebesar 4,47 ribu orang.
- 7) Salah satu lapangan pekerjaan dengan peningkatan jumlah pekerja terbesar berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024 adalah sektor Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini mencerminkan pemulihan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali.
- 8) Wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali periode Januari- November 2024 tercatat sebanyak 5.782.260 kunjungan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode bulan yang sama. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan sebesar 59.453 kunjungan, yaitu dari 5.722.807 kunjungan pada Januari-November 2019 menjadi 5.782.260 kunjungan pada Januari-November 2024.
- 9) Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada September 2024 mencapai 66,34 persen. Angka ini meningkat 3,12 persen poin dibandingkan September 2019 sebelum pandemi Covid-19, yang tercatat sebesar 63,22 persen, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata.
- 10) Realisasi penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako melalui Himbara di Provinsi Bali pada bulan September-Oktober 2024

tercatat sebanyak 113.987 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) atau 92,99 persen dari target. Sementara itu, realisasi penyaluran bantuan sosial program sembako melalui Himbara pada bulan Februari-Maret 2024 tercatat sebanyak 121.126 KPM atau 96,07 persen dari target (sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali).

2. Meningkatnya Perekonomian Krama Bali

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 95,30 persen dari target sebesar 5,75 persen dan terealisasi sebesar 5,48 persen. Capaian ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,66 persen atau turun 0,18 poin. Nilai tersebut juga belum cukup melampaui target akhir tahun RPD.

Pertumbuhan ekonomi Bali mengalami peningkatan dari target yang ditentukan pada tahun 2024 ini. Dimana pada Semester II Tahun 2024 mencapai 5,48 persen. Pertumbuhan Bali yang tetap kuat menjadi indikator penting akan ketahanan dan potensi ekonomi wilayah dalam menghadapi tantangan global dan domestik. Dari sisi pengeluaran, peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Bali didorong oleh pertumbuhan pada investasi dan aktivitas ekspor. Investasi menguat sebesar 4,19% secara year-on-year (Y-on-Y) sejalan dengan akselerasi penyelesaian konstruksi proyek strategis. Sedangkan Ekspor, utamanya pada ekspor jasa, meningkat seiring peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 17,65% (Y-on-Y). Adapun Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah tumbuh kuat meski melambat. Kuatnya Konsumsi Rumah Tangga didorong oleh aktivitas Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru. Konsumsi Pemerintah dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRRT) juga tetap tumbuh kuat didorong pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Pada angka inflasi pada Semester II Tahun 2024 Pada Desember 2024, Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,31 persen secara month-to-month (M-to-M). Dengan demikian, inflasi Provinsi Bali pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,34 persen baik secara year-on-year (Y-on-Y). Keempat wilayah cakupan penghitungan inflasi di Provinsi Bali mengalami inflasi secara M-to-M. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan yang sebesar 0,49 persen, sedangkan inflasi terendah di Kota Denpasar yang sebesar 0,19 persen. Pada tahun 2024, inflasi Y-on-Y

tertinggi terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 2,69 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Singaraja yang sebesar 1,93 persen. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan anggaran daerah (APBD) maupun anggaran pusat (APBN). Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN.

Pada sisi pengeluaran, PDRB Provinsi Bali triwulan IV-2024, masih menempatkan komponen konsumsi akhir rumah tangga sebagai pengguna terbesar PDRB Bali. Pada pengukuran atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun pengukuran atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan. Peningkatan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat dari Rp39,51 triliun (triwulan III-2024) menjadi Rp40,39 triliun (triwulan IV-2024). Sedangkan secara ADHK (atas dasar harga konstan) 2010, terjadi peningkatan dari Rp23,63 triliun (triwulan III-2024) menjadi Rp24,01 triliun (triwulan IV-2024).

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Bali tahun 2024 (kumulatif sampai triwulan IV-2024) dibanding tahun 2023 (kumulatif sampai triwulan IV-2023) tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,48 persen (c-to-c). Agregat peningkatan ini didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pengeluaran akhir. Peningkatan tertinggi tercatat pada Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) sebesar 27,04 persen; diikuti Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 15,99 persen; Komponen Impor Luar Negeri sebesar 12,93 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,37 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi) sebesar 5,56 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tercatat mengalami peningkatan sebesar 4,65 persen.

Oleh karena itu, kinerja sektor padat karya perlu didorong agar dapat memberikan dampak yang besar pada daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada kelas menengah ke bawah.

Dalam rangka menghadapi hal di atas, Bank Indonesia mengeluarkan bauran kebijakan yang mempertahankan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan makro prudensial longgar untuk mendorong kredit/pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, serta mendorong kebijakan sistem pembayaran yang mendukung UMKM dan ekonomi hijau dengan infrastruktur dan industri yang andal, dan memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Lebih lanjut, Bank Indonesia Provinsi Bali juga menyelenggarakan acara Diseminasi dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mendorong Pemulihan Sektor Padat Karya untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Inklusif di Wilayah Balinusra" pada tanggal 25 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya memperkuat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor padat karya seperti pariwisata, pertanian, dan pengolahan. Diskusi yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri oleh Deputy Gubernur Senior BI, Ibu Destry Damayanti, serta narasumber dan pejabat pemerintah provinsi, akademisi, seluruh BPD Balinusra, perbankan, dan asosiasi serta pelaku usaha. Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa sektor yang menampung banyak tenaga kerja dan memiliki kontribusi besar terhadap PDRB seperti pertanian beserta sub sektornya, yakni perikanan dan peternakan, memiliki akses yang terbatas terhadap pembiayaan perbankan. BI mencatat bahwa komoditas unggulan Provinsi Bali diantaranya adalah garam dan produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun olahan. Selain itu, Bali juga dapat berperan sebagai sentra produksi garam berkualitas ekspor. Lebih lanjut, model kolaborasi "Pentahelix" yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media juga krusial untuk membangun ekosistem yang mendukung sektor unggulan Provinsi Bali. Dalam konsep Pentahelix, pemerintah berperan dalam kebijakan dan infrastruktur, akademisi dalam pengembangan SDM, dunia usaha sebagai pencipta lapangan kerja, masyarakat sebagai pengguna dan distributor, serta media massa sebagai kanal informasi.

Kinerja Investasi Bali tetap tumbuh positif pada triwulan III 2024, meski melambat akibat penurunan pada investasi bangunan. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)/Investasi di Bali

tumbuh mencapai 1,96% (y-on-y) pada triwulan III 2024, melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,59% (y-on-y). Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh menurunnya pembentukan modal produk Kekayaan Intelektual (KI)¹, serta telah berakhirnya realisasi investasi proyek strategis di Bali. Kinerja Investasi yang tumbuh melambat dicerminkan oleh perlambatan pada kredit investasi dan modal kerja, serta hasil liaison kepada pelaku usaha. Kinerja kredit investasi dan modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 17,67% (y-on-y) dan 0,82% (y-on-y) pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 18,55% (y-on-y) dan 2,07% (y-on-y). Lebih lanjut, perlambatan pada PMTDB juga dicerminkan dari penurunan skala likert investasi hasil liaison kepada pelaku usaha yang dilakukan Bank Indonesia, yang turun mencapai 0,94 pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,06.

Kinerja Impor Luar Negeri juga turut tumbuh meningkat pada triwulan laporan. Kinerja total impor luar negeri pada triwulan laporan tercatat tumbuh mencapai 10,01% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,50% (y-on-y).

Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan keberangkatan wisatawan nasional ke luar negeri yang berangkat dari Bali sebesar 6,74% (y-on-y). Selain itu, kinerja impor barang Provinsi Bali juga tumbuh tinggi dan double digit mencapai 19,77% (y-on-y) pada triwulan III 2024, namun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 21,69% (y-on-y).

Pertumbuhan total impor barang Bali juga didorong oleh peningkatan kinerja 2 (dua) komponen impor berdasarkan klasifikasi Broad Economic Categories (BEC), yaitu impor bahan baku dan impor barang modal. Pertumbuhan masing-masing komponen impor ini mencapai 42,82% (y-on-y) dan 77,60% (y-on-y) pada triwulan III 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 28,35% (y-on-y) dan 15,04% (y-on-y).

3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Krama Bali

Pada Agustus 2024, kabupaten/kota dengan TPT terendah terdapat di Kabupaten Bangli, yaitu sebesar 0,74% dan tertinggi terdapat di Kota Denpasar yang tercatat sebesar 2,11%. Dibandingkan Agustus

2023, terdapat penurunan TPT pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Tabel TPT Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(persen)	(persen)	(persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jembrana	3,94	2,52	1,53
Tabanan	3,83	2,64	1,85
Badung	6,87	2,72	1,83
Gianyar	6,78	2,96	1,98
Klungkung	1,96	1,29	1,23
Bangli	0,76	0,75	0,74
Karangasem	3,09	2,61	1,63
Buleleng	5,20	3,60	2,06
Denpasar	5,08	2,85	2,11
Provinsi Bali	4,80	2,69	1,79

Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, persentase angka pengangguran (TPT) di Bali pada tahun 2024 sebesar 1,79% atau turun 0,9 poin dari tahun 2023 yang sebesar 2,69%. Angka ini masih berada pada rata-rata nasional 2024 yaitu sebesar 4,91%. Banten merupakan provinsi dengan persentase angka pengangguran tertinggi di Indonesia yaitu 6,68%.

Beberapa hal yang memengaruhi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bali diantaranya pemulihan pariwisata, peningkatan mobilitas penduduk, dan membaiknya kinerja industri perbankan seiring dengan adanya perluasan digitalisasi pembayaran. Lebih lanjut, Bank Indonesia Provinsi Bali telah meluncurkan website Pusat Investasi Kerthi Bali Sadhana (PIKBS) pada 7 Februari 2024 sebagai sarana untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Harapan ke depan yaitu persepsi positif investor terhadap sektor-sektor di Bali mampu terbentuk. Adapun prinsip pengelolaan PIKBS diharapkan mampu mensinergikan seluruh peran kementerian dan lembaga, melibatkan UMKM dan proyek investasi di sektor-sektor prioritas, serta menghasilkan transaksi yang besar. Adapun penambahan jumlah tenaga kerja terbesar terjadi pada LU pertambangan dan penggalian, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, serta real estate dan jasa lainnya.

Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Provinsi Bali berupaya meningkatkan kualitas teknis melalui program “kartu prakerja”. Selain itu, upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui pemanfaatan konten pendidikan digital yang sudah tersedia di berbagai platform. Saat ini telah banyak

lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba yang berkontribusi dengan menyediakan konten pendidikan digital gratis, seperti materi belajar daring, video pembelajaran, dan platform belajar interaktif. Pemerintah Provinsi Bali juga merespons kebijakan pemerintah pusat dengan membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) yang berperan menyinergikan semua stakeholders vokasi di daerah.

Dalam konteks pemerataan pembangunan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi guna membantu menurunkan nilai Indeks Gini, Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai upaya pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di Bali, meliputi :

- 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Baru di Kabupaten Klungkung dengan membangun Pengembangan Pusat Kebudayaan Bali;
- 2) Mempercepat akses penyaluran komoditas dari kabupaten ke Kota, dengan membangun Shortcut Singaraja-Mengwitani;
- 3) Mengembangkan Bandara Udara Baru di Utara Provinsi Bali;
- 4) Mengembangkan jalan Tol Gilimanuk – Mengwi;
- 5) Mempercepat proyek Pelabuhan Segitiga Sanur - Nusa Penida - Nusa Ceningan;
- 6) Membina dan memberikan bimbingan UMKM mulai tahap Produksi, Promosi dan Pemasaran;
- 7) Mengembangkan Pariwisata Berbasis Desa Adat di seluruh Desa di Provinsi Bali.

4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok

Untuk inflasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 sudah melebihi target, yaitu 2,34 persen dari target yang sudah ditentukan sebesar 3 ± 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum inflasi di Provinsi Bali masih cukup stabil dan terkendali, walaupun belum sebaik capaian tahun 2023.

Tabel Capaian Inflasi Provinsi Bali Tahun 2024

Indikator	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Tahun RPD 2024-2026	Capaian 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian(%)		
1	2	3	4	5	6	7
Inflasi (%)	1,68	3 ± 1	2,34	122,00	3 ± 1	122,00

Sumber: Biro Organisasi Setda Prov. Bali, data diolah

Walaupun berhasil mencapai target, Bali menjadi salah satu Provinsi yang inflasinya tertinggi pada Tahun 2024, bersama dengan Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.

Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,20 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,06 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,03 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,20 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,40 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,32 persen. Sedangkan kelompok yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (year to date) Provinsi Bali pada Desember 2024 sebesar 2,34 persen yang didapat dari membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulan Desember 2024 terhadap IHK Bulan Desember 2023. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2024 terhadap Desember 2023 atau year on year) juga tercatat sebesar 2,34 persen. Secara bulan ke bulan, inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 0,31 persen.

Bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pengendalian inflasi termasuk melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berdasar pada kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif), antara lain:

- 1) Pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah dan pemantauan harga terus diintensifkan, terutama untuk komoditas bahan pangan strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, telur, bawang merah, bawang putih, gula pasir, dan minyak goreng.

- 2) Implementasi program Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten) secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan lahan yang tidak terpakai dan mempromosikan pertanian di tengah perkotaan.
- 3) Peresmian Rice Milling Unit (RMU) milik anak perusahaan PT Mitra BUMDes Nasional (MBN) yang berlokasi di Kabupaten Jembrana. RMU tersebut memiliki kapasitas penggilingan 2 ton per jam (5 jam per hari). Pasca diresmikan, RMU dimaksud telah memasarkan beras medium dan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Jembrana.
- 4) Pemberian bantuan hibah bibit babi kepada kelompok ternak untuk memitigasi kenaikan harga daging babi yang terus berlanjut. Beberapa bantuan diantaranya diberikan oleh Pemkab Tabanan dan Pemkab Jembrana.
- 5) Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatan produktivitas serta sarana dan prasarana pascapanen untuk mendorong hilirisasi pangan. Sarana dan prasarana pertanian turut mencakup pompa untuk memperluas pengairan lahan sawah.
- 6) Kerjasama antar daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pasokan antarwaktu dan antardaerah. Pada triwulan III 2024, telah disepakati KAD antara Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli tentang distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta pengembangan potensi daerah.
- 7) Fasilitasi distribusi pangan, baik melalui optimalisasi anggaran daerah, subsidi oleh Bapanas, maupun sumber pendanaan lainnya. Fasilitasi distribusi pangan juga dilakukan untuk pengangkutan komoditas dalam rangka operasi pasar dan pasar murah.
- 8) Mendorong peningkatan peran Perumda dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan dengan melibatkan Perumda untuk menyalurkan beras SPHP Bulog dan menjadi offtaker hasil panen.
- 9) Penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat disertai informasi harga jual produk di bawah harga pasar.
- 10) Sosialisasi himbauan belanja bijak dan diversifikasi pola konsumsi, melalui berbagai kanal media sosial.

- 11) High Level Meeting (HLM) dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Galungan- Kuningan, disertai Rapat Koordinasi Nasional TPID secara berkala. Selama triwulan III 2024, terlaksana 5 (lima) HLM.
- 12) Pemanfaatan SIGAPURA (Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis) Provinsi Bali untuk memantau perkembangan harga dan neraca pangan.

5. Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Pagu anggaran total pendapatan Pemerintah Provinsi Bali tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023 (Tabel 2.5). Komponen pendapatan dianggarkan sebesar Rp6,88 triliun atau turun sebesar - 5,14% (yoy) pada tahun 2024. Hal ini terutama didorong oleh penurunan anggaran PAD sebesar -8,95% (yoy), terutama pada kategori Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penurunan pagu anggaran pendapatan pada tahun 2024 menunjukkan penyesuaian berdasarkan potensi pemasukan daerah dan hasil evaluasi atas realisasi APBD Provinsi Bali pada tahun 2023. Meskipun secara total anggaran pendapatan menurun, namun pagu PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat masing-masing sebesar 13,79% (yoy) dan 496,59% (yoy). Peningkatan tersebut menunjukkan optimisme Pemerintah Provinsi Bali terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Bali.

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Bali s.d. triwulan III 2024 sebesar Rp5,75 triliun atau mencapai 83,58% dari pagu anggaran. Nominal realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatan pada triwulan III 2023 yang sebesar Rp4,82 triliun. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan realisasi PAD yang tumbuh sebesar 16,85% (yoy) sejalan dengan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah (tumbuh 7,46%, yoy), Retribusi Daerah (tumbuh 43,87%, yoy), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (tumbuh 24,82%, yoy) serta Lain-lain PAD yang Sah (tumbuh 105,37%,yoy).

Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil upaya-upaya strategis untuk mendorong peningkatan realisasi PAD. Langkah-langkah tersebut antara lain yaitu pemanfaatan Samsat Keliling dan Samsat Kerti, pemungutan pajak secara door-to- door dan menggencarkan himbauan pembayaran pajak dengan melibatkan perangkat daerah, implementasi elektronifikasi Pemerintah Daerah untuk mendukung efisiensi sistem kerja seperti pembayaran pajak secara online, serta e-ticketing di Destinasi

Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pariwisata. Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Bali juga meningkatkan target penerimaan pungutan wisatawan asing (PWA) yang sudah diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Hingga saat ini, implementasi PWA terus disempurnakan, salah satunya terkait dengan penjelasan regulasi dan ketentuan kepada wisatawan asing.

Peningkatan realisasi PAD Provinsi Bali juga didorong oleh tingginya aktivitas sektor pariwisata pada triwulan berjalan. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tetap tumbuh tinggi pada triwulan III 2024, yaitu sebesar 12,25% (yoy). Kunjungan wisatawan asing dan domestik juga masih tumbuh positif, masing-masing sebesar 16,82% (yoy) dan 11,44% (yoy). Hal tersebut mendorong peningkatan perolehan pajak daerah. Lebih lanjut, perolehan pajak daerah yang bersumber dari kendaraan juga diindikasikan masih kuat. Hal ini tercermin dari jumlah pendaftaran kendaraan baru yang tetap tinggi, yaitu mampu tumbuh sebesar 15,75% (yoy) pada triwulan III 2024.

6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing

Peningkatan IPM Bali tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak mengalami peningkatan terbesar. Pembangunan manusia Bali terus mengalami kemajuan selama periode 2020- 2024. Sejak tahun 2020, IPM Bali yang tercatat sebesar 76,52 sudah berada pada status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) dan masih pada status yang sama sampai dengan tahun 2024. Selama periode 2020-2024, IPM Bali rata-rata meningkat sebesar 0,53 poin (0,68 persen) per tahun, sehingga IPM Bali menjadi sebesar 78,63 pada tahun 2024.

Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui berbagai program yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, antara lain sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kebutuhan daya tampung peserta didik dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah;

- 2) Pemberian Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk membantu kebutuhan biaya operasional sekolah dan biaya penunjang proses pembelajaran;
- 3) Menyediakan biaya personal bagi kelompok keluarga Prasejahtera, Sejahtera I dan II untuk bersekolah;
- 4) Berkolaborasi dengan CSR (Enesis Group) dalam mendukung upaya promosi kesehatan melalui Program CSR Pencegahan DBD “Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat & Bebas Gerak” di Kabupaten Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar;
- 5) Penguatan Informasi Layanan Masyarakat untuk gerakan masyarakat dan penyakit tidak menular;
- 6) Penggerakan Aksi Bergizi dan Gerakan Ibu Hamil Sehat;
- 7) Meningkatkan pemantauan terutama kasus-kasus risiko tinggi, yang dilakukan oleh Puskesmas sebagai penganggungjawab wilayah bekerja sama dengan fasilitas rujukan melalui penerapan rujukan balik dan WhatsApp Group; dan
- 8) Mempercepat pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) seperti jalan tol, bandara baru, pelabuhan dan destinasi pariwisata secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di seluruh wilayah Bali.

7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

UHH penduduk Bali pada 2024 juga sudah melampaui rata-rata UHH penduduk Indonesia, yang tahun ini meningkat menjadi 74,15 tahun, yang sebelumnya 73,93 tahun pada tahun 2023.

Namun, meskipun peningkatan usia harapan hidup adalah kabar baik, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Seiring bertambahnya usia, kelompok lansia lebih rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi kelompok usia lanjut agar mereka tetap sehat dan mandiri.

Selain itu, meningkatnya angka UHH juga berdampak pada rasio ketergantungan lansia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk lansia, beban ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif turut meningkat. Hal ini bisa menjadi tantangan dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan

yang tepat, seperti pemberdayaan lansia dan sistem jaminan sosial yang lebih baik.

Di sisi lain, tidak semua lansia menjadi beban. Lansia yang memiliki kehidupan berkualitas tetap bisa hidup mandiri, sehat, aktif, dan produktif. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mempersiapkan masa tua mereka sejak dini. Pola hidup sehat, investasi finansial, serta menjaga kesehatan mental dan sosial menjadi kunci untuk menikmati hari tua yang sejahtera.

Sebagai langkah pencegahan dan peningkatan kualitas hidup, masyarakat Bali melalui Dinas Kesehatan diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengikuti 7 langkah GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). Langkah penting yang dapat dilakukan meliputi aktivitas fisik rutin, konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, pemeriksaan kesehatan berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan penggunaan jamban yang higienis. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup lebih panjang dengan kondisi yang sehat dan berkualitas.

8. Meningkatnya kualitas pendidikan

Selama periode 2020-2024, baik angka HLS dan RLS di Bali rata-rata meningkat masing-masing sebesar 0,07 tahun (0,54 persen) untuk HLS dan sebesar 0,15 tahun (1,62 persen) untuk RLS.

Pada tahun 2024, HLS penduduk Bali mengalami perlambatan peningkatan dibandingkan dengan peningkatan tahun 2023. Pada tahun 2024, HLS penduduk Bali tercatat meningkat hanya sebesar 0,04 tahun (0,29 persen) lebih lambat jika dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2023 yang selama 0,10 tahun (0,74 persen). Sedangkan, RLS penduduk Bali pada tahun 2024 justru mengalami percepatan peningkatan. RLS penduduk Bali tahun 2024 meningkat sebesar 0,09 tahun (0,95 persen), mengalami percepatan dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang meningkat sebesar 0,06 tahun (0,64 persen).

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, di antaranya:

- 1) Pemberian bantuan dana pendamping BOSDA;
- 2) Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendikbudristek;

- 3) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa melalui pelaksanaan aneka lomba di tingkat Provinsi dan Nasional (OSN, O2SN, FLS2N, Fiksi, dan LKS), serta penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembinaan karakter siswa;
- 4) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi ke satuan pendidikan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi ke satuan pendidikan terkait pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah, pengelolaan dana BOSP, review kurikulum dan rapor pendidikan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pemenuhan SPM Pendidikan;
- 6) Pelatihan penyusunan materi pembelajaran berbasis TIK dan pembinaan penggunaan TIK di satuan pendidikan;
- 7) Revitalisasi SMK meliputi pembuatan peta jalan pendidikan vokasi SMK, penyelarasan kurikulum dengan dunia industri, peningkatan sarana pratek siswa, pemagangan siswa, dan peningkatan akses sertifikasi kompetensi;
- 8) Memprogramkan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus terhadap pentingnya pendidikan bagi anak dalam mendukung kemandirian;
- 9) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) merupakan lanjutan pembangunan Unit Sekolah Baru, yakni: SMAN 9 Denpasar, SMAN 10 Denpasar, SMAN 11, Denpasar, SMAN 12 Denpasar, SMAN 2 Kuta Utara, SMAN 3 Kuta Selatan, SMAN 3 Mengwi, SMAN 2 Gianyar, SMAN 2 Sukawati, SMAN 1 Abang, SMAN 3 Negara, SMKN 6 Denpasar, SMKN 7 Denpasar, SMKN 2 Kuta Selatan, SMKN 1 Mengwi, dan SMKN 1 Banjar; dan
- 10) Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium, pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan, pembangunan/ rehabilitasi sarana utilitas lainnya, pengadaan media pembelajaran, pengadaan alat praktik siswa, dan pengadaan mebeler sekolah.

9. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali

Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja Krama Bali adalah isu yang penting dalam konteks pembangunan sosial ekonomi di Bali. Beberapa aspek utama yang terlibat, yaitu meningkatkan kualitas

tenaga kerja serta memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi mereka, khususnya bagi Krama Bali, yang merujuk pada warga Bali asli yang memiliki peran kunci dalam berbagai sektor.

Untuk mewujudkan daya saing yang meningkat dan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Krama Bali, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Mulai dari peningkatan keterampilan, perlindungan hukum, dukungan terhadap UMKM, hingga kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal, tetapi juga memperkuat ekonomi Bali secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa Krama Bali mendapatkan manfaat yang seimbang dari pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Capaian Indeks Daya Saing Krama Bali pada Tahun 2024 cukup baik, walaupun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya dari 80,00 menjadi 71,33 pada Tahun 2024.

Untuk pertama kalinya, daya saing Indonesia menempati peringkat tertinggi berdasarkan International Institute for Management Development (IMD) melalui rilis World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 tentang daya saing berbagai negara dunia. Dalam laporan tahun 2024 ini, Indonesia menempati peringkat 27 dari 67 negara, naik 7 peringkat dari tahun 2023 di posisi 34, dengan skor 71,52. Sejak 1997, baru kali ini Indonesia menembus peringkat 20-an yaitu pada periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan menjadi yang terbaik sepanjang sejarah. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia termasuk tiga besar, hanya di bawah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25).

Untuk meningkatkan daya saing, tenaga kerja Krama Bali perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan adanya program pelatihan keterampilan (misalnya dalam sektor pariwisata, kerajinan tangan, dan agrikultur berbasis teknologi), tenaga kerja lokal dapat meningkatkan kemampuan dan memperoleh sertifikasi yang memperkuat posisi mereka di pasar kerja. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan daya saing krama Bali, yaitu:

- 1) Melakukan Revitalisasi SMK meliputi pembuatan peta jalan pendidikan vokasi SMK, penyesuaian kurikulum dengan dunia industri,

peningkatan sarana praktek siswa, pemagangan siswa, dan peningkatan akses sertifikasi kompetensi.

- 2) Menyelenggarakan diklat vokasi bekerja sama dengan dunia usaha/dunia industri. Pada tahun 2024 persentase lulusan siswa SMK yang diterima berkerja di dunia usaha/dunia industri mencapai 92,30%, jauh melampaui dari target sebesar 50,25% dan terdapat peningkatan dari tahun 2023 sebesar 9,81%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya keterserapan lulusan siswa SMK yang diterima di dunia kerja atau berwirausaha, yang tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan pendidikan vokasi.
- 3) Mengadakan program pelatihan bahasa asing seperti Bahas Inggris, Jepang, Mandarin, dan Korea dapat membantu tenaga kerja Krama Bali untuk berkomunikasi lebih baik dengan wisatawan dan memperluas peluang kerja di sektor pariwisata. Ada juga beberapa program vokasi yang berfokus pada bahasa asing sebagai bagian dari kurikulum.
- 4) Pemanfaatan aplikasi SISNAKER Bali, untuk mempermudah pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan di Bali, baik bagi tenaga kerja, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Dalam aplikasi ini terdapat Layanan Pemberdayaan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi program-program pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya bagi Krama Bali, dengan akses yang lebih mudah kepada berbagai program bantuan pemerintah.

10. Terwujudnya Pemajuan Kebudayaan Bali

Pada tahun 2024 merupakan momentum penting karena ada 2 capaian pemerintah dan masyarakat Bali dalam bidang kebudayaan. Capaian pertama adalah Provinsi Bali berhasil memperoleh nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) tertinggi dengan nilai 71,36. Nilai ini jauh di atas rata-rata IPK Nasional yakni 57,13. Kedua, Provinsi Bali memperoleh Anugerah Kebudayaan Indonesia dari Kementerian Kebudayaan RI yang diserahkan pada 18 Desember 2024. Pembangunan kebudayaan Bali dari periode 2018-2023 selalu berada di atas rata-rata Nasional, dan terus mengalami kemajuan selama periode 2021-2023. Sejak tahun 2021, IPK Bali yang tercatat sebesar 61,14 dan langsung meningkat hampir 10 poin menjadi 71,36 pada tahun 2023.

Dengan strategi yang semakin inovatif dan berbasis kolaborasi, diharapkan pelestarian cagar budaya di Bali tidak hanya mampu

mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga menjadi bagian dari daya tarik budaya yang dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan pendidikan bagi masyarakat luas.

Pelestarian cagar budaya merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan kebudayaan di Provinsi Bali. Kegiatan utama dalam upaya pelestarian ini meliputi Penetapan Cagar Budaya dan Pelindungan Cagar Budaya, yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan warisan budaya bagi generasi mendatang.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menargetkan beberapa situs cagar budaya di seluruh wilayah Bali untuk didaftarkan ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Proses ini diawali dengan inventarisasi, penyusunan berkas pendaftaran, hingga pengkajian oleh TACB sebelum akhirnya disidangkan dan direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai cagar budaya beserta pemeringkatannya. Pada tahun 2024, target penetapan ditetapkan sebanyak 2 cagar budaya baru yang akan mendapat status resmi dan perlindungan hukum.

Dalam upaya memajukan bahasa, aksara, dan sastra Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan berhasil mencapai target peningkatan sebesar 5% pada tahun 2024. Capaian ini terwujud melalui berbagai event seni dan budaya yang telah menjadi agenda tahunan, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), Bulan Bahasa Bali, Festival Seni Bali Jani, Jantra Tradisi Bali, Warisan Budaya Takbenda (WBTD), Penghargaan Seni, serta berbagai kegiatan lainnya. Event-event ini tidak hanya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan lokal tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal, memahami, dan mencintai bahasa serta aksara Bali.

Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang berlangsung selama satu bulan penuh setiap tahunnya menjadi momentum penting dalam pelestarian dan pengembangan bahasa Bali. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa se-Bali. Sejumlah kegiatan inovatif diadakan, seperti festival menulis lontar massal, lomba komik online berbasis bahasa, aksara, dan sastra Bali, lomba pembuatan meme dalam bahasa Bali, serta berbagai lomba lainnya yang menarik minat generasi muda untuk lebih dekat dengan budaya mereka. Pada tahun ini, lomba Utsawa Dharmagita tingkat nasional ke-XV diselenggarakan di Solo, Jawa Tengah, dari tanggal 8

hingga 11 Juli 2024. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Bali untuk menunjukkan kekayaan seni dan sastra daerahnya serta berkompetisi dengan peserta dari berbagai provinsi lainnya.

Selain itu terdapat Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, diantaranya seperti Penghargaan Adi Sewaka Nugraha diselenggarakan melalui serangkaian tahapan sejak Februari hingga Juli 2024, dengan puncak penyerahan piagam dan hadiah pada penutupan Pesta Kesenian Bali yang berlangsung pada Sabtu, 13 Juli 2024. Sementara itu, penghargaan Dharma Kusuma diberikan kepada individu dan kelompok yang berjasa dalam bidang seni dan budaya, dengan tahapan seleksi yang dimulai pada Februari dan penganugerahannya bertepatan dengan Apel Hari Jadi Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Agustus 2024, menjadikannya momen penghormatan bagi para seniman yang telah berkontribusi besar dalam pemajuan budaya.

Selain itu, penghargaan Bali Jani Nugraha yang berfokus pada inovasi seni kontemporer dan modern diberikan melalui proses penilaian yang ketat dan objektif. Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam acara penutupan Festival Seni Bali Jani pada Selasa, 20 Agustus 2024. Sedangkan penghargaan Kerthi Bhuwana Sandhi Nugraha, yang ditujukan untuk individu atau kelompok yang memiliki dedikasi luar biasa dalam pelestarian lingkungan budaya, telah melalui tahapan seleksi sejak Oktober hingga Desember 2024, dengan penganugerahan resmi dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024.

Di sisi lain, penghargaan Parama Bhakti Budaya, yang merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Pemerintah Provinsi Bali dalam bidang kebudayaan, diberikan melalui penunjukan langsung oleh Gubernur Bali melalui Dinas Kebudayaan. Pada tahun 2024, penghargaan ini diserahkan sebanyak dua kali, yaitu pada penutupan Pesta Kesenian Bali dan penutupan Festival Seni Bali Jani.

11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Bali, terjadi peningkatan setiap tahun. Tahun 2019 IKLH sebesar 63,09, Tahun 2020 sebesar

71,98, Tahun 2021 sebesar 70,70, Tahun 2022 sebesar 70,89, Tahun 2023 sebesar 71,38 dan Tahun 2024 sebesar 75,02.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, di antaranya:

- 1) Pemantauan kualitas air dilaksanakan terhadap 3 sungai yaitu Tukad Jinah, Tukad Unda dan Tukad Melangit, masing-masing dilakukan pemantauan pada hulu, tengah dan hilir sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil pengukuran pemantauan kualitas air berdasarkan data Status Mutu memenuhi yang disyaratkan untuk Kelas 2 di Tukad Jinah dan status cemar ringan di Tukad Melangit dan Tukad Unda.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan langsung dilakukan pada 15 perusahaan di Provinsi Bali.
- 3) Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup di 35 sekolah Adiwiyata dan 9 Kab/Kota.
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui gerakan kebersihan yang dilaksanakan di sekitar sungai, danau, pantai, dan mangrove.
- 5) Meningkatkan pengawasan perusahaan terhadap persetujuan lingkungan yang telah diberikan rekomendasi persetujuan lingkungan.
- 6) Melaksanakan verifikasi dan pendampingan bersama dengan Pemerintah Pusat dan Kab/Kota.

Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menurunkan emisi gas dan intensitas emisi rumah kaca dinyatakan melalui Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) tahun 2020. Berdasarkan RPRKD, Provinsi Bali menargetkan penurunan emisi sebesar 10,16% dari kondisi tanpa aksi (Business as Usual) pada Tahun 2021, yang akan dicapai melalui kegiatan pembangunan rendah karbon pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah domestik dan kelautan dan pesisir.

Pada sektor lahan, kegiatan pembangunan rendah karbon adalah rehabilitasi lahan, pertanian organik. Pada sektor energi, kegiatan pembangunan rendah karbon yang dilakukan adalah pengelolaan energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta efisiensi dan konservasi energi. Pada sektor pengelolaan limbah adalah pengelolaan sampah rumah tangga, sementara untuk

sektor kelautan dan pesisir adalah rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, mitigasi, dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, diantaranya:

- 1) Pembinaan penyusunan dokumen inventarisasi emisi GRK kepada 9 Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi data sumber emisi gas rumah kaca meliputi pengumpulan data, penginputan data ke platform SIGNSMART, verifikasi, analisis, dan evaluasi data Inventarisasi Emisi GRK. Pengumpulan data meliputi sektor energi, IPPU, lahan, limbah, pertanian dan peternakan;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kegiatan verifikasi lapangan Program Kampung Iklim (ProKlim). Bekerja sama dengan Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, melaksanakan verifikasi lapangan untuk ProKlim Kategori Utama dilaksanakan pada 16 desa baik secara offline dan online. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan meliputi kegiatan penilaian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada sektor konservasi air, konservasi lahan, konservasi flora fauna, pertanian organik, pengelolaan limbah dan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Lestari Tahun 2024 sebanyak 1 desa dan Penerima Penghargaan Sertifikat ProKlim Utama sebanyak 12 desa, Penerima Piagam Partisipasi ProKlim Kategori Madya sebanyak 31 desa dan Penerima Piagam Partisipasi ProKlim Kategori Pratama sebanyak 9 desa;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi data pendukung, meliputi dampak perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta penginputan data ke Aplikasi SIDIK;
- 5) Fasilitasi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim oleh KLHK;
- 6) Kolaborasi pemerintah dan shareholder dengan meningkatkan jumlah angkutan umum (public transport) dan menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT);

- 7) Meningkatkan pengelolaan limbah padat (sampah) berbasis sumber melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).

12. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah

Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah di Bali pada tahun 2024 merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang di Bali sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengoptimalkan potensi wilayah secara efisien tanpa merusak keseimbangan lingkungan dan sosial. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai kesesuaian peruntukan ruang wilayah di Bali pada tahun 2024:

- 1) Penyusunan dan Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih komprehensif dan sesuai dengan pembagian zona yang jelas, termasuk zona pertanian, zona perumahan, zona pariwisata, zona industri, dan sebagainya.
- 2) Penerapan RTRW juga dilengkapi dengan regulasi dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar aturan yang ada.
- 3) Menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan memperkenalkan kebijakan zonasi wisata yang lebih terstruktur, mengarahkan pengembangan pariwisata ke daerah-daerah tertentu untuk menghindari penumpukan wisatawan di satu kawasan saja.
- 4) Mendorong penggunaan konservasi lahan pertanian dan menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi ke sektor lain, seperti pemukiman atau komersial.
- 5) menjaga kawasan hijau dan hutan sebagai bagian dari kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memperbaiki kualitas udara serta menghindari kerusakan lingkungan.
- 6) Pembangunan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah Bali, baik di daerah pesisir maupun pedalaman untuk mendukung penggunaan ruang yang lebih merata di seluruh Bali.
- 7) Mendorong sektor swasta untuk berinvestasi di sektor-sektor yang sesuai dengan peruntukan ruang wilayah, seperti pariwisata berbasis

ekowisata atau industri ramah lingkungan, untuk menjaga kesesuaian ruang.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Bali berharap kesesuaian peruntukan ruang wilayah dapat tercapai, yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan, sosial, dan budaya Bali.

13. Meningkatnya penggunaan energi bersih

Pada tahun 2024, capaian Persentase Bauran EBT di Provinsi Bali masih sama dengan kondisi pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,45%, karena capaian 2024 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Capaian Persentase Bauran EBT tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,4%, akan tetapi capaian tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang telah tercapai sebesar 3,80%. Hal tersebut disebabkan karena adanya penurunan pemakaian biosolar yang signifikan.

Pada indikator Persentase EBT, secara Nasional Pemerintah Pusat menarget Persentase EBT sebesar 23%, dan capaian persentase EBT Provinsi Bali sebesar 2,45%, hanya 10,65% dari target Nasional. Perencanaan energi di Daerah Tengah berfokus pada pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi Daerah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14% hingga akhir tahun 2024. Pencapaian bauran EBT ini masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 23%.

Persentase penggunaan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia khususnya Bali masih jauh dari target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Keterbatasan infrastruktur untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau geotermal. Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan investasi yang besar, serta waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan dan menyelesaikan proyek-proyek tersebut.
- 2) Implementasi kebijakan dan regulasi dalam pengembangan EBT masih terfragmentasi dan seringkali tidak berjalan secepat yang diinginkan.

- 3) Jumlah tenaga kerja terampil untuk mengembangkan dan mengelola teknologi EBT masih terbatas, sehingga menghambat pengembangan sektor EBT.
- 4) Kurangnya insentif untuk sektor swasta. Meskipun ada beberapa insentif dari pemerintah untuk pengembangan EBT, sektor swasta mungkin merasa bahwa potensi keuntungan dari investasi energi terbarukan masih terbatas atau tidak sebanding dengan risikonya.

Beberapa kebijakan dan langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan pengembangan energi terbarukan antara lain:

- 1) Meluncurkan Program Bali Clean Energy sejak tahun 2019 yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- 2) Mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti solar (matahari), hidro, angin, dan biomassa sebagai bagian dari bauran energi;
- 3) Mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), baik dalam skala besar maupun kecil (misalnya panel surya di atap gedung dan rumah). Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong instalasi panel surya di sektor pariwisata, hotel, dan rumah tangga;
- 4) Mendukung pengembangan energi terbarukan dan penghematan energi, serta memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi energi bersih melalui Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Energi Terbarukan;
- 5) Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik. Bali juga berupaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di sektor industri dan perhotelan, dengan mengalihkan penggunaan energi ke sumber yang lebih ramah lingkungan;
- 6) Berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk mempromosikan solusi EBT serta kampanye pendidikan dan pelatihan tentang energi terbarukan dan keberlanjutan;
- 7) Menjalin kemitraan dengan berbagai negara untuk mendapatkan pembiayaan dan teknologi dalam pengembangan EBT serta menjadi tuan rumah bagi berbagai konferensi dan seminar internasional tentang keberlanjutan dan perubahan iklim.

14. Terkelolanya Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga

Pada tahun 2019, Bali menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan peraturan daerah untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Melalui Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pengurangan Sampah Plastik, berbagai sektor, mulai dari restoran, hotel, hingga tempat pariwisata diwajibkan menerapkan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, meliputi: larangan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik, dan kemasan plastik sekali pakai, penyediaan alternatif pengganti plastik, seperti kantong berbahan dasar kertas atau bahan yang dapat terurai, dan mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih banyak menggunakan produk ramah lingkungan dan mendaur ulang sampah.

Provinsi Bali juga menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, dimana poin utama dalam peraturan ini adalah masyarakat wajib memilah sampah menjadi sampah organik dan non-organik. Selain itu, Bali juga telah mengembangkan program bank sampah, di mana masyarakat dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, seperti plastik dan kertas, dan menukarkannya dengan uang atau barang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah dan daur ulang, serta mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Bali juga mengembangkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, salah satunya dengan Gerakan Bali Zero Waste. Pemerintah daerah juga mendorong pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan fasilitas waste-to-energy untuk mengubah sampah menjadi energi listrik, yang akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah (LSM) untuk mengedukasi masyarakat tentang cara-cara mengurangi sampah, memisahkan sampah, dan pentingnya keberlanjutan. Program-program seperti clean-up beach dan kampanye no plastic semakin banyak dilaksanakan untuk menyadarkan masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Bali.

15. Meningkatnya Kemandirian Desa Adat

Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali merupakan indikator strategis pemajuan masyarakat adat dalam RPD Provinsi Tahun 2024-2026 dengan tujuan Terwujudnya Kasukretan Desa Adat yang diukur dengan menggunakan formula Indeks Membangun Desa Adat yaitu jumlah desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali dikali 100%. Indeks Membangun Desa Adat ini merupakan cermin keberhasilan dan kemandirian Desa Adat yang merefleksikan keberhasilan Desa Adat dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat, dan Pembangunan Desa Adat.

Terwujudnya Kasukretan Desa Adat merupakan hasil/outcome dari kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dengan dukungan sasaran program tingkat bawahnya dengan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Adapun langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Adat adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Tata Kelola Keuangan Desa Adat guna mendukung peningkatan kualitas Prajuru MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan Prajuru Desa Adat serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali.
- 2) Kegiatan tersebut mampu mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali. Kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi kepada Prajuru Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan pengelola Baga Usaha Pradruwen Desa Adat (BUPDA) dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali.
- 3) Kegiatan sosialisasi dan pembinaan Penyuratan Awig-Awig dan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas Kertha Desa dalam penyelesaian masalah/wicara di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM Kertha Desa Adat.
- 4) Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan

dan pendampingan penataan kawasan Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan.

16. Meningkatnya pengembangan Budaya Spiritual di kalangan Masyarakat Bali

Indeks Pemajuan Tradisi pada Tahun 2024 tercapai sebesar 15 persen dengan tingkat tercapaian sebesar 100 persen. Nilai ini merupakan komposit dari Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra, Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan, serta Persentase Peningkatan Pembinaan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi yang diukur oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Persentase pemajuan bahasa aksara dan sastra, persentase peningkatan pemajuan kesenian dan tenaga kebudayaan, serta persentase peningkatan pembinaan masyarakat tentang sejarah dan tradisi menunjukkan capaian yang optimal, dengan masing-masing mencapai 5 persen. Sehingga menghasilkan Indeks Pemajuan Tradisi di Bali pada tahun 2024 sebesar 15 persen. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam menjaga dan meningkatkan aspek kebudayaan Bali secara konsisten.

Beberapa upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam memajukan tradisi Bali yaitu:

- 1) Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui sistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Pelestarian seni tari, musik gamelan, seni ukir, dan kerajinan tangan dilakukan melalui pengajaran di sekolah-sekolah, perguruan seni, maupun melalui generasi muda yang terlibat langsung dalam kegiatan budaya tersebut.
- 2) Menjaga kesakralan dan kekhusyukan dalam berbagai upacara agama seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, atau upacara adat lainnya, serta memberikan ruang bagi generasi muda untuk memahami dan mengikuti ajaran serta praktik agama tersebut.
- 3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui festival budaya, seminar, dan platform edukasi daring agar pembinaan lebih berkelanjutan.

- 4) Pembuatan Data Kebudayaan Terintegrasi (Ceraken Kebudayaan Bali).
- 5) Memperluas jangkauan program edukasi bahasa Bali di sekolah dan komunitas, serta memanfaatkan media digital untuk meningkatkan literasi bahasa aksara dan sastra Bali.
- 6) Mengembangkan program pelatihan berbasis teknologi dan memperluas akses bagi para pengrajin, seniman lokal, atau pelaku industri pariwisata yang mengangkat budaya Bali, seperti kerajinan tangan Bali, pakaian adat, hingga seni ukir untuk mendapatkan dukungan dalam berkarya.

17. Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali

Indeks Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali pada Tahun 2024 tercapai sebesar 71.36% telah mencapai target yang ditetapkan pada awal Tahun 2024 sebesar 65% dengan Tingkat tercapaian sebesar 109.78%, bila dibandingkan dengan ketercapaian target di akhir RPD sebesar 67% Tingkat ketercapaian sebesar 106.50% dengan kategori capaian kinerja “sangat baik”. Berikut gambaran ketercapaian target pada tahun 2024.

Bila dibandingkan dengan capaian Nasional pada Tahun 2024, Indeks Pemajuan Kebudayaan sebesar 55,13%, Indeks Pemajuan Kebudayaan Bali lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan menempati peringkat 1 (satu) dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi seluruh Indonesia. Berikut disampaikan perbandingan Nilai per Dimensi Indeks Pemajuan Kebudayaan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Capaian Nasional.

Adapun langkah dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan Pemajuan Kebudayaan antara lain:

- 1) Perlindungan terhadap situs-situs budaya: Pemerintah memberikan perhatian khusus pada perlindungan dan pemeliharaan situs-situs budaya dan cagar budaya di Bali, seperti Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan Pura Ulun Danu Beratan, serta berbagai bangunan bersejarah yang merupakan bagian dari identitas budaya Bali.
- 2) Pemeliharaan upacara adat: Kebijakan ini mendukung pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan Bali, seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati, serta mendukung pemeliharaan tradisi-tradisi tersebut melalui pembiayaan dan organisasi acara adat.
- 3) Perlindungan seni tradisional Bali: Pemerintah provinsi mendorong pelestarian seni tradisional Bali, seperti tari Bali, musik gamelan, dan

seni ukir. Program pelatihan dan pendidikan seni untuk generasi muda juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini.

- 4) Integrasi kebudayaan dalam kurikulum pendidikan: Kebijakan ini memastikan bahwa pelajaran tentang seni, tari, musik, dan bahasa Bali dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Bali, sehingga generasi muda dapat mengenal dan menguasai nilai-nilai budaya Bali sejak dini.
- 5) Pendidikan seni dan budaya: Pemerintah Provinsi Bali menyediakan fasilitas pendidikan seni di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi untuk mengajarkan seni tradisional Bali. Selain itu, lembaga seni tradisional seperti Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar turut mendukung pelestarian budaya Bali.
- 6) Program pelatihan seni: Pemerintah juga mendukung program pelatihan seni, termasuk dalam bidang tari, musik gamelan, dan seni rupa, bagi anak-anak dan remaja yang berminat untuk melanjutkan tradisi budaya Bali.
- 7) Festival budaya: Bali memiliki berbagai festival budaya, seperti Pesta Kesenian Bali yang diselenggarakan setiap tahun, di mana berbagai jenis seni budaya Bali ditampilkan. Festival ini menjadi platform untuk menunjukkan keberagaman seni dan budaya Bali serta menarik wisatawan domestik dan internasional.
- 8) Partisipasi dalam event internasional: Bali juga aktif berpartisipasi dalam berbagai event internasional, baik di bidang seni, budaya, maupun pariwisata, untuk mempromosikan seni tradisional Bali ke dunia internasional. Event seperti Bali Arts Festival menjadi ajang penting untuk memperkenalkan seni Bali kepada audiens global.
- 9) Digitalisasi budaya Bali: Pemerintah Bali juga mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan mempromosikan budaya Bali. Ini termasuk pengarsipan dan publikasi karya seni, upacara adat, dan ritual keagamaan Bali dalam bentuk digital untuk mempermudah akses bagi generasi muda maupun masyarakat internasional.

18. Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah serta mitigasi perubahan iklim

Provinsi Bali secara aktif berupaya meningkatkan indeks hijau sebagai bagian dari transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tema "Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera"

dalam penyusunan APBD Semesta Berencana 2025, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Selain itu, untuk mendukung penerapan bangunan hijau, pemerintah telah menyusun Pedoman Teknis untuk Bangunan Gedung. Pedoman ini bertujuan mendorong penerapan bangunan hijau yang lebih luas dan terukur di Provinsi Bali, sebagai upaya penurunan emisi karbon di sektor bangunan.

Indeks Provinsi Hijau (IPH) Provinsi Bali pada Tahun 2024 tercapai sebesar 72,36% telah mencapai target yang ditetapkan pada awal Tahun 2024 sebesar 67,57% dengan Tingkat tercapaian sebesar 107,09%, bila dibandingkan dengan ketercapaian target di akhir RPD sebesar 80,72% tingkat ketercapaian sebesar 89.64% dengan katagori capaian kinerja “sangat baik”.

Untuk mencapai kinerja yang akan diraih, segala upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Bali antara lain :

- 1) Pemantauan kualitas air sungai dan laut tersebut bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pencemar di sungai dan laut di Provinsi Bali. Dilaksanakan dengan pengambilan parameter air pada 3 sungai yakni Tukad Jinah, Tukad Unda dan Tukad Melangit masing-masing sebanyak di 3 titik pengambilan sampel (titik hulu, tengah dan hilir) sebanyak 2 kali dalam setahun yang mewakili musim hujan dan musim kemarau, dengan parameter yang dipantau meliputi: pH, TSS, BOD, COD, DO Nitrat, Total Fospat, dan Fecal Coliform. Dari hasil pengukuran diperoleh hasil;
- 2) Status Mutu Air pada aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), berdasarkan kelas air badan air Kelas 2 (merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut), sedangkan pada Tukad Melangit dan Tukad Unda memperoleh hasil cemar ringan;
- 3) Pemerintah Provinsi Bali berkewajiban untuk menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Air Limbah dan Emisi. Persetujuan teknis yang telah diterbitkan Tahun 2024 sebanyak 10 perusahaan;
- 4) Pemasangan alat pemantau kualitas udara ambien passive sampler di 9 Kabupaten/Kota se-Bali sebanyak 4 lokasi/titik pemasangan yang

mewakili kawasan industri, perkantoran, pemukiman, dan kawasan padat transportasi. Parameter yang dipantau dalam pengujian kualitas udara passive sampler ini antara lain parameter NO₂ dan SO₂;

- 5) Pelaksanaan inventarisasi data sumber emisi gas rumah kaca meliputi pengumpulan data, penginputan data ke platform SIGNSMART, verifikasi, analisis, dan evaluasi data Inventarisasi Emisi GRK;
- 6) Pelaksanaan Uji Profisiensi dari Fera Science Ltd (FERA), dengan 13 parameter yaitu: Cd, Cr total, Cu, Fe, Pb, Mn, Zn, pH, kekeruhan, DHL, nitrat, nitrit, DO dan lain-lain.

19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi

Pada tahun 2024, Provinsi Bali mengalami perkembangan signifikan dalam sektor infrastruktur. Salah satu proyek utama adalah pembangunan system transportasi massal, yaitu Bali Urban Subway, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melanjutkan pembangunan jalan nasional non-tol di Bali. Dengan panjang total 587 km, 99% jalan nasional di Bali berada dalam kondisi mantap. Pada tahun 2024, beberapa paket pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk pemeliharaan rutin, terus dilaksanakan untuk menjaga kualitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi di wilayah tersebut.

Pada tahun 2024, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas infrastruktur. Berdasarkan Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2023 yang dirilis pada Mei 2024, Indonesia menempati peringkat ke-27 dari 185 negara, menjadikannya sebagai negara dengan infrastruktur mutu terbaik di ASEAN.

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, persentase cakupan layanan air minum layak sebesar 91,50 persen, layanan air limbah sebesar 91,89 persen, dan persentase jalan dalam kondisi mantap capaiannya sebesar 81,16 persen. Adapun persentase listrik rumah tangga di Bali sebesar 81,99.

Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan indeks infrastruktur dapat dilihat dari beberapa langkah strategis untuk

memperbaiki dan mengembangkan berbagai sektor infrastruktur. Beberapa upaya tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah memperbaiki jalan utama dan infrastruktur jalan di daerah-daerah yang lebih terpencil untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bali.
- 2) Bekerja sama dengan PLN untuk penyediaan listrik yang lebih merata, termasuk di daerah terpencil. Ini termasuk pembangunan pembangkit listrik dan distribusi yang lebih efisien. Pemprov Bali juga mulai berfokus pada pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan energi angin, sesuai dengan komitmen Bali untuk menjadi provinsi yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat Bali terhadap air bersih melalui pembangunan sistem distribusi air bersih yang lebih efisien dan merata di daerah-daerah.
- 4) Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi untuk memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- 5) Fokus pada implementasi teknologi smart city, termasuk dalam pengelolaan lalu lintas, pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah kehidupan sehari-hari masyarakat.
- 6) Pemerintah juga berfokus pada pembangunan perumahan yang layak huni untuk masyarakat dengan harga terjangkau, termasuk penyediaan fasilitas dasar seperti jalan, saluran air, dan sanitasi di kawasan perumahan baru.
- 7) Pemprov Bali juga aktif mencari pendanaan, baik melalui alokasi anggaran dari pemerintah pusat, pinjaman luar negeri, maupun investasi sektor swasta, untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur besar.

20. Meningkatnya kualitas infrastruktur public

Adapun capaian kualitas layanan infrastruktur publik di Bali pada tahun 2024 sudah melampaui target dengan capaian 101,77 persen, dengan target 76,18 dan terealisasi sebesar 77,53.

Kualitas Infrastruktur Publik di Bali telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, Bali memerlukan infrastruktur yang baik

untuk melayani jutaan wisatawan dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai kualitas infrastruktur publik di Bali:

- 1) Bandara Internasional Ngurah Rai merupakan pintu gerbang utama Bali, yang terus mengalami peningkatan kapasitas dan fasilitas. Terminal baru yang modern dan pengembangan fasilitas seperti area parkir yang lebih luas membantu meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung domestik dan internasional.
- 2) Bali memiliki jaringan jalan yang cukup baik, terutama di daerah wisata utama seperti Denpasar, Ubud, Kuta, dan Seminyak. Namun, tantangan besar masih berupa kemacetan di beberapa area wisata. Pemerintah telah melakukan perbaikan dan perluasan jalan, termasuk proyek pengembangan jalan tol Mandara yang menghubungkan Denpasar dan Nusa Dua.
- 3) Bali Trans Sarbagita dan beberapa layanan shuttle telah ada untuk mendukung transportasi publik di Bali.
- 4) Bali memiliki sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cukup baik, terutama di daerah Denpasar dan kawasan wisata utama lainnya. RSUP Sanglah di Denpasar adalah rumah sakit rujukan utama di Bali, dengan fasilitas medis lengkap.
- 5) Infrastruktur pendidikan di Bali terus berkembang dengan berbagai sekolah dan universitas yang menawarkan fasilitas memadai. Bali juga memiliki banyak sekolah internasional yang melayani masyarakat ekspat dan wisatawan.
- 6) Pemerintah Bali juga berupaya untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti eco-resort, mengembangkan sejumlah pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem serta mempromosikan pariwisata berkelanjutan.

21. Meningkatnya konektivitas transportasi public

Pada tahun 2024, rasio konektivitas transportasi nasional ditargetkan mencapai 0,763, meningkat dari 0,730 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan memperluas jaringan transportasi di seluruh Indonesia, termasuk di Bali.

Untuk wilayah Bali, data spesifik mengenai rasio konektivitas transportasi tidak tersedia secara publik. Namun, pemerintah daerah telah mengidentifikasi pentingnya pengembangan jaringan transportasi untuk

meningkatkan konektivitas antarwilayah, seperti Bali Selatan, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur. Upaya ini meliputi pengembangan transportasi massal berbasis jalan raya dan rel, serta peningkatan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan transportasi di kawasan metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).

Selain itu, proyek Bali Urban Subway atau Moda Raya Terpadu (MRT) Bali sedang dalam tahap konstruksi untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas di wilayah Denpasar. Proyek ini mencakup dua jalur utama: Jalur 1 menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai ke Cemagi dan Jalur 2 menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai ke Nusa Dua. Kedua jalur ini direncanakan memiliki panjang total sekitar 29,5 km, dengan perkiraan biaya investasi mencapai sekitar US\$10,8 miliar. Proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2031.

Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Master Plan Transportasi Bali pada tahun 2023, yang diarahkan untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran utama, yakni Terintegrasi Antar Moda, Terkoneksi Antar Wilayah, Mewujudkan Bali Era Baru, melalui: Transportasi Untuk Semua, Transportasi Untuk Alam yang Lestari, dan Transportasi yang Berbudaya.

Semua Infrastruktur dan layanan transportasi yang beroperasi di Bali harus mampu melayani seluruh pergerakan kendaraan, orang dan barang yang terjadi di Bali, baik pergerakan keluar masuk Bali maupun pergerakan antar wilayah di dalam Pulau Bali.

Upaya mewujudkan “Transportasi Untuk Semua” dilakukan melalui peningkatan kuantitas atau jumlah infrastruktur transportasi, peningkatan integrasi antar moda dan peningkatan konektivitas wilayah. Beberapa infrastruktur yang akan menjadi prioritas penyelesaian dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

- 1) Pembangunan Bandara Bali Utara untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Bali Utara (mesin ekonomi baru & distribusi kue pariwisata). Selain itu untuk memperluas akses penerbangan ke wilayah Pasifik dan Asia.
- 2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sanur-Nusa Penida sebagai upaya peningkatan akses guna menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

- 3) Pembangunan Dermaga 3 Padangbai untuk mendukung jalur distribusi logistik nasional, menyeimbangkan jumlah dermaga di Pelabuhan Padangbai dan Pelabuhan Lembar, serta mendukung layanan angkutan barang ke Kawasan Kepulauan Nusa Penida.
- 4) Pembangunan Kereta Api Perkotaan sebagai upaya mewujudkan kehandalan sistem dan aksesibilitas bandara terhadap transportasi umum menuju destinasi/akomodasi pariwisata.
- 5) Pembangunan Kereta Api Lintas Mengwitani-Singaraja sebagai upaya peningkatan akses ke Bali Utara.

“Transportasi Untuk Alam yang Lestari” mengandung makna bahwa semua kebijakan, pembangunan infrastruktur maupun layanan transportasi yang beroperasi di Bali harus ramah lingkungan dan seminimal mungkin berdampak pada kerusakan alam dan situs bersejarah, termasuk tempat-tempat persembahyangan umat. Beberapa kebijakan yang akan menjadi prioritas untuk diimplementasikan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah:

- 1) Kebijakan Operasional Kendaraan Listrik. Melalui Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Bali untuk menggunakan kendaraan umum atau kendaraan bermotor listrik setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2024 dan bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta mendukung target Bali menuju emisi nol bersih pada tahun 2045.
- 2) Pengembangan Angkutan Umum Trans Sarbagita guna mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi.

Adapun yang terakhir “Transportasi yang Berbudaya”, adalah transportasi yang mampu memberikan layanan yang “berkualitas” bagi pengguna jasanya. Dengan demikian, layanan transportasi tidak semata-mata tersedia, tetapi memberikan kepuasan kepada para pengguna jasa, baik dari aspek keamanan, keselamatan maupun kenyamanan layanan. Selain itu, Transportasi yang Berbudaya juga mengandung makna pelibatan komunitas lokal dalam penyediaan layanan transportasi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemprov Bali antara lain:

- 1) Penerapan standarisasi dan legalitas layanan angkutan dengan pertimbangan pentingnya memberikan kepastian layanan baik dari aspek legalitas maupun aspek standarisasi layanan angkutan umum.

- 2) Penataan angkutan berbasis pangkalan. Kebijakan ini digagas dengan pertimbangan bahwa sebagai kawasan wisata yang mengandalkan kearifan lokal, penyediaan layanan transportasi di Bali perlu melibatkan komunitas lokal, khususnya di kawasan-kawasan wisata.
- 3) Pengembangan SMART TRANSPORTASI. Kebijakan ini digagas dengan pertimbangan bahwa sebagai pusat kunjungan wisata dunia dan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional, pengelolaan infrastruktur dan layanan transportasi perlu diarahkan untuk mewujudkan efisiensi pergerakan dan efektifitas layanan, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan cerdas dalam berbagai aspek transportasi.

22. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali pada Tahun 2024 sangat baik, yaitu sebesar 106,11 persen. Dengan realisasi sebesar 84,73 persen dari target 79,85 persen. Nilai ini bahkan sudah melampaui capaian akhir tahun RPD 2024-2026.

Pada tahun 2024, Pemprov Bali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan TIK dengan berbagai langkah konkret yang meliputi pengembangan infrastruktur, penerapan teknologi dalam sektor publik, peningkatan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk sektor pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di Bali, meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, serta memberikan akses lebih luas kepada masyarakat Bali dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Bali untuk meningkatkan kualitas layanan TIK, antara lain:

- 1) Pengembangan Infrastruktur TIK yang merata dengan memperluas jangkauan jaringan fiber optik ke daerah-daerah terpencil di Bali. Ini akan mempercepat konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
- 2) Mendorong pengembangan kawasan smart city di beberapa daerah seperti Denpasar, Ubud, dan Sanur dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, pengelolaan lalu lintas, hingga pengelolaan energi dan sumber daya alam.

- 3) Program Bali 4.0: Inisiatif ini mencakup pengembangan infrastruktur digital yang lebih modern untuk mendukung transformasi digital di seluruh sektor, baik di pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat.
- 4) Peningkatan sistem layanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik, seperti pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, pelayanan kesehatan, layanan pariwisata, dan lain-lain.
- 5) Pengadaan layanan internet IP transit internasional pada Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali adalah sebesar 4 Gbps dan digunakan untuk pelayanan internet yang terintegrasi untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali.
- 6) Layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se-Bali dengan bandwidth yang dialokasikan untuk setiap titik adalah sebesar 50 mbps.
- 7) Layanan BKK Wifi gratis bagi desa adat, objek wisata, dan puskesmas pada 2.118 titik layanan wifi untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali.
- 8) Pelaksanaan Literasi Digital Tahun 2024 dilaksanakan dengan berkolaborasi dan melibatkan komunitas maupun Lembaga Masyarakat yang aktif bergerak dibidang penanganan HOAX serta Literasi Digital seperti RTIK Provinsi Bali dan MAFINDO Wilayah Bali.
- 9) Penetapan SK Roadmap SPBE Provinsi Bali dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.
- 10) Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi "Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali".

23. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Di tingkat nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai bagian

dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan trantibum. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, target indeks ini ditetapkan lebih dari 65, dan tercapai angka 85,36. Capaian Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Bali pada Tahun 2024 sangat baik, yaitu sebesar 137,92 persen. Dengan realisasi sebesar 59,90 dari target 96,50.

Bali mendapat apresiasi sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Ketertiban Umum yang baik di Indonesia, dengan seluruh aspek penilaian berada di atas 70. Meski masih kerap dijumpai kemacetan, indeks ketertiban di Bali masih tergolong paling tinggi di Indonesia. Sembari terus mengembangkan budaya tertib, Bali akan menjadi role model atau percontohan Gerakan Indonesia Tertib.

Bali memiliki modal budaya yang melekat dalam keseharian masyarakatnya seperti desa adat dan pecalang untuk membangun budaya ketertiban, tertib berlalu lintas, tertib administrasi kependudukan, dan tertib mengantre di ruang publik, dan sebagainya. Ada pula kearifan lokal Tri Hita Karana, yakni bagaimana menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Berikut adalah beberapa langkah konkret yang diambil oleh Pemprov Bali untuk mencapai tujuan tersebut:

- 1) Pemprov Bali juga bekerja sama dengan pecalang (petugas keamanan adat Bali) dan komunitas lokal untuk meningkatkan rasa aman di tingkat desa. Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta melaksanakan aturan adat yang berlaku di Bali, khususnya dalam menjaga keamanan selama upacara adat dan acara budaya.
- 2) Memperkuat keamanan di destinasi wisata dengan meningkatkan jumlah personel keamanan di tempat-tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, seperti Pantai Kuta, Ubud, dan Sanur. Penambahan patroli rutin dan pengawasan menggunakan kamera pengawas (CCTV) di kawasan wisata menjadi prioritas.
- 3) Membentuk Polisi Pariwisata dan Tim Reaksi Cepat untuk keamanan wisatawan yang terdiri dari petugas keamanan, tenaga medis, dan pemandu wisata yang siap memberikan bantuan segera kepada wisatawan yang membutuhkan, baik dalam hal keamanan, kesehatan, maupun informasi penting lainnya.

- 4) Sistem pelaporan darurat berbasis teknologi melalui aplikasi "Bali Safety" yang memungkinkan wisatawan dan masyarakat lokal melaporkan kejadian darurat atau situasi mencurigakan secara langsung kepada pihak berwenang, mempermudah respon cepat dari aparat keamanan.
- 5) Peningkatan keamanan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berupa pelatihan-pelatihan dan pelaksanaan patroli malam terutama di area wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan pada malam hari.

Pada tahun 2024, capaian IRB Provinsi Bali sudah melampaui target dengan capaian sebesar 103,35%. Capaian ini menurun sebanyak 8,93 poin dari tahun 2023.

Nilai Indeks Risiko Bencana di Bali terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yang berarti risiko bencana berkurang, mitigasi bencana yang efektif, kesiapsiagaan yang meningkat, peningkatan kapasitas daerah yang lebih tinggi untuk menghadapi bencana. Walaupun sempat tidak mencapai target pada tahun 2022 dan 2023, namun trend indeks Risiko Bencana di Provinsi Bali terus mengalami penurunan. Dimana semakin kecil IRB berarti semakin baik.

BPBD Provinsi Bali telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penanggulangan bencana dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya penanggulangan bencana yang ada, seperti :

- 1) TRC (Tim Reaksi Cepat) bertambah kompetensi pengetahuan penanggulangan bencana dalam merespon setiap kejadian bencana yang terjadi secara cepat.
- 2) Pusat pelayanan data dan Informasi kebencanaan dan Crisis Centre yang siap siaga 1 x 24 Jam dengan aparaturnya yang mampu mengaplikasikan teknologi pengelolaan data dan informasi peringatan dini kebencanaan dengan cepat kepada masyarakat.
- 3) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 4) Logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 5) Adanya Menara Bali Tsunami Early Warning System yang sudah terpasang di 9 titik lokasi rawan Tsunami yaitu di Tanah Lot Kabupaten Tabanan, Seminyak, Kuta, Kedonganan, BTDC dan Tanjung Benoa

- Kabupaten Badung, Serangan dan Sanur Kota Denpasar serta Seririt Kabupaten Buleleng dan sarana prasana pendukung BPBD lainnya.
- 6) Adanya sistem peringatan Longsor dan sistem peringatan sirine Gunung api Gunung Agung.
 - 7) Adanya layanan data/informasi kebencanaan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) yang selalu terupdate bersama Kabupaten/Kota se-Bali.
 - 8) Adanya kerjasama dengan multipihak sehingga banyak kegiatan yang bisa dibantu oleh anggaran dari bukan APBD.

24. Meningkatkan kehidupan demokrasi masyarakat

Secara keseluruhan, tahun 2024 menandai peningkatan signifikan dalam kehidupan demokrasi di Bali, ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat, keterlibatan berbagai institusi dalam proses demokrasi, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta praktik demokrasi yang inklusif dan harmonis. Terlihat dari capaian indeks demokrasi yang mencapai 112%, dengan realisasi 85,13 poin dari target 76. Nilai ini meningkat 1,92 poin dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 83,21.

Pada Juni 2024, Bali memiliki indeks demokrasi sebesar 85,13, yang merupakan provinsi dengan tingkat demokrasi tertinggi di Indonesia, bahkan melampaui capaian nasional yang mencapai sebesar 77,68, yang masih berada dalam kategori "sedang". DKI Jakarta menyusul di urutan kedua dengan indeks demokrasi sebesar 84,57. Baik Bali maupun Jakarta sama-sama mengalami peningkatan indeks demokrasi sejak 2 tahun terakhir.

Peningkatan capaian nilai indeks demokrasi Provinsi Bali Tahun 2024 tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik.

Pada Tahun 2024 sudah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) IDI untuk mendukung peningkatan dari capaian IDI di Tahun 2024. Serta telah dilaksanakannya pendidikan politik masyarakat

khususnya pemilih pemula yang menjadi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, baik secara daring melalui sosial media dan pelaksanaan secara luring/konvensional dengan kehadiran peserta. Pelaksanaan pendidikan politik tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat mengenai politik yang tidak hanya terbatas pada saat masyarakat menggunakan hak pilihnya pada bilik suara. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2024.

25. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2024 terealisasi 93,46 dari target yang diperjanjikan 74,00, dengan ketercapaian 126,29%. Evaluasi Reformasi Birokrasi dibagi 2 penilaian, yaitu Reformasi General dan Reformasi Tematik sesuai dengan Permenpan & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh nilai RB General 81,11, meningkat dari sebelumnya 75,94 di Tahun 2023. Sedangkan di RB Tematik terdapat penurunan dari sebelumnya 15,47 menjadi 12,35 di Tahun 2024.

Guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemprov Bali, yaitu:

- 1) Digitalisasi layanan publik terhadap berbagai layanan pemerintah. Menurut Diskominfo Provinsi Bali, aplikasi yang dibangun/dikembangkan dari periode 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 62 aplikasi untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- 2) Penyederhanaan Prosedur Birokrasi berupa One Stop Service (OSS) dan berbagai sistem terintegrasi lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan administrasi.
- 3) Penguatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN dengan mengadakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi melalui mekanisme pembelajaran blended melalui Kerthi Bali Sejahtera

- Corporate University (CORPU), Serial webinar dan dimana di tahun 2024 telah dikeluarkan 33.951 sertifikat pengembangan kompetensi.
- 4) Penguatan sistem whistleblowing dan laporan harta kekayaan untuk mencegah korupsi dalam birokrasi.
 - 5) Pencegahan dan penanganan stunting melalui pembiayaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas untuk pemberian tambahan asupan pangan lokal pada balita bermasalah gizi serta ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK).
 - 6) Menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2024 dengan menitikberatkan pada hasil LHE Reformasi Birokrasi yang dievaluasi pada Tahun 2023;
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara maksimal dengan memaparkan langsung ketercapaian secara triwulan di depan Bapak Gubernur Bali;
 - 8) Melaksanakan pendampingan terhadap penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan pada RB Tematik Pemerintah Provinsi Bali sehingga RB Tematik dapat berdampak pada masyarakat Provinsi Bali;
 - 9) Menyusun Aplikasi Pemantauan Pencapaian Renaksi yang dapat dipantau langsung oleh Gubernur.

26. Meningkatkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 190/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan bahwa penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali ditetapkan, pada Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 386,5 (tiga ratus delapan puluh enam koma lima), dan Indeks 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat). Capaian ini juga telah melewati target yang ditetapkan pada akhir tahun RPD 2024-2026.

Tahun 2024 perolehan nilai sistem merit Pemerintah Provinsi Bali (BKPSDM) mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 386,5 (tiga ratus delapan puluh enam koma lima) berada di bawah Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik), dengan Nilai 400 (empat ratus). Namun Provinsi Bali masih unggul dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan Kategori IV (Sangat Baik) dengan nilai 383 (tiga ratus delapan puluh tiga).

Perolehan nilai sistem merit Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memperoleh nilai 390 (tiga ratus sembilan puluh) dengan kategori IV (Sangat Baik) lebih unggul dibandingkan Provinsi Bali. Sedangkan jika dibandingkan dengan BKN dengan nilai 380 (tiga ratus delapan puluh) dan kategori IV (Sangat Baik), Provinsi Bali masih lebih unggul.

Sebagai wujud penerapan sistem merit yang sangat baik, Pemerintah Provinsi Bali (BKPSDM) menjadi salah satu dari 22 Instansi Pemerintah yang telah disetujui untuk mengisi JPT melalui Talent Pool,

Pemilihan pembinaan kader potensial (talent pool) terjaring melalui kegiatan assessment pegawai. Pada Tahun 2024, BKPSDM telah melaksanakan assessment baik dari peserta internal maupun eksternal dengan total peserta 1.161 orang.

Perubahan lingkungan strategis saat ini masuk dalam ranah digital (arus revolusi industri 4.0) yang memaksa adaptasi pada sistem pemerintahan menuju birokrasi digital, dimana setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus smart terhadap teknologi untuk meningkatkan Pelayanan Publik dan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Profil smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Maka dari pada itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan pelatihan.

Dalam rangka mengakselerasi pemenuhan hak pengembangan kompetensi ASN 20JP setiap tahunnya telah dilaksanakan pengembangan kompetensi melalui mekanisme pembelajaran blended melalui Kerthi Bali Sejahtera Corporate University, Serial webinar dan kerjasama dimana di tahun 2024 telah dikeluarkan 33.951 sertifikat pengembangan kompetensi.

Pada Tahun 2024 BKPSDM memperoleh penghargaan dari LAN RI sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk Menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK II dengan Kategori Akreditasi B dan Masa Berlaku 3 (Tiga) Tahun.

27. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur dan menilai sejauh mana kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan program pemerintah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pemprov Bali meraih predikat BB dalam evaluasi SAKIP tahun 2024, yang mencerminkan pengelolaan kinerja sudah cukup baik. Terdapat penurunan nilai sebanyak 0,21 poin dari sebelumnya di tahun 2023 memperoleh nilai 79,20 turun menjadi 78,99 pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 juga belum melampaui target 2024 yaitu sebesar 81, dengan persentase capaian sebesar 97,51%.

Capaian ini tidak terlepas dari turunnya nilai AKIP di 2 kabupaten yang ada di Bali, yaitu Gianyar dan Bangli. Penurunan nilai AKIP paling tajam terjadi di Gianyar yaitu sebanyak 5,82 poin, dari sebelumnya memperoleh nilai 67,67 pada tahun 2023 menjadi 61,85 pada tahun 2024.

Menurut MenPAN & RB, rata-rata nilai SAKIP Pemerintah Kab/Kota pada 2024 sebesar 64,23 atau mengalami peningkatan 0,18 poin dari 2023. Sementara itu, rata-rata nilai SAKIP Pemerintah Provinsi 2024 adalah 70,75, sedikit mengalami penurunan yakni 1,42 poin dari 2023. Penurunan itu disebabkan adanya tambahan dua provinsi baru yang dievaluasi. Walaupun mengalami penurunan, capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi Bali sebesar 78,99 masih melampaui dari rata-rata nasional yaitu 70,75.

Dalam mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan kualitas SAKIP antara lain:

- 1) Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan perangkat daerah khusus antara Renstra dan PK;
- 2) Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level pusat dan unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART, cukup, dan memiliki formulasi perhitungan dan penetapan sumber data yang sesuai untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;
- 3) Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;

- 4) Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam Laporan Kinerja PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang dimiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya, dan
- 5) Melakukan monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan secara lebih mendalam untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan oleh pengawas internal sudah ditindakjuti oleh unit kerja.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke- 11 kalinya berturut-turut, sejak tahun anggaran 2013 hingga 2023. Pencapaian opini WTP yang konsisten ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran ini dapat dicapai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada Perangkat Daerah untuk mengeliminir terjadinya temuan dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai yaitu pemberian opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

28. Meningkatkan kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 96,67% dari target sebesar 88,5 dan terealisasi sebesar 85,56. Nilai tersebut juga telah melampaui target akhir tahun RPD.

Sebagai tindak lanjut terhadap Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Bali mengeluarkan Surat Nomor : B.43.000.8.3.4/9157/TLK/B.ORG, Tanggal 23 Februari 2024, Hal : Permintaan Data Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, bahwa pelaporan SKM oleh seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali kepada

Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Selanjutnya, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah khususnya yang belum pernah melaksanakan SKM, serta mengingatkan seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait batas waktu pelaporan SKM. Selain itu, seluruh Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah juga telah mengikuti pembinaan dari Kementerian PANRB terkait kebijakan SKM yaitu Bimbingan Teknis dan Survei serentak. Adapun Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah mengikuti kegiatan dimaksud adalah Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan Riset dan Inovasi untuk mendukung pembangunan Bali dan mengelola kekayaan intelektual Bali, Pemerintah Provinsi Bali melalui BRIDA Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan pengembangan inovasi dan pengelolaan kekayaan Intelektual (KI), sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Bali pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 106,34% dari target sebesar 65,75 dan terealisasi sebesar 69,92. Nilai tersebut juga telah melampaui target akhir tahun RPD.

Dalam rangka mempertahankan kategori sangat inovatif dalam penyelenggaraan inovasi daerah di Provinsi Bali, jumlah inovasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah terus ditingkatkan. Sesuai Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali wajib mengusulkan sedikitnya 3 (tiga) inovasi. Terdapat 72 inovasi yang telah diusulkan di Tahun 2024, meningkat daripada tahun 2023 sebanyak 67 inovasi. Peningkatan jumlah inovasi yang berhasil diidentifikasi dan dinilai dalam Indeks Inovasi Daerah 2024 menunjukkan komitmen pemerintah daerah di Bali dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemprov Bali menerima penghargaan Provinsi Terinovatif dan Indeks Inovasi Tertinggi Regional IV pada Innovative Government Award

(IGA) 2024 di Surabaya oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemprov Bali mempresentasikan 15 inovasi unggulan, termasuk aplikasi Supermen Kuat, Simata, dan Saling Ketawa.

Selain itu dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yaitu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Pemerintah Provinsi Bali sehingga penguatan indeks inovasi daerah didukung pula dengan adanya Inisiatif Inovasi yang berasal dari Pj. Gubernur Bali, yakni: Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata Provinsi; Ngrombo; Subway Bali; Ekosistem Kedirgantaraan; dan Stasiun Transit dan Layanan Masyarakat Terpadu (Stranmast).

Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita pada Tahun 2024 sudah baik dengan capaian kinerja sebesar 99,28%. Nilai tersebut juga telah melampaui target akhir tahun RPD. Kinerja dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan adalah Indeks Kepuasan pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang ditarget sebesar 82.5%, dimana pada tahun 2022 Prosentase layanan yang baru dapat disediakan adalah sebesar 72,5%. Selain itu indikator lain yakni Load Factor penumpang juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan. Dengan faktor muat bus (Load Factor) yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah penumpang dan perkapasitas yang disediakan maka dapat dipantau efektivitas layanannya apakah naik atau turun. Dalam load faktor idealnya berada diatas 70%.

Berdasarkan hasil survey terhadap IKM dengan mengambil 9 unsur penilaian pada kedua koridor Trans Sarbagita bahwa dengan responden sebesar 110 orang diperoleh nilai IKM sebesar 81.91 yang Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan angkutan umum, khususnya Trans Sarbagita, guna mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil:

- 1) Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), untuk bekerja sama memperbaiki sistem transportasi di wilayah tersebut. Pj. Gubernur Bali bahkan mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia-Australia menunjukkan kinerja angkutan umum

Trans Sarbagita masih tergolong SEDANG sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan ketercapaian kinerja sangat baik sebesar 99,28%. Untuk Infrastruktur (KIAT) yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali, meliputi kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT), Uplan Mobility Plan, dan Kuta Circulator.

- 2) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Transportasi meliputi pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, pengadaan sarana transportasi, serta pembiayaan operasional layanan.
- 3) Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan melakukan evaluasi terhadap masukan masyarakat terkait layanan bus Trans Sarbagita, untuk menyesuaikan rute, jadwal, dan kualitas layanan agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 4) Pemerintah Provinsi Bali menerima hibah 10 unit bus listrik untuk Trans Sarbagita, yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung program transportasi ramah lingkungan.
- 5) Karena penghentian dana operasional Bus Trans Metro Dewata pada tahun 2025, bus Trans Sarbagita akan menggantikan sementara operasionalnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kontinuitas layanan transportasi publik di Bali.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk meningkatkan layanan angkutan umum, khususnya Trans Sarbagita, guna mengatasi kemacetan dan meningkatkan kualitas transportasi publik di wilayah tersebut.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah

Kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363).

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Provinsi Bali

Kementerian/Lembaga Pemerintah pada tahun 2024 yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Bali yaitu:

1. Kementerian Pertanian.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Kementerian Pariwisata.
4. Kementerian Perdagangan.
5. Kementerian Perindustrian.
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3.1.1 Target Kinerja

a. Kementerian Pertanian

Total Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada T.A 2024 adalah Rp. 15.272.177.000,00 dan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.13.029.908.566,00 (85,32%) dengan sisa anggaran Rp.2.242.268.434,00 (14,68%) dan realisasi fisik terealisasi 100%.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan tugas pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali untuk penanganan jalan dan irigasi. Tugas Pembantuan diberikan bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Pemerintah Pusat. Sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.042.134.000,00 dengan rincian SKPD-TP Sumber Daya Air sebesar Rp5.838.510.000,00 dan SKPD-TP Bina Marga Rp7.203.624.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp12.971.379.177 (99,5%) dan realisasi fisik 100%.

c. Kementerian Pariwisata

Total dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pariwisata Bali pada Tahun 2024 dari Kementerian Pariwisata sebesar Rp1.520.000.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.489.281.075,00 (97,98%) dan realisasi fisik 100%.

d. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan memberikan dana Tugas Pembantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp114.367.000,00. Realisasi

keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp72.061.900 (40,46%) dan realisasi fisik sebesar 60%.

e. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memberikan dana Tugas Pembantuan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebesar Rp1.234.201.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.154.170.550,00 (93,52%) dan realisasi fisik sebesar 98%.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Total Dana Tugas Pembantuan APBN yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2024 adalah Rp.2.298.281.000,00 dan realisasi keuangannya sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.1.755.669.973,00 (76,39%) dengan sisa anggaran Rp.542.611.027,00 (23,61%) dan realisasi fisik terealisasi 98,33%.

3.1.2 Realisasi

a. Kementerian Pertanian

1) Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan pagu anggaran Rp4.759.943.000,00 realisasi anggaran Rp4.416.567.657,00 (92,79%), sisa anggaran Rp343.375.343,00 (7,21%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

a) (5891) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak dengan pagu anggaran Rp487.500.000,00 realisasi anggaran Rp303.831.666,00 (62,32%), realisasi fisik 100%.

b) (1784) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan pagu Rp3.600.000.000,00 realisasi anggaran Rp3.600.000,00 (100%), realisasi fisik 100%.

c) (1785) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu Rp387.020.000,00 realisasi anggaran Rp387.020.000,00 (100%), realisasi fisik 100%.

d) (1787) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan pagu anggaran Rp285.423.000,00 realisasi anggaran Rp125.715.991,00 (44,04%), realisasi fisik 100%.

2) Tanaman Pangan. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp3.255.870.000,00 realisasi anggaran Rp2.903.141.856,00 (89,17%), sisa anggaran Rp352.728.144,00 (10,83%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp60.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.594.375,00 (99,32) realisasi fisik 100%.

- b) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan dengan pagu Rp680.000.000,00 realisasi anggaran Rp619.010.100,00 (91,03%), realisasi fisik 100%.
 - c) Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp2.028.000.000,00 realisasi anggaran Rp2.021.874.500,00 (99,69%),realisasi fisik 100%.
 - d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan pagu anggaran Rp487.870.000,00 realisasi anggaran Rp202.662.881,00 (41,54%),realisasi fisik 100%.
- 3) Hortikultura. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura dengan pagu anggaran Rp820.000.000,00 realisasi anggaran Rp813.458.418,00 (99,20%), sisa anggaran Rp6.541.582,00 (0,8%), realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan pagu anggaran Rp700.000.000,00 realisasi anggaran Rp700.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%.
 - b) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura dengan pagu anggaran Rp120.000.000,00 realisasi keuangan Rp118.899.218,00 (99,08%), realisasi fisik 100%.
- 4) Perkebunan. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan pagu anggaran Rp3.367.217.000,00 sedangkan realisasi anggaran Rp2.782.137.480,00 (82,62%), dan sisa dana Rp585.079.520,00 (17,38%). realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan pagu anggaran Rp969.795.000.000,00 realisasi anggaran Rp959.798.275,00 (99,31%), realisasi fisik 100%.
 - b) Pasca Panen, Pengolahan (hilirisasi) dan pemasaran Hasil Perkebunan dengan pagu anggaran Rp1.795.200.000,00 dan realisasi Rp1.289.480.809 (71,82%), realisasi fisik 100%
 - c) Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan pagu anggaran Rp453.222.000,00 dan realisasi Rp408.522.578.000,00 (90,13%), realisasi fisik 100%.
 - d) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan dengan pagu anggaran Rp149.000.000,00 dan realisasi Rp124.335.818,00 (83,45%) realisasi fisik 100%.
- 5) Prasarana dan Sarana Pertanian. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Pagu Keseluruhan Rp3.069.147.000.000,00 Realisasi Anggaran Rp2.114.603.155,00 (68,90%) dan

sisanya Rp954.543.845,00 (31,10%). Realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan pagu anggaran Rp1.807.567.000,00 realisasi anggaran Rp1.783.908.550,00 (98,19%), realisasi fisik 100%, realisasi fisik 100%.
- b) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan pagu anggaran Rp.265.000.000,00 realisasi anggaran Rp.263.435.605,00 (64,71%), realisasi fisik 100%, dengan realisasi fisik 100%
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pagu anggaran Rp.996.580.000,00 realisasi anggaran Rp.67.259.000,00 (3,33%), realisasi fisik 100%.

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Program Ketahanan Sumber Daya Air. Program Ketahanan Sumber Daya Air dan Program Dukungan Manajemen bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi dengan tetap menjaga agar sarana dan prasarana irigasi dalam kondisi baik. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Ketahanan Sumber Daya Air adalah:
 - a) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana melakukan operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi Tukad Ayung untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi;
 - b) Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air merupakan dukungan administrasi dalam rangka mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan.
- 2) Program Penyelenggaraan Jalan. Program Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas jalan dalam kondisi mantap. Target kinerja program ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang mendukung Program Penyelenggaraan Jalan adalah: Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dilaksanakan bertujuan untuk merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas jalan nasional lintas provinsi serta melakukan pemeliharaan rutin dan berkala ruas-ruas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap jalan dan jembatan seperti drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan. Target kinerja kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

c. Kementerian Pariwisata

- 1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran Rp1.520.000.000,00 realisasi anggaran Rp1.489.281.075,00 (97,98%), sisa anggaran Rp30.718.925,00 realisasi fisik 100% dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata Berbasis Kompetensi) dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp195.625.669,00 (99,21%) dan realisasi fisik 100%.
 - b) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Bali) dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp195.635.735,00 (94,55%) dan realisasi fisik 100%.
 - c) Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional) Rp300.000.000,00 realisasi anggaran Rp292.728.220,00 (97,05%), dan realisasi fisik 100%.
 - d) Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Pembantuan 4 acara) dengan pagu anggaran Rp500.000.000,00 realisasi anggaran Rp496.542.867,00 (98,55%), dan realisasi fisik 100%.
- 2) Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran. Pengembangan Perencanaan dan Keuangan dengan pagu anggaran Rp130.000.000,00 realisasi anggaran Rp123.036584,00 (96,87%) dan realisasi fisik 100%.

d. Kementerian Perdagangan

Program Perdagangan Dalam Negeri, dengan pagu anggaran sebesar Rp.114.367.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.72.061.900 (40,46%) dan realisasi fisik sebesar 50% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Edukasi Konsumen dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.12.500.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b) Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen dengan pagu anggaran Rp.76.867.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.42.469.000,00 (55,25%) dan realisasi fisik sebesar 60%.
- c) Pelatihan Pelaporan Distribusi Komoditas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Hasil Industri, serta Barang Penting Melalui SIPT Kemendag dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.17.092.900,00 (68,37%) dan realisasi fisik sebesar 70%.

- d) Pelaksanaan Pasar Murah dengan pagu anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.0,00 (0%) dan realisasi fisik sebesar 0% (pagu diblokir).
- e) Monitoring Pendataan dan Verifikasi Gudang TA.2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.724.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.0,00 (0%) dan realisasi fisik sebesar 0% (pagu diblokir).

e. Kementerian Perindustrian

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.234.201.000,00. Realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp.1.154.170.550,00 (93,52%) dan realisasi fisik sebesar 98% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a) Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah dan Aneka dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.164.361.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.086.992.950,00 (93,36%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- b) Dukungan Manajemen Internal dengan pagu anggaran Rp.69.840.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.67.177.600,00 (96,19%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) Sekretariat Jenderal (01) Satker 690946. (2325) Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu anggaran Rp296.000.000,00 realisasi anggaran Rp155.952.100,00 (52.69%), sisa anggaran Rp140.047.900,00 (47.31%), realisasi fisik 100%.
- 2) Ditjen Perikanan Tangkap (03) satker 229110.
 - a) (2337) Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanannya dengan pagu anggaran Rp41,290,000,00 realisasi anggaran Rp13.029.800,00 (31,56%), sisa anggaran Rp28.260.200,00 (68,44%), realisasi fisik 100%.
 - b) (2338) Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina tata kelola dan operasional pelabuhan perikanannya dengan pagu anggaran Rp42.920.000,00 realisasi anggaran Rp12.353.000,00 (28,78%), sisa anggaran Rp30.567.000,00 (68,44%), realisasi fisik 50%.
 - c) (2339) Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap dan Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya dengan pagu anggaran Rp67,401,000,00 realisasi anggaran Rp46.129.200,00 (68,44%), sisa anggaran Rp21.271.800,00 (31,56%), realisasi fisik 100%.
 - d) (2341) Laporan data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan

- diverifikasi dengan pagu anggaran Rp18,415,000,00 realisasi anggaran Rp11,819,000,00 (64,18%), sisa anggaran Rp6.596.000,00 (35,82%), realisasi fisik 100%.
- e) (2342) Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu anggaran Rp261.910.000,00 realisasi anggaran Rp153.335.156,00 (58,55%), sisa anggaran Rp108.574.844,00 (41,45%), realisasi fisik 100%.
- 3) Ditjen Perikanan Budidaya (04) satker 229111
- a) (2345) Sampel Monitoring Residu yang diuji dan Sampel Monitoring Penyakit Ikan yang diuji dengan pagu anggaran Rp183.750.000,00 realisasi anggaran Rp147.930.927,00 (80,51%), sisa anggaran Rp35.819.073,00 (19,49%), realisasi fisik 100%.
- b) (2348) Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu anggaran Rp214.038.000,00 realisasi anggaran Rp116.448.152,00(54,40%), sisa anggaran Rp97.589.848,00 (45,60%), realisasi fisik 100%.
- 4) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (05) satker 690991
- a) (2350) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP dengan pagu anggaran Rp9.600.000,00 realisasi anggaran Rp89.600.000,00 (100%), realisasi fisik 100%.
- b) (2355) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu anggaran Rp93.152.000,00 realisasi anggaran Rp93.129.131,00 (99,97%), sisa anggaran Rp22.869,00 (0,03%), realisasi fisik 100%.
- 5) Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (06) Satker 691029.
- a) (2357) Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri oleh daerah dengan pagu anggaran Rp70.000.000,00 realisasi anggaran Rp47,817,338,00 (68,31%), realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp22.182.662,00 (31,69%), realisasi fisik 100%.
- b) (2358) Industri pengolahan yang dibina oleh daerah dengan pagu anggaran Rp116.500.000,00 realisasi anggaran Rp72,980,000,00 (62,64%), sisa anggaran Rp43.520.000,00 (37,36%), realisasi fisik 100%.
- c) (2361) Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan pagu anggaran Rp253.468.000,00 realisasi anggaran Rp173.206.621,00 (68,33%), sisa anggaran Rp80.261.379,00 (31,67%),

realisasi fisik 100%.

- 6) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (07) Satker 691067
 - a) (2362) Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan pagu anggaran Rp280.000.000,00 realisasi anggaran Rp139.336.198,00 (49,76%), sisa anggaran Rp140.663.802,00 (50,24%), realisasi fisik 75%.
 - b) (2363) Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam dengan pagu anggaran Rp250.000.000,00 realisasi anggaran Rp236.245.397,00 (94,50%), sisa anggaran Rp13.754.603,00 (5,50%), realisasi fisik 100%.
 - c) (2366) Rekomendasi kebijakan pendelegasian kewenangan penerbitan persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan pagu anggaran Rp310.000.000,00 realisasi anggaran Rp160.549.996,00 (51,79%), sisa anggaran Rp149.450.004,00 (48,21%), realisasi fisik 100%.
 - d) (2367) Layanan Data dan Informasi, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan dengan pagu anggaran Rp106.796.000,00 realisasi anggaran Rp85.807.957,00 (80,35%), sisa anggaran Rp20.988.043,00 (19,65%), realisasi fisik 100%.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	REALISASI							SISA DANA
				S.D.NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER	FISIK		KEUANGAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=7/4*100	12=(4-7)
I	KEMENTERIAN PERTANIAN		15.272.177.000	12.330.107.435	704.371.131	13.034.478.566	97,83	86,57	97,83	85,35	2.237.698.434
1	229099	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.255.870.000	2.841.648.956	61.492.900	2.903.141.856	89,17	89,17	89,17	89,17	352.728.144
2	229100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	820.000.000	795.798.093	17.660.325	813.458.418	100,00	99,20	100,00	99,20	6.541.582
3	229101	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.367.217.000	2.227.025.909	555.111.571	2.782.137.480	100,00	82,62	100,00	82,62	585.079.520
4	229102	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	4.759.943.000	4.402.042.697	14.524.960	4.416.567.657	100,00	92,79	100,00	92,79	343.375.343
5	229108	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	3.069.147.000	2.063.591.780	55.581.375	2.119.173.155	100,00	69,05	100,00	69,05	949.973.845
II	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		13.042.134.000	11.726.178.714	1.245.200.177	12.971.378.891	100,00	99,99	100,00	99,46	70.755.109
6	229032	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali	7.203.624.000	6.425.085.000	709.112.177	7.134.197.177	100,00	99,98	100,00	99,04	69.426.823
7	229172	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali.	5.838.510.000	5.301.093.714	536.088.000	5.837.181.714	100,00	100,00	100,00	99,98	1.328.286
III	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN		178.091.000	72.061.900	-	72.061.900	100,00	60,00	100,00	40,46	106.029.100
8	691132	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	178.091.000	72.061.900	-	72.061.900	100,00	60,00	100,00	40,46	106.029.100
IV	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.695.240.000	1.354.826.966	400.843.007	1.755.669.973	100,00	100,00	100,00	67,74	939.570.027

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	REALISASI							SISA DANA
				S.D.NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER	FISIK		KEUANGAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=7/4*100	12=(4-7)
9	229110	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	431.936.000	191.140.380	45.525.776	236.666.156	100,00	100,00	100,00	54,79	195.269.844
10	229111	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	397.788.000	213.224.095	51.154.984	264.379.079	100,00	100,00	100,00	66,46	133.408.921
11	690946	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	296.000.000	145.952.100	10.000.000	155.952.100	100,00	100,00	100,00	52,69	140.047.900
12	690991	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	182.752.000	151.751.131	30.978.000	182.729.131	100,00	100,00	100,00	99,99	22.869
13	691029	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	439.968.000	243.111.692	50.892.267	294.003.959	100,00	100,00	100,00	66,82	145.964.041
14	691067	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	946.796.000	409.647.568	212.291.980	621.939.548	100,00	90,00	100,00	65,69	324.856.452
V	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		1.520.000.000	1.412.441.615	76.839.460	1.489.281.075	100,00	100,00	98,00	97,98	30.718.925
15	640018	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	1.520.000.000	1.412.441.615	76.839.460	1.489.281.075	100,00	100,00	98,00	97,98	30.718.925
VI	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		1.281.248.000	935.022.350	219.148.200	1.154.170.550	100,00	100,00	100,00	90,08	127.077.450
16	690764	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali	1.281.248.000	935.022.350	219.148.200	1.154.170.550	100,00	100,00	100,00	90,08	127.077.450
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI			33.988.890.000	27.830.638.980	2.646.401.975	30.477.040.955	99,64	91,09	99,31	89,67	3.511.849.045

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota

Total pagu dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tabanan, Gianyar, Buleleng dan Jembrana sebesar Rp7.721.047.000 realisasi fisik 100,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp5.745.720.625 atau 74,42%, yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	REVISI PAGU	REALISASI							SISA DANA
				S.D.NOVEMBER	DESEMBER	S.D. DESEMBER	FISIK		KEUANGAN		
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11=7/4*100	12=(4-7)
I	KEMENTERIAN PERTANIAN		455.000.000	426.483.154	24.410.000	450.893.154	100,00	100,00	100,00	99,10	4.106.846
1	229049	Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan	455.000.000	426.483.154	24.410.000	450.893.154	100,00	100,00	100,00	99,10	4.106.846
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		3.000.000.000	489.942.850	1.927.949.589	2.417.892.439	100,00	100,00	100,00	80,60	582.107.561
2	691132	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar	3.000.000.000	489.942.850	1.927.949.589	2.417.892.439	100,00	100,00	100,00	80,60	582.107.561
III	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		4.266.047.000	79.911.600	2.797.023.432	2.876.935.032	100,00	100,00	100,00	73,00	1.389.111.968
3	220146	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng	1.634.150.000	-	1.581.484.432	1.581.484.432	100,00	100,00	100,00	96,78	52.665.568
4	691132	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Jembrana	2.631.897.000	79.911.600	1.215.539.000	1.295.450.600	100,00	100,00	100,00	49,22	1.336.446.400
TOTAL TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN			7.721.047.000	996.337.604	4.749.383.021	5.745.720.625	100,00	100,00	100,00	74,42	1.975.326.375

3.3. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Bali

1. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota seperti sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah.
2. Serapan anggaran yang rendah karena mekanisme pelaporan yang kompleks.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut Untuk Optimalisasi Tugas Pembantuan di Provinsi Bali

1. Meningkatkan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat koordinasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bukanlah merupakan hal yang baru, karena SPM melekat dalam pembagian urusan pemerintahan sesuai UU No. 23 tahun 2014, yakni 6 urusan wajib terkait pelayanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sebagaimana terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pemerintah daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan dalam dimensi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dimana Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pada Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, bahwa di dalam Urusan Pemerintahan Wajib tersebut terdapat beberapa jenis pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengisyaratkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, Jenis Pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
3. SPM tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, sedangkan standar teknis dan petunjuk teknis akan ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang berkaitan dengan SPM.

Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut: kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan Data;
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pada bagian kedua SPM Pendidikan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan pendidikan menengah;
2. Pelayanan pendidikan khusus.

4.1.2. Target Pencapaian

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Pendidikan Menengah	100 %	2024
2.	Pelayanan Pendidikan Khusus	100 %	2024

4.1.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
JENJANG SMA					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16	BPS
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17	BPS
3	Kemampuan Literasi	76,25	76,17	99,90	Rapor Pendidikan 2024
4	Kemampuan Numerasi	63,83	62,99	98,68	Rapor Pendidikan 2024
5	Indeks iklim Keamanan	84,99	74,78	87,99	Rapor Pendidikan 2024
6	Indeks Iklim Kebinekaan	79,07	76,87	97,22	Rapor Pendidikan 2024
7	Indeks Iklim Inklusivitas	64,13	61,06	95,21	Rapor Pendidikan 2024

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
JENJANG SMK					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100	94,16	94,16	BPS
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	100	85,17	85,17	BPS
3	Kemampuan Literasi	72,34	71,33	98,60	Rapor Pendidikan 2024
4	Kemampuan Numerasi	59,58	59	99,03	Rapor Pendidikan 2024
5	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	91,71	91,67	99,96	Rapor Pendidikan 2024
6	Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja lulusan SMK	79	78,64	99,54	Rapor Pendidikan 2024
7	Indeks Iklim Keamanan	82,77	73,13	88,35	Rapor Pendidikan 2024
8	Indeks Iklim Kebinekaan	76,48	74,82	97,83	Rapor Pendidikan 2024
9	Indeks Iklim Inklusivitas	60,64	58,99	97,28	Rapor Pendidikan 2024
JENJANG PENDIDIKAN KHUSUS					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	100	49,01	49,01	Profil Pendidikan 2024
2	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Disabilitas Usia 4-18 Tahun	100	59,73	59,73	Rapor Pendidikan 2024
3	Kemampuan Literasi SDLB	70,92	66,97	94,43	Rapor Pendidikan 2024
4	Kemampuan Literasi SMPLB	71,21	62,11	87,22	Rapor Pendidikan 2024
5	Kemampuan Literasi SMALB	64,59	64,09	99,23	Rapor Pendidikan 2024

No	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
6	Kemampuan Numerasi SDLB	72,09	63,62	88,25	Rapor Pendidikan 2024
7	Kemampuan Numerasi SMPLB	67,27	65,2	96,92	Rapor Pendidikan 2024
8	Kemampuan Numerasi SMALB	67,44	58,25	86,37	Rapor Pendidikan 2024
9	Indeks Iklim Keamanan SDLB	85,78	78,74	91,79	Rapor Pendidikan 2024
10	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	80,3	71,4	88,92	Rapor Pendidikan 2024
11	Indeks Iklim Keamanan SMALB	80,81	72,28	89,44	Rapor Pendidikan 2024
12	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	76,6	66,98	87,44	Rapor Pendidikan 2024
13	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	72,91	66,31	90,95	Rapor Pendidikan 2024
14	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	74,56	69,09	92,66	Rapor Pendidikan 2024
15	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	70,74	64,05	90,54	Rapor Pendidikan 2024
16	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	66,63	60,42	90,68	Rapor Pendidikan 2024
17	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	72,86	62,23	85,41	Rapor Pendidikan 2024

Penetapan sasaran Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan berdasarkan indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Kegiatan	Alokasi	Sumber Dana
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Rp 415.339.476.823	APBDP
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 327.550.254.334	APBDP
3.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Rp 40.112.088.612	APBDP
4.	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rp 74.981.000	APBDP
	Jumlah	Rp 783.076.800.769	

4.1.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali tahun 2024 total sebanyak 10.150 orang terdiri dari 8.488 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 1.662 orang dengan status tenaga kontrak (Non ASN). Untuk tenaga ASN terdiri dari 4.824 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3.664 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK). Tenaga ASN terkonsentrasi di lingkungan Kantor Disdikpora Provinsi Bali sebanyak 191 orang dan tenaga kontrak sebanyak 237 orang. ASN yang terdistribusikan pada Satuan Pendidikan sebanyak 7.808 orang terdiri dari 4.144 orang PNS dan 4.072 orang PPPK dengan tugas sebagai Kepala Sekolah sebanyak 140 orang.

Secara administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali memiliki tanggung jawab pengelolaan dan urusan pelayanan terhadap satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan total layanan sebanyak 365 sekolah, yang terdiri atas 90 SMA Negeri, 71 SMA Swasta, 58 SMK Negeri dan 112 SMK Swasta, 12 SLB Negeri dan 3 SLB Swasta. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali dibantu 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yakni UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (UPTD BPTKDIK) dan UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPTD BPTKK).

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang ditemukan, sebagai berikut :

- 1) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun
- 2) Belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk disabilitas usia 4-18 tahun

- 3) Sejumlah capaian realisasi indikator SPM tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel diatas masih ada yang belum tercapai.

2. Solusi

- 1) Memantapkan peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan yang meliputi unit sekolah baru, ruang kelas, ruang kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, sarana utilitas lainnya, media pembelajaran, alat praktek siswa, dan mebeler sekolah, pemberian dana pendamping operasional sekolah (BOSDA), dan penyaluran dana pendidikan bagi siswa kurang mampu (PIP) untuk menekan terjadinya siswa putus sekolah.
- 2) Peningkatan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelatihan peningkatan kompetensi, pemanfaatan media pembelajaran digital, forum guru mata pelajaran, dan pendistribusian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan ideal Satuan Pendidikan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan ke satuan pendidikan secara berkesinambungan terkait manajemen aparatur, sarana-prasarana, tata kelola sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah), pengelolaan dana sekolah, keselarasan kurikulum, penguatan kurikulum kuatan lokal, dan review capaian rapor pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung pemenuhan SPM Pendidikan.
- 4) Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun dan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang Pendidikan Dasar, serta dapat mendorong dan menjangir siswa putus sekolah agar bersekolah kembali.
- 5) Melakukan review terhadap program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan untuk mencapai target pencapaian SPM Pendidikan.
- 6) Berkoordinasi dengan pihak Kemendikbudristek mengupayakan agar rilis Raport Pendidikan dapat lebih awal setiap tahunnya.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pada bagian

ketiga SPM Kesehatan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar untuk Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

4.2.2. Target Pencapaian

Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal 4 yaitu capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%.

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Layanan	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %	2024
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100 %	2024

4.2.3. Realisasi

Hasil capaian SPM kesehatan adalah hasil yang didapat sesuai dengan definisi operasional masing-masing kegiatan dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan di awal tahun kegiatan. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator SPM	Sasaran	Capaian	%
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	1.640.599 Penduduk	1.640.599 Penduduk	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	64.576 orang	0	0

- 1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi

Berdasarkan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, klaster kesehatan provinsi dibentuk

dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan tingkat daerah dan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Bali. Pada saat tanggap darurat krisis kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan aktivasi klaster kesehatan daerah. Penanggulangan krisis kesehatan mengutamakan kegiatan pengurangan risiko krisis kesehatan, penanggulangan krisis kesehatan diselenggarakan sesuai tahapan yang meliputi tahap prakrisis, tahap tanggap darurat dan tahap pasca krisis kesehatan. Untuk kegiatan prakrisis meliputi upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan seperti peningkatan sumber daya kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya krisis kesehatan dan pengurangan kerentanan. Penanggulangan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan memastikan program kesehatan berjalan terpenuhinya standar minimal pelayanan kesehatan. Penanggulangan pada tahap pascakrisis ditujukan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi prakrisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik dan aman. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan, dengan empat siklus manajemen krisis kesehatan yaitu mitigasi (*mitigation*), kesiapsiagaan (*preparedness*), respon (*response*) dan pemulihan (*recovery*). Sehingga kegiatan yang dilaksanakan meliputi keseluruhan siklus ini. Mengingat sepanjang 2024 tidak ada masa darurat Provinsi maka kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Menyusun buku pedoman pembentukan klaster kesehatan dan pusat kendali krisis kesehatan (HEOC)
2. Menyusun SK Klaster Kesehatan
3. Menyusun SK HEOC
4. Monitoring dan evaluasi SISRUITE (Sistem Rujukan Terintegrasi) ke RS dan Puskesmas di 9 Kab/Kota
5. Melakukan TTX dan FTX
6. Melakukan Simulasi Gempa Bumi

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali tahun 2022 terdapat 14 risiko bencana di seluruh wilayah Provinsi Bali dan tidak ada satu wilayah pun yang tidak berisiko terdampak bencana/krisis kesehatan meskipun potensi risiko dan jenis *hazard* berbeda. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Bali tahun

2023 sebanyak 4.380.824 jiwa yang artinya masyarakat yang berpotensi terdampak krisis kesehatan juga sejumlah tersebut. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan wajib menjangkau seluruh masyarakat dengan metode pelayanan langsung dan tidak langsung.

- 2) Pelaksanaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Untuk mencegah terjadinya KLB atau meluasnya KLB maka perlu di berikan pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berisiko terkena KLB. Provinsi Bali sebagai daerah wisata dengan mobilisasi penduduk yang tinggi sangat berpotensi terjadi KLB terutama KLB PD3I. Ancaman KLB PD3I juga disebabkan karena provinsi Jawa Timur dan NTB yang merupakan provinsi terdekat saat ini sedang terjadi peningkatan kasus PD3I.

Dalam upaya mencegah terjadinya KLB PD3I di Provinsi Bali maka Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa dalam hal ini adalah kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan sangat perlu di berikan. Pelayanan kesehatan yang di berikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dengan cakupan yang tinggi dan merata. Pemantauan terhadap KLB di Provinsi dapat dilihat melalui kinerja Sistem Kewaspadaan Dini dan respon (SKDR).

Pada tahun 2024 tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi Bali terutama KLB PD3I yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena dalam penerapan SPM Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melakukan beberapa hal berikut :

- 1) Melakukan identifikasi pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB pada semua kabupaten kota;
- 2) Melakukan penanganan pada kelompok risiko yang berpotensi terkena KLB, khususnya KLB PD3I berupa pemberian imunisasi dasar maupun lanjutan;
- 3) Melakukan monitoring pada Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terkait penyakit² yang berpotensi KLB berdasarkan gejala (Suspek);
- 4) Melakukan verifikasi rumor terhadap laporan penyakit berpotensi KLB baik dari faskes maupun masyarakat termasuk melakukan penyelidikan epidemiologi

(PE) serta melakukan pengambilan sampel dan mengirimkan sampel ke Lab Rujukan Nasional;

- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait cakupan imunisasi rutin untuk mencegah Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) sehingga cakupan imunisasi tetap tinggi dan merata di semua kab/kota.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Sumber Dana
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	517.042.400,-	73.458.820,-	14.25%	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	2.405.881.900,-	159.783.110,-	6,64%	APBD

Anggaran tahun 2024 yang dialokasikan untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pada subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sebesar Rp. 2.405.881.900,- bersumber anggaran DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 6,64%. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk perjalanan dinas, makan minum rapat, pembelian vaksin VAR dan SAR, belanja paket/pengiriman, belanja jasa tenaga laboratorium, belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor. Realisasi rendah karena tidak adanya penetapan KLB sehingga pengadaan obat dan BMHP tidak perlu direalisasikan.

Alokasi anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi pada sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana sebesar Rp. 517.042.400,- bersumber anggaran DAU Bidang Kesehatan, dengan realisasi sebesar 14.25%. Realisasi rendah karena tidak ada surat Keputusan Kepala Daerah penetapan status tanggap darurat bencana sehingga pengadaan obat dan BMHP tidak perlu direalisasikan.

4.2.5. Dukungan Personil

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Pada tahun 2024 fasilitas kesehatan yang dimiliki di Provinsi Bali meliputi 82 Rumah Sakit, 120 puskesmas, 252 klinik, 9 *public safety center* di 9 kabupaten/kota dan Provinsi. Tetapi data ini belum cukup untuk mengetahui kapasitas kesehatan terutama dalam masa tanggap darurat bencana. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan mengamanatkan penanggulangan krisis kesehatan dilakukan berdasarkan sistem klaster yang melaksanakan fungsi koordinasi, kolaborasi dan integrasi penanggulangan krisis di tingkat daerah yang merupakan bagian integral dari upaya penanggulangan bencana. Klaster kesehatan terdiri dari sub klaster (pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, jiwa, gizi, dan DVI) dan tim pendukung (tim logistik, tim data dan informasi dan tim promosi kesehatan) yang kegiatannya dikoordinir Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Sasaran Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang di gunakan adalah penduduk yang masuk dalam kelompok risiko rawan terkena KLB PD3I yaitu kelompok umur 0-2 thn yang merupakan sasaran imunisasi dasar dan lanjutan. Pelayanan kesehatan pada kelompok ini bertujuan untuk mencegah terjadinya KLB kasus PD3I di Prov Bali. Pelayanan kesehatan yang di berikan adalah memberikan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.

Dalam mendukung pencapaian SPM dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, dibentuk Tim Gerak Cepat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam Tim tersebut dinyatakan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan KLB di Provinsi Bali diantaranya adalah Balai Besar Veteriner Denpasar, Fakultas Kedokteran UNUD, Dinas Peternakan Provinsi Bali, RSUP Sanglah Denpasar, UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Denpasar, KKP Kelas I Denpasar, serta seluruh Seksi/Subbag di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ditemukan :

- 1) Masih adanya masyarakat yang menolak imunisasi rutin;
- 2) Tidak semua penyakit berpotensi KLB memiliki tools pemetaan risiko penyakit berpotensi KLB;
- 3) Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga Provinsi Bali memiliki risiko mengalami KLB baik Penyakit Infeksi *Emerging* maupun *Re Emerging*;

- 4) Adanya refokusing anggaran sehingga berpotensi penundaan pengiriman sampel dan pemeriksaan sampel di Lab Rujukan Nasional.

Solusi :

- 1) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB melalui sistem kewaspadaan dini dan respon secara berkesinambungan;
- 2) Peningkatan kualitas SDM dalam upaya penanggulangan penyakit baru (*new emerging disease*) melalui pelatihan maupun refreasing dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas;
- 3) Melaksanakan komunikasi beresiko kepada masyarakat secara masif dan terus menerus secara berkesinambungan;
- 4) Menyiapkan logistik sesuai dengan jenis penyakit berpotensi KLB;
- 5) Melakukan mitigasi sebelum terjadinya KLB;
- 6) Menyusun prioritas kegiatan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bab II Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Bagian Kesatu SPM Bidang Pekerjaan Umum menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPAM melalui 4 (empat) SPAM, yaitu:

- a. SPAM Regional Petanu yang melayani Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- b. SPAM Regional Penet yang melayani Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

- c. SPAM Regional Telagawaja yang melayani Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng.
- d. SPAM Regional Buleleng Jembrana (Burana) yang melayani Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- e. SPAM Guyangan yang melayani Kabupaten Klungkung khususnya Pulau Nusa Penida.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diberikan melalui penyelenggaraan SPALD-S dan/atau SPALD-T. Saat ini Provinsi Bali telah melakukan penyelenggaraan SPALD-T melalui DSDP yang terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suwung untuk melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum.
 Ukuran kuantitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) melalui SPAM.
 Ukuran kualitas air minum diukur dengan parameter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan kesehatan, saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- b. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.
 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter yaitu setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik.
 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diukur dengan parameter terdiri atas:
 - 1) pelayanan akses aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan:
 - a) Tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau

- b) sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T.
- 2) pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah menggunakan lubang tanah atau cubluk kembar. Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum Daerah Provinsi terdiri atas:
- a) pelaksana Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b) setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian

Target yang ingin dicapai dari penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut:

Jenis Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pekerjaan Umum	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	2024		
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	2024		

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

4.3.3. Realisasi

Realisasi target dan alokasi anggaran dari standar pelayanan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut:

Realisasi target dan alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum 2024

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T 2024	R 2024	Alokasi Anggaran		Ket.
							APBN	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pekerjaan Umum	memenuhi kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	2024	100%	88,23%	-	Rp57.482.828.369	Secara Kumulatif Kategori Indeks Capaian SPM: TUNTAS UTAMA (94,11%)
		penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	2024	100%	100,00%	-	Rp12.356.289.360	

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

4.3.4. Alokasi Anggaran

Realisasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		
				(Rp)	%	
1	2	3	5	6	7	
1	Pekerjaan Umum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	57.234.147.097,00	50.742.270.110,00	88,66	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.359.184.976,00	1.175.931.822,00	86,52	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.081.217.100,00	10.230.248.574,00	67,83	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	40.793.745.021,00	39.336.089.714,00	96,43	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	12.356.289.360,00	11.303.960.546,00	91,48	
		Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.028.074.300,00	878.296.385,00	85,43	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	262.831.900,00	209.116.000,00	79,56	
		Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	11.065.383.160,00	10.216.548.161,00	92,33	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
		Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	248.681.272,00	0,00	0,00	
Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	248.681.272,00	0,00	0,00			

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

4.3.5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Personil Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
I	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
II	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
III	Bidang Cipta Karya		
1	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	24 Orang
IV	UPTD PAM		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	160 Orang
V	UPTD PAL		
1	Kepala UPTD	Eselon III	1 Orang
2	Kepala Seksi/Sub Bagian	Eselon IV	3 Orang
3	Staf Teknis dan Administrasi	ASN dan Non-ASN	78 Orang
Total			274 Orang

Sumber: Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali (2024)

Bidang Cipta Karya berperan dalam aspek perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengembangan dan pengawasan SPAM dan SPALD. UPTD PAM berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPAM. UPTD PAL berperan dalam aspek operasi dan pemeliharaan SPALD.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dalam melakukan pengisian *form* 3.B.1 Rumah Terlayani SPAM Regional, sehingga poin-poin seperti Nama Kepala Keluarga, NIK, Jumlah Anggota Rumah, Kondisi Ekonomi Keluarga dan Status MBR/Non MBR belum bisa kami isi dengan data yang valid dan aktual.
2. Perbedaan penerima layanan dasar antara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, di mana pada Permendagri penerima layanan dasar adalah warga negara sedangkan pada Permen PUPR penerima layanan dasar adalah pelaksana Penyelenggaraan SPAM penerima air minum curah lintas kabupaten/kota. Perbedaan ini berdampak pada kesulitan kami dalam menghitung kebutuhan dan capaian.
3. Perhitungan kebutuhan menggunakan tren persentase kenaikan dari data serapan tahun 2022 dan tahun 2023, tidak berdasarkan kebutuhan riil dari *Off Taker* (pelanggan).

4. Sering terjadi permasalahan kebocoran jaringan transmisi utama (khususnya) SPAM Telagawaja, sehingga mengganggu pencapaian target kebutuhan khususnya SPAM Telagawaja.
5. *Off Taker* dalam melakukan penyerapan air curah juga sangat tergantung pada kondisi SPAM yang mereka miliki, *Off Taker* tentunya lebih memprioritaskan produksi SPAM sendiri dibandingkan menyerap air curah dari SPAM Regional.
6. Sering terjadi kebocoran jaringan distribusi utama SPAM Petanu, sehingga mengganggu pendistribusian dan tentunya pencapaian target kebutuhan.
7. Bocornya bendung karet di SPAM Petanu dan kempesnya bendung karet di SPAM Penet khususnya pada musim hujan mengganggu suplai air baku untuk produksi, sehingga mengganggu pendistribusian ke *Off Taker* (pelanggan).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah domestik/rumah tangga dengan sistem setempat sudah tidak sesuai lagi dengan adanya perkembangan penduduk dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga perlu pengembangan jaringan & peningkatan kondisi prasarana instalasi pengolahan air limbah terpusat yang ada.
2. Pelanggan kategori rumah tangga untuk membayar tagihan langganan penyaluran air limbah masih sangat kurang (lebih kurang 40% yang aktif membayar tagihannya), sehingga sampai saat ini tunggakan yang menjadi piutang pada UTPD PAL masih cukup tinggi.
3. Kepedulian pelanggan untuk memelihara jaringan perpipaan air limbah dari rumah tangga masing-masing sampai ke *House Inlet* (HI) masih perlu ditingkatkan, mengingat kebuntuan atau sumbatan pipa akibat sampah masih sering terjadi yang berakibat meluapnya air limbah di areal rumah atau di jalan. Selain itu pada musim hujan, air hujan yang seharusnya tidak masuk ke dalam jaringan perpipaan air limbah sengaja dimasukkan untuk mengatasi genangan di areal perumahan dengan cara membuka bak kontrol atau *manhole* yang berakibat air meluap pada beberapa titik *manhole* di jalan.
4. Akibat masuknya sampah ke dalam saluran pipa air limbah, pompa-pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air limbah mengalami kerusakan, seperti motor pompa terbakar akibat tersangkut sampah sehingga daya kerja pompa tidak optimal.
5. Kondisi kolam aerasi (*aeration pond*) dan kolam sedimentasi (*sedimentation pond*) sudah penuh dengan sedimen sehingga pengolahan air limbah tidak optimal.

6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih menerima limbah Restoran yang cukup tinggi kandungan lemaknya, karena sampai saat ini belum ada instalasi yang khusus mengolah limbah lemak.
7. Pada beberapa jaringan pipa, baik pipa *force main* maupun pipa RC (beton) telah mengalami kebocoran akibat korosi oleh gas H₂S yang terkandung dalam air limbah itu sendiri.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWS-Bali Penida) telah merencanakan penggantian karet bendung pada Long Storage Tukad Petanu.
2. Perencanaan optimalisasi SPAM Petanu melalui pengadaan dan pemasangan pompa *booster* di Ketewel dan pembangunan Reservoir Sanur (Tukad Bilok) dan jaringan pipa.
3. Perencanaan pemasangan Taping Brawa pada jaringan distribusi utama SPAM Penet untuk melayani wilayah Cangu, Brawa dan sekitarnya.
4. Pergantian beberapa aksesoris air valve di SPAM Petanu untuk mengurangi kebocoran di jaringan distribusi utama.
5. Optimalisasi serapan di SPAM Telagawaja melalui penjajakan taping baru, di Juntal, Griyana Kangin, Karanganyar.

Solusi yang sudah diambil untuk mengatasi permasalahan dalam penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota antara lain:

1. Mengantarkan *invoice* (tagihan) ke rumah masing-masing pelanggan (*door to door*) sambil memberikan sosialisasi/edukasi terkait fungsi dan kegunaan serta pemeliharaan jaringan pipa air limbah.
2. Melakukan pemeliharaan dan pembersihan sampah pada *manhole* dan jaringan pipa secara rutin oleh petugas UPTD PAL.
3. Rehabilitasi/renovasi pada beberapa jaringan pipa yang mengalami kebocoran.
4. Mengganti beberapa komponen pompa maupun mengganti pompa yang mengalami kerusakan.
5. Perlu direncanakan pembangunan instalasi pengolahan untuk menyaring dan mengolah lemak sebelum masuk ke dalam IPLT.
6. Perlu direncanakan pembangunan permukaan bak kontrol di masing-masing rumah agar elevasinya dibuat lebih tinggi dari eksisting halaman untuk mengurangi lumpur atau sedimen masuk ke bak kontrol.
7. Perlu dilakukan pengurasan pada kolam aerasi dan kolam sedimentasi secara berkala.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat 2, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilaksanakan melalui:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. pemukiman kembali; atau
- d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan
- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan:

- a. terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
- b. sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

Pelaksanaan pemenuhan terhadap Rencana Aksi yang dapat dilakukan secara bertahap dapat dihitung capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:

- a. penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
- b. proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
- c. proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Program Pemerintah Daerah sebagaimana dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

Daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya sebagaimana merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:

- a. sempadan sungai;
- b. sempadan pantai;
- c. sempadan rel kereta api;
- d. daerah saluran SUTET; dan/atau
- e. daerah berpotensi bahaya lainnya.

Daerah rawan bencana meliputi:

- a. letusan gunung berapi;
- b. gempa bumi;
- c. tanah longsor;
- d. gelombang pasang;
- e. banjir bandang; dan/atau
- f. bencana lainnya.

Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah; dan

- c. pemukiman kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.

4.4.2. Target Pencapaian

Penerapan SPM Perumahan Rakyat sesuai dengan kondisi pada tahun 2024 tidak ada Bencana tingkat Provinsi dan tidak ada relokasi program pemerintah sehingga untuk kegiatan ini tidak ada realisasi pelaksanaan. Akan tetapi sesuai dengan tahapan pelaksanaan penerapan SPM ini dilakukan kegiatan pendataan sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan dalam perencanaan penerapan SPM. Kegiatan pendataan yang dilakukan tahun 2024 merupakan langkah awal penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat. Hingga tahun 2024 data yang diperoleh adalah data jumlah rumah dan lokasi lahan potensial yang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan penerapan SPM Perumahan Rakyat. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Lokasi Rumah di Kawasan Rawan Bencana

No.	Kabupaten	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Klungkung	476,97	31.606	7.909	39.545
2.	Karangasem	915,50	25.885	5.723	26.842
3.	Buleleng	71.678,60	27.703	6.945	27.780
Total		73.071,07	85.194	20.577	94.167

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, luas perumahan yang terbangun di kawasan rawan bencana di 3 kabupaten yang telah di data yaitu pada Kabupaten Klungkung, Karangasem dan Kabupaten Buleleng sebesar 73,071,07 Ha dengan jumlah unit rumah sebanyak 85.194 unit. Dari sekian rumah yang berlokasi di kawasan rawan bencana terdampak terhadap 20.577 kepala keluarga dengan total 94.167 jiwa. Selain dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana, juga dilakukan pendataan lahan potensial apabila terdapat relokasi program pemerintah provinsi. Untuk lebih jelas akan dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel Lahan Potensial

No	Kabupaten	Luas Lahan (Ha)	Kepemilikan Lahan
1.	Klungkung	2	Pemprov Bali
2.	Karangasem	10,2	
3.	Tabanan	8,3	
Total		20,5	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hingga tahun 2024 baru dilakukan pendataan lahan potensial di 3 kabupaten yaitu kabupaten Karangasem, Klungkung dan Tabanan dengan luas lahan potensial untuk dilakukan relokasi seluas 20,5 Ha. Peruntukan lahan tersebut sudah sesuai dengan kondisi RTRW setempat sehingga layak untuk

digunakan untuk pengembangan permukiman dimana kepemilikan lahan juga merupakan aset Pemprov Bali.

4.4.3. Realisasi

Realisasi target dari penerapan SPM Perumahan Rakyat yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Tahun 2024 adalah seperti tabel berikut.

Capaian Penerapan SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2024

NO	BIDANG/JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENCANA PENCAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	T	R	KET.
					2024	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;	100 %	2024	100 %	100 %	Secara Kumulatif Kategori Indeks Pencapaian SPM : TUNTAS PARIPURNA 100%
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;	100 %	2024	100 %	100 %	

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Dilihat dari tabel di atas, realisasi yang dicapai pada tahun 2024 mencapai 100% dengan data isian lengkap sehingga mendapat predikat **Tuntas Paripurna**.

4.4.4. Alokasi Anggaran

APBD Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2024 diketahui sebesar Rp6.917.008.137.900,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

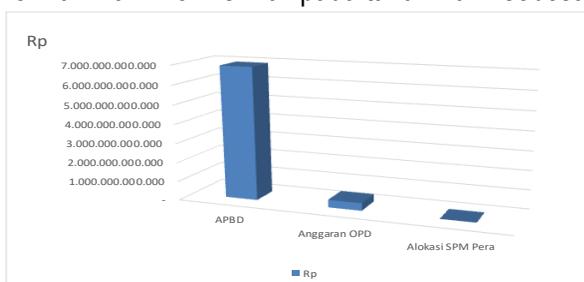
Alokasi Anggaran SPM Perumahan Rakyat Provinsi Bali Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	8.058.914.324	6.676.421.658	82,85
		Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	20.822.600	15.994.068	76,81

	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	20.822.600	15.994.068	76,81
	Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	487.395.260	468.089.019	94,04
	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	487.395.260	468.089.019	94,04
	Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	272.217.800	271.135.475	99,60
	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	272.217.800	271.135.475	99,60

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran pendukung untuk penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar **Rp.780.435.660,-**.



Dilihat dari grafik diatas, alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp.780.435.660,- jika dihitung hanya sebesar 0,20% dari APBD Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp.6.917.008.137.900,-. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil pada Instansi yang menangani Perumahan Rakyat di Provinsi Bali dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali tahun 2024 yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jabatan	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Kepala Bidang	Eselon III	1 Orang
2.	Kepala Seksi	Eselon IV	1 Orang
3.	Jafung Muda	PNS	1 Orang
4.	Staf teknis dan administrasi	PNS dan Non-PNS	18 Orang
Jumlah Total			23 Orang

Sumber : Dinas PUPRPERKIM Provinsi Bali, 2024

Berdasarkan tabel diatas, jumlah personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam Pemenuhan Indikator adalah sebagai berikut :

- a) Pada indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, sepanjang tahun 2024 tidak ditemui adanya bencana skala provinsi, namun tetap dilakukan pendataan rumah di kawasan rawan bencana;
- b) Pada indikator Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sepanjang tahun 2024 tidak dilakukan relokasi melainkan diberikan fasilitasi dengan pemberian ganti kerugian sesuai nilai *appraisal*.

4.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

4.5.2. Target Pencapaian

Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas								
Provinsi Bali								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan SDM	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota

4.5.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	190	190	100%	0	0	100%	100%	Tuntas Paripurna

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2024 seluruhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.

4.5.5. Dukungan Personil

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 198 Orang, dengan status : PNS = 95 Orang dan Non PNS = 123 Orang.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Pengumpulan Data :

- Minimnya jumlah warga negara radius 0-50 meter di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada
- Warga negara yang bermukim di sekitar arena penegakan Perda dan Perkada enggan menyerahkan identitas dirinya karena tidak merasa melakukan pelanggaran (walupun sudah dijelaskan secara humanis oleh petugas Satpol PP)

2) Penghitungan kebutuhan

- Diperlukan adanya pembaharuan SOP sesuai Permendagri 16 Tahun 2023

3) Pelaksanaan

- Tidak ditemukan adanya masyarakat yang terdampak penegakan Perda dan Perkada

b. Solusi :

- 1) Melakukan kerjasama (MoU) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui Disdukcapil Provinsi untuk dapat mengakses data kependudukan warga

Negara yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada serta MoU dengan Kab/Kota.

- 2) Melaksanakan patroli wilayah secara intensif baik secara mandiri maupun gabungan/bersama-sama dengan unsur instansi vertikal (TNI/Polri) maupun dengan Satpol PP Kab/Kota untuk mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali.
- 3) Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir batin;
- 4) Meningkatkan kemampuan Sumber daya Pol PP melalui Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pol PP, sarana dan prasarana, serta anggaran.
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Dan Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2024

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2024
1	2	3	4	5	6
6	Bidang Sosial				
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%

No	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian 2024
1	2	3	4	5	6
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Bidang Sosial 2024

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
6.1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya	100%	2024	100%	100%

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
		manusia kesejahteraan sosial; dan				
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	100%
6.2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	100%
6.3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	94,72%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	98,94%
6.4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	100%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk	100%	2024	100%	100%

No.	Bidang/Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	T	R
					2024	2024
1	2	3	4	5	6	7
6. Bidang Sosial						
		teknis atau tata cara pemenuhan standar				
6.5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	a) Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa;	100%	2024	100%	71,31%
		b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan	100%	2024	100%	100%
		c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	100%	2024	100%	62,54%

Berdasarkan data-data di atas dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib bidang sosial terdiri dari 3 indikator kinerja yang masing - masing di SPM kan dan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali pada Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Indikator yang Sesuai Target dan Tidak Sesuai Target:

- 6.1 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% capaian realisasi tersebut 100% dicapai melalui anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
- b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan capaian 100%, SDM Kesejahteraan Sosial tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Disabilitas , Tenaga Kesejahteraan Sosial yang tersebar di 9 Kab/Kota.
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Tahun 2024 ditargetkan 100% realisasi capaian 100%.
- 6.2 a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% capaian realisasi 100% capaian realisasi tersebut dicapai dari anggaran APBD dan dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta.
- b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.

- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti Tahun 2024 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.3
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% dengan capaian realisasi 94,72%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD dan melalui partisipasi masyarakat dan swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi 100% SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Pendamping Asistensi Lanjut Usia, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti Tahun 2024 ditergetkan 100% dengan realisasi capaian 98,94%.
- 6.4
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa Tahun 2024 target 100% capaian realisasi 100%. Provinsi Bali belum mempunyai Panti Gelandangan dan Pengemis namun dalam penanganan orang terlantar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyediakan asrama untuk penampungan sementara sebelum dipulangkan ke Daerah asal. Penanganan Gepeng ditangani oleh Instansi Sosial Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi .
 - b. Jumlah dan kualitas SDM Kesos pada Tahun 2024 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM Kesos tersebut terdiri dari ASN Instansi Sosial, Sakti Peksos, Pekerja Sosial dan Tenaga Kesos yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti Tahun 2024 target 100% dengan realisasi capaian 100%.
- 6.5
- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi dengan target 100% telah memenuhi standar dengan realisasi 71,31%. Capaian realisasi tersebut tertangani dari anggaran APBD, Persediaan barang logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan melalui partisipasi masyarakat atau swasta.
 - b. Jumlah dan kualitas SDM kesos sudah sesuai target 100% dengan realisasi capaian 100%. SDM tersebut terdiri ASN pada instansi Sosial, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Pelopor Perdamaian, Tenaga Kesos dan relawan yang tersebar di 9 Kab/Kota.
 - c. Petunjuk teknis atau tata cara Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi dari target 100%

telah tersedia dengan realisasi capaian 62,54%.

4.6.3. Realisasi

Realisasi SPM Bidang Sosial 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Tuntas Utama			92.30%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	130	130	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Penyediaan permakanan	55	55	0	100%
	2 . Penyediaan sandang	21	21	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	8	8	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu	5	5	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	3	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	130	130	130	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	15	30	-15	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	5	5	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5	5	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	2	2	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
		Dilayani			
	A. Jumlah yang harus dilayani:	3032	3032	0	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Pengasuhan	3032	3032	0	100%
	2 . Penyediaan permakanan	667	667	0	100%
	3 . Penyediaan sandang	45	45	0	100%
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	82	82	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	45	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	75	75	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	45	45	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	20	20	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45	45	0	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	75	75	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	21	21	0	100%
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	20	20	0	100%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				98.94%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	350	355	-5	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	A. Jumlah mutu				94.72%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	(Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				
	1 . Penyediaan permakanan	190	159	31	83.68%
	2 . Penyediaan sandang	90	95	-5	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	3	3	0	100%
	4 . Penyediaan alat bantu	15	15	0	100%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	90	95	-5	100%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	350	355	0	100%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	90	95	-5	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	5	5	0	100%
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	90	95	-5	100%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	50	50	0	100%
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100%
	12 . Pemulasaraan**	34	18	16	52.94%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	380	391	-11	100%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				100%
	1 . Penyediaan permakanan	220	260	-40	100%
	2 . Penyediaan sandang	25	25	0	100%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	1	1	0	100%
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	0	100%
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25	25	0	100%
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	25	0	100%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	25	0	100%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	25	25	0	100%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	25	25	0	100%
	10 . Pemulangan ke daerah asal	380	391	-11	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				62.54%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	A. Jumlah yang harus dilayani:	2635	1590	1045	60.34%
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
	B. Jumlah mutu (Barang/Jasa/SDM) yang harus dilayani:				71.31%
	1 . Penyediaan permakanan	2635	1590	1045	60.34%
	2 . Penyediaan sandang	425	200	225	47.06 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	9	9	0	100%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	297	146	151	49.16%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	595	595	0	100%

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial 2024

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti	Rp2.318.564.200,00	APBDP
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar didalam panti	Rp1.402.760.000,00	APBDP
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti	Rp1.024.031.800,00	APBDP
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Rp132.199.400,00	APBDP

	didalam panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi	Rp264.416.700,00	APBDP
	Jumlah	Rp5.141.972.100,00	

4.6.5. Dukungan Personil

Personil yang mendukung pencapaian SPM Bidang Sosial berjumlah (seratus lima puluh sembilan) orang yang terdiri dari:

Pejabat			
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 Orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	4 Orang
4.	Kepala UPTD	Eselon III	2 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	7 Orang

Fungsional			
1.	Pekerja Sosial	Golongan IV	3 Orang
2.	Arsiparis	Golongan IV	1 Orang
3.	Arsiparis (P3K)	Golongan IX	1 Orang
3.	Penyuluh Sosial	Golongan III	6 Orang
4.	Pranata Komputer	Golongan III	1 Orang
Staf			
1.	Umum	Golongan IV	11 Orang
2.	Umum	Golongan III	60 Orang
3.	Umum	Golongan II	22 Orang
4.	Tenaga Administrasi	-	39 Orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Kendala

Terbatasnya sumber daya manusia khususnya Fungsional Kesejahteraan Sosial dalam panti yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

b. Permasalahan

Terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, sehingga tidak dapat terlayannya dengan maksimal seluruh sub-sub kegiatan dalam pencapaian SPM tahun 2024.

c. Solusi

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, namun bersama-sama dengan masyarakat dan swasta untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pelayanan Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun
			• Indeks Iklim Keamanan SMA
			• Indeks Iklim Kebinekaan SMA
			• Indeks Inklusivitas SMA
			• Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	• Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
			• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun
			• Persentase lulusan siswa SMK yang diterima bekerja di Dunia Usaha/Dunia Industri
			• Indeks Iklim Keamanan SMK
			• Indeks Iklim Kebinekaan SMK
	• Indeks Inklusivitas SMK		
	• Rerata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
	• Rerata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional		
	• Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK		
	• Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
2	Pelayanan Pendidikan Khusus	1. Pengelolaan Pendidikan Khusus	• Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Disabilitas Usia 4 - 18 tahun
			• Indeks Iklim Keamanan SDLB
			• Indeks Iklim Keamanan SMALB
			• Indeks Iklim Keamanan SMPLB
			• Indeks Iklim Kebinekaan SDLB
			• Indeks Iklim Kebinekaan SMALB
			• Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB
			• Indeks Inklusivitas SDLB
			• Indeks Inklusivitas SMALB
			• Indeks Inklusivitas SMPLB
• Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional			

No	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
			<ul style="list-style-type: none"> • Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
3	Pelayanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Minimal Baik • Persentase rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal

4.7.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan tahun 2024 seperti yang tercantum dalam DPA Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Provinsi	Subkegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar

4.7.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Layak
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak

4.7.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

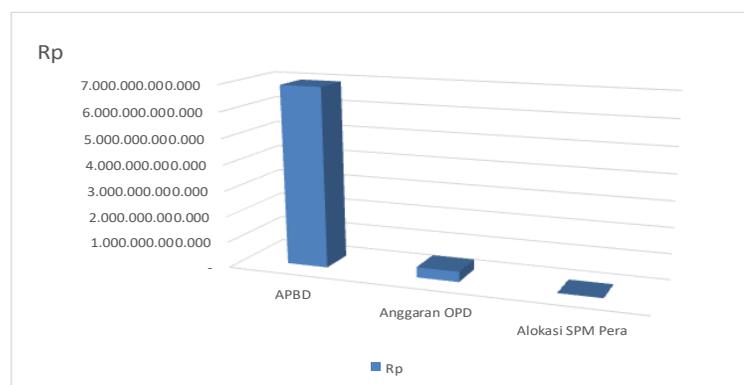
APBD Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2024 diketahui sebesar Rp6.917.008.137.900,- sedangkan Alokasi anggaran untuk Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel Program dan Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran
1	Perumahan Rakyat	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Rp20.822.600
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Rp499.622.640
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase	Rp272.217.800

		PERUMAHAN Kegiatan Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi/ Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	
			Total Anggaran	Rp792,663,040

Berdasarkan tabel diatas, total anggaran pendukung untuk penerapan SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar **Rp792,663,040,-**.



Dilihat dari grafik diatas, alokasi anggaran penerapan SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp792,663,040,- jika dihitung hanya sebesar 0,20% dari APBD Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp6.917.008.137.900,-. Jumlah ini relatif kecil untuk anggaran penerapan SPM, akan tetapi dikarenakan tidak adanya Bencana Tingkat Provinsi dan Relokasi Program Pemerintah, anggaran tersebut masih tergolong wajar untuk melakukan tahapan pendataan.

4.7.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Setelah dilaksanakan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2024, yang melibatkan Stakeholder terkait, telah ditetapkan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2024, dimana untuk susunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara eksisting tidak mengalami banyak perubahan dari tahun sebelumnya dimana terdapat 2 (dua) Program yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang telah disertai dengan penerapan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Program dan kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, sebagai berikut :

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - 3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - 5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
 - 6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - 1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - 2. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

4.7.6. BIDANG SOSIAL

Program dan kegiatan yang mendukung dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga / Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti dengan sub kegiatan:
 - Pengasuhan
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam panti dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan alat bantu
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial

- Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan
 - Akses ke layanan kesehatan dasar
 - Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga
 - Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - Pemulasaraan
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dengan sub kegiatan:
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan asrama yang mudah diakses
 - Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti
 - Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
 - Pemberian bimbingan keterampilan dasar
 - Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak
 - Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - Pemulangan ke daerah asal

2. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan sub kegiatan :
- Penyediaan permakanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan tempat penampungan pengungsi
 - Penanganan khusus bagi kelompok rentan
 - Pelayanan dukungan Psikososial

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2024, maka secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah berjalan dengan baik, namun masih perlu untuk ditingkatkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat pula ditingkatkan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2024 ini tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban, baik bagi pemerintah daerah maupun Kepala Daerah yang memimpinya. Kinerja yang baik dan optimal akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja untuk menuju ke arah penyelenggaraan pemerintahan *Good Governance* dengan mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Bali, 17 Maret 2025